



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);
10. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan.
  - (2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
2. Ketentuan angka 3 huruf a ayat (1) Pasal 2 diubah, angka 2 dan angka 4 huruf a ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

a. pergeseran anggaran belanja:

- 1) dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 2) Dihapus;
- 3) antarprogram dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*); dan/atau
- 4) Dihapus;
- 5) antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);

b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

c. perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan;

d. perubahan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri;
- e. perubahan anggaran belanja bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; dan,
- f. perubahan pagu proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN PBS sebagai akibat percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS setelah Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan;

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN diatas pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam 1 (satu) provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam 1 (satu) provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
- (4) Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.

Pasal II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal II

1. DIPA dan revisi DIPA pada masing-masing Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga yang telah disahkan, sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini tetap dinyatakan berlaku, sampai dengan disahkannya revisi DIPA masing-masing Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga yang baru.
2. Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN**  
**KEPPRES NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPPRES**  
**NOMOR 29 TAHUN 2013**  
**TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA**  
**PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2014**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 001  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>001.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>77.286.980</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>77.286.980</b>
		<b>001.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR</b>		<b>44.063.530</b>
			1001 Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal	12.537.625
			1002 Penyelenggaraan Kehumasan	2.811.980
			1003 Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal	23.108.146
			1004 Dukungan Teknis dan Administrasi Persidangan MPR dan Alat Kelengkapannya	548.140
			1005 Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan Pimpinan	4.509.619
			1006 Dukungan Pengkajian Kemajelisan	548.020
		<b>001.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR</b>		<b>33.223.450</b>
			1007 Pembangunan Pengadaan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana MPR	33.223.450
<b>001.02 MAJELIS</b>				<b>635.780.273</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>635.780.273</b>
		<b>001.02.06 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya</b>		<b>635.780.273</b>
			1008 Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	34.873.089
			1009 Pelaksanaan Tugas MPR	25.682.833
			5001 Pelaksanaan Sosialisasi Melalui Media Massa	82.733.127
			5002 Pelaksanaan Sosialisasi Dengan Berbagai Metode	416.864.053
			5003 Pengkajian Kemajelisan	57.340.714
			5004 Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR	18.286.457
<b>JUMLAH</b>				<b>713.067.253</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 002  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
002.01	SEKRETARIAT JENDERAL			819.388.509
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			819.388.509
		002.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI		416.620.962
			1010 Dukungan Persidangan dan Kegiatan Dewan	4.232.964
			1011 Penyelenggaraan Kehumasan Pemberitaan dan Keprotokolan	85.834.687
			1012 Dukungan Data dan Informasi	27.440.045
			1013 Manajemen Sumber Daya Manusia	28.763.321
			1015 Perencanaan dan Pengawasan	7.868.815
			1016 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas	242.355.982
			5218 Dukungan PUU Bidang Ekuindag	2.530.522
			5219 Dukungan PUU Bidang Polhukhamkes	2.851.957
			5220 Dukungan Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU	2.008.788
			5221 Dukungan Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN	2.084.649
			5222 Dukungan Pengawasan Legislatif	1.070.975
			5223 Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	9.253.851
			5224 Dukungan Pelaksanaan KSAP	324.406
		002.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI		402.767.547
			1017 Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	109.102.215
			1018 Pemeliharaan dan Penatausahaan Sarana dan Prasarana Gedung	293.665.332
002.02	D E W A N			2.068.761.675
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			2.068.761.675
		002.02.06 Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI		242.849.964
			1019 Perancangan Undang-Undang	226.345.976
			1020 Administrasi Hukum dan Litigasi DPR RI	6.772.115
			1021 Harmonisasi Undang-Undang	9.731.873
		002.02.07 Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI		68.742.502
			1022 Pembahasan RAPBN	16.691.575
			1023 Pembahasan Anggaran K/L Oleh Komisi	52.050.927
		002.02.08 Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI		206.375.832
			1024 Akuntabilitas Keuangan Negara	3.710.912
			1025 Pengawasan Pelaksanaan UU dan Pengawasan Kebijakan Pemerintah	202.664.920
		002.02.09 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI		1.550.793.377
			1026 Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan DPR RI	43.100.141
			1027 Pelaksanaan Tugas-Tugas Kerumahtanggaan DPR RI	24.023.386
			1028 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Parlemen/Hubungan Internasional	58.403.407
			1029 Pelaksanaan Tugas-Tugas Badan Kehormatan	6.469.021
			1030 Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan	1.418.797.422
<b>JUMLAH</b>				<b>2.888.150.184</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 004  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
004.01 SEKRETARIAT JENDERAL				1.814.129.824
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			1.814.129.824
		004.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK		1.252.993.256
			1032 Pelayanan Kesekretariatan Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri	138.998.029
			1033 Manajemen SDM	1.056.065.972
			1034 Pengelolaan dan Pertanggung-Jawaban Keuangan Negara	57.929.255
		004.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK		536.315.566
			1035 Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum	536.315.566
		004.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK		24.821.002
			1036 Pengawasan Oleh Inspektorat	24.821.002
004.02 B. P. K. PUSAT				780.822.130
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			780.822.130
		004.02.06 Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang		22.285.300
			1037 Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	9.357.219
			1038 Pelayanan Legislasi Analisis dan Bantuan Hukum	12.928.081
		004.02.07 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara		88.536.830
			1039 Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	12.439.105
			1040 Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan	8.258.747
			1041 Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara	16.012.910
			1042 Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	51.826.068
		004.02.08 Program Pemeriksaan Keuangan Negara		670.000.000
			1043 Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	670.000.000
JUMLAH				2.594.951.954





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 005  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(Dalam Ribu Pajadi)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
005.01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI			6.736.830.789
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			6.736.830.789
		005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung		5.928.265.624
			1064 Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	10.141.413
			1065 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.807.830
			1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5.801.622.098
			1067 Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	7.438.298
			1068 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	4.626.550
			1069 Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	10.877.383
			1070 Pelaksanaan Pembinaan Keamanan Urusan Tata Usaha Rumah Tangga Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	85.752.052
		005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung		808.565.165
			1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	130.165.499
			1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	678.399.666
005.02	KEPANITERAAN			111.585.000
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			111.585.000
		005.02.06 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung		111.585.000
			1044 Percepatan Peningkatan Penyelesaian Perkara	12.598.020
			1045 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	98.986.980
005.03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM			115.060.000
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			115.060.000
		005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		115.060.000
			1046 Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	25.127.445
			1047 Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	705.330
			1048 Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi Peninjauan Kembali dan Grasi	830.240
			1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	58.569.860
			1052 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	29.827.125
005.04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA			66.850.000
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			66.850.000
		005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		66.850.000
			1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	24.909.876
			1055 Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama	16.277.915
			1056 Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesvariahan	2.276.400
			1057 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	23.385.809
005.05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA			22.080.000
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			22.080.000
		005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)		22.080.000
			1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	4.152.700
			1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	5.169.520
			1061 Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	370.000
			1062 Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi Peninjauan Kembali (PK) Hak Uji Materil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	420.000
			1063 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	11.967.780
005.06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & PELATIHAN HUKUM & PERADILAN			79.380.000
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			79.380.000
		005.06.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung		79.380.000
			1073 Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan	26.900.000
			1074 Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	5.200.000
			1075 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	32.480.000
			1076 Peningkatan Profesional Aparatur Peradilan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan	14.800.000
005.07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG			28.104.795
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			28.104.795
		005.07.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI		28.104.795
			1077 Pengawasan Pelaksanaan Teknis Administrasi Peradilan Administrasi Umum Penanganan Pengaduan	14.055.138
			1078 Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja serta Perilaku Aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	3.500.000
			1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	10.549.657
JUMLAH				7.159.890.584



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 006  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
006.01	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA			3.570.196.463
	01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		2.763.458.523
		006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	2.623.306.114
			1080 Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerja Sama Hukum	3.427.663
			1081 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung Kejati Kejari dan Cabjari	23.028.184
			1082 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI	328.019.400
			1083 Perencanaan Pengembangan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian	6.842.900
			1084 Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI	25.124.830
			1085 Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan RI Pimpinan Kerumahtanggaan Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai	57.209.897
			1088 Sistem Informasi Manajemen	33.586.401
			1089 Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia	3.500.000
			1090 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung Kejati Kejari dan Cabjari	2.142.566.839
		006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	4.941.288
			1098 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan	4.941.288
		006.01.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	108.331.819
			5006 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	48.729.878
			5007 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	11.237.400
			5008 Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan	48.364.541
		006.01.06	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen	6.767.752
			1104 Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen	6.767.752
		006.01.07	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	11.705.305
			1109 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	11.705.305
		006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara	6.915.330
			1115 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	6.915.330
		006.01.09	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	1.490.915
			1120 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	1.490.915
	03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN		806.737.940
		006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	123.651.244
			1091 Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	123.651.244
		006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	15.202.634
			1092 Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I	693.000
			1093 Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II	693.000
			1094 Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah III	693.000
			1095 Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah IV	693.000
			1096 Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah V	693.000
			1097 Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di Daerah Baik di Kejati Kejari dan Cabjari dan Jajaran Pengawasan di Daerah	11.737.634
		006.01.06	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen	93.262.818
			1099 Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana	5.329.320
			1100 Pelaksanaan Kegiatan Sandi dan Produksi Intelijen	4.883.410
			1101 Pelaksanaan Kegiatan Politik Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi	975.648
			1102 Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati Kejari dan Cabjari	22.347.780
			1103 Penerangan dan Penyuluhan Hukum	59.726.660
		006.01.07	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	323.394.463
			1105 Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda	1.954.000
			1106 Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	1.563.200
			1107 Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya	6.839.000
			1108 Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	313.038.263
		006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara	236.611.969
			1110 Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat	8.551.400
			1111 Peningkatan Pra-Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	3.592.520
			1113 Peningkatan Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Pidana Korupsi)	1.043.375
			1114 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati Kejari dan Cabjari	223.424.674
		006.01.09	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	14.614.812
			1116 Penanganan Pemulihan dan Perlindungan Hak	1.136.400





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 006  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			1117 Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata	942.300
			1118 Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara	637.960
			1119 Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati Kejari dan Cabjari	11.898.152
<b>JUMLAH</b>				<b>3.570.196.463</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 007  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			1185 Penyelenggaraan Dukungan Sarana Prasarana Sekretariat Wakil Presiden	46.473.298
		<b>007.04.06 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden</b>		<b>69.228.467</b>
			1180 Penyelenggaraan Dukungan Keprotokolanan dan Kerumahtanggaan Wakil Presiden	61.294.227
			1186 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Keluarga	596.076
			1187 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah	481.188
			1188 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Hubungan Internasional	404.025
			1189 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Komunikasi Politik	420.620
			1190 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Usaha	580.466
			1191 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Dokumentasi dan Diseminasi Informasi	523.050
			1192 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Infrastruktur dan Energi	667.273
			1194 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	579.087
			1195 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pemerintahan dan Politik dalam Negeri	473.657
			1196 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Komunitas	604.342
			1197 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	487.065
			1199 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Industri dan Sumber Daya Alam	546.722
			1200 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Kebijakan Hukum dan HAM	361.764
			1201 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Program Ekonomi Khusus	590.670
			1202 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Perdagangan Pariwisata dan Kerja Sama Internasional	618.235
<b>007.05 SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN</b>				<b>28.385.076</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>28.385.076</b>
		<b>007.05.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara</b>		<b>5.638.266</b>
			1203 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Militer Presiden	5.638.266
		<b>007.05.06 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden</b>		<b>22.746.810</b>
			1205 Penyelenggaraan Dukungan Teknis dan Administrasi Personel TNI dan Polri	2.206.459
			1206 Pengkoordinasian Pengamanan Fisik dan Non Fisik bagi VVIP	4.012.962
			1207 Penyelenggaraan Administrasi Penganugerahan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	16.527.389
<b>007.06 PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN</b>				<b>28.969.559</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>28.969.559</b>
		<b>007.06.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara</b>		<b>28.969.559</b>
			1208 Perencanaan dan Penganggaran Paspampres	244.798
			3981 Pengawasan Internal Paspampres	190.187
			3982 Intelijen Paspampres	539.973
			3983 Operasi dan Latihan Paspampres	895.690
			3984 Personil Pengamanan Paspampres	7.227.387
			3985 Dukungan Umum Logistik Paspampres	19.871.524
<b>007.07 DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN</b>				<b>36.137.418</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>36.137.418</b>
		<b>007.07.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara</b>		<b>36.137.418</b>
			1210 Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi	464.003
			1211 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	35.673.415
<b>007.08 UNIT KERJA PRESIDEN BD.PENGAWASAN &amp; PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4)</b>				<b>55.947.508</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>55.947.508</b>
		<b>007.08.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara</b>		<b>55.947.508</b>
			1212 Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Sehingga Mencapai Sasaran Pembangunan Nasional Dengan Penyelesaian Penuh UKP-PPP	55.947.508
<b>007.09 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)</b>				<b>62.583.949</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>62.583.949</b>
		<b>007.09.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara</b>		<b>62.583.949</b>
			1213 Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK	62.583.949
<b>JUMLAH</b>				<b>2.005.516.178</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 007  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
007.01	SEKRETARIAT NEGARA			<b>1.140.369.615</b>
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			<b>1.140.369.615</b>
		007.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara		<b>562.509.959</b>
			1123 Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2.921.056
			1125 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	310.027.495
			1126 Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan serta Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara	581.040
			1128 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara	955.741
			1129 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	1.246.105
			1130 Penyelenggaraan Acara/Keprotokolan Kehumasan Ketatausahaan dan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	2.000.569
			1131 Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Ppkgbk	12.442.871
			1132 Dukungan Manajemen Kawasan Kemayoran	4.936.096
			1133 Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Usaha di Lingkungan Ppkgbk	11.519.614
			1134 Pengusahaan Kawasan Kemayoran	42.072.403
			1135 Pengelolaan dan Penatausahaan Kepegawaian HukumHumas dan Kerumah-tanggaan di Lingkungan PPKGBK	28.998.609
			1136 Penyusunan Desain Rencana Pembaharuan Hukum KHN	59.472.521
			1138 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Sekretariat Negara	61.937.387
			1142 Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian Sekretariat Negara	10.632.710
			4023 Pengembangan Kawasan Kemayoran	12.765.742
		007.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara		<b>569.103.240</b>
			1139 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	569.103.240
		007.01.06 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden		<b>8.756.416</b>
			1127 Penanganan Pengaduan Masyarakat	367.856
			1140 Dukungan Analisis Kebijakan dalam Negeri dan Permohonan Acara Kepresidenan	411.886
			1141 Dukungan Analisis Kebijakan Hubungan Internasional dan Permohonan Acara Kepresidenan	663.223
			1143 Pelaksanaan Hubungan Dengan Lembaga Daerah dan Organisasi Politik	337.621
			1144 Pelaksanaan Hubungan Dengan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural	480.680
			1145 Pelaksanaan Hubungan Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	536.395
			1147 Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Permasalahan Hukum Ratifikasi Prerogatif dan Naturalisasi serta Penyelenggaraan Administrasi Perundang-Undangan	1.340.527
			1148 Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri	3.076.845
			1149 Dukungan Penyiapan Penerjemahan dan Pencatatan Naskah/Surat/Produk Resmi Kenegaraan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah	801.971
			1150 Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian RUU RPerpu dan RPP serta Evaluasi Pelaksanaan UU Perpu dan PP Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri	317.580
			1151 Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian RUU RPerpu dan RPP serta Evaluasi Pelaksanaan UU Perpu dan PP Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat	255.752
			4022 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara serta Administrasi Lainnya yang berkaitan Dengan Pejabat Negara	166.080
007.03	SEKRETARIAT PRESIDEN			<b>413.599.687</b>
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			<b>413.599.687</b>
		007.03.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara		<b>280.650.341</b>
			1168 Pelaksanaan Tugas Administrasi Kesekretariatan	82.555.484
			1170 Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta	66.923.763
			1174 Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Bogor	20.282.884
			1175 Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Cipanas	14.812.810
			1176 Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Yogyakarta	22.104.347
			1177 Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	16.223.086
			1178 Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Istana Kepresidenan	57.747.967
		007.03.06 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden		<b>132.949.346</b>
			1172 Penyelenggaraan Dukungan Pers Media dan Informasi	5.890.760
			1173 Penyelenggaraan Keprotokolan	127.058.586
007.04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN			<b>239.523.366</b>
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			<b>239.523.366</b>
		007.04.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara		<b>123.821.601</b>
			1179 Penyelenggaraan Dukungan Perencanaan Anggaran dan Keuangan	22.273.290
			1181 Penyelenggaraan Dukungan Tata Usaha dan Kepegawaian	6.453.545
			1183 Penyelenggaraan Dukungan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	7.945.609
			5213 Penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat	87.149.157
		007.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara		<b>46.473.298</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 010  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
010.01	SEKRETARIAT JENDERAL			949.313.857
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			527.683.643
		010.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri		240.351.367
		1214 Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum		6.451.940
		1215 Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		9.443.500
		1216 Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja		7.350.582
		1217 Perencanaan Program dan Anggaran		12.779.019
		1218 Pengelolaan Ketatausahaan Rumah Tangga dan Keprotokolan		54.254.503
		1219 Penataan Administrasi Kerja Sama Luar Negeri		5.832.555
		1220 Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset		115.136.906
		1221 Pengelolaan Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi		14.706.223
		1222 Pengkajian Kebijakan Strategik		7.324.523
		1223 Pengelolaan Penerangan		7.071.616
		010.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri		287.332.276
		1224 Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur		287.332.276
	10 FUNGSI PENDIDIKAN			421.630.214
		010.01.12 Program Pendidikan Kepamongprajaan		421.630.214
		1292 Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan Kepamongprajaan		42.046.507
		1293 Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan		13.540.147
		1294 Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan		227.771.069
		1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah		138.272.491
010.02	INSPEKTORAT JENDERAL			45.641.023
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			45.641.023
		010.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri		45.641.023
		1225 Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I		4.246.347
		1226 Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II		3.954.405
		1227 Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III		3.398.011
		1228 Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV		3.426.146
		1229 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian dalam Negeri		28.156.918
		1230 Penyelenggaraan Pemeriksaan Pengusutan Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus		2.459.196
010.03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			176.210.000
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			176.210.000
		010.03.11 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik		176.210.000
		1231 Fasilitasi Ketahanan Seni Budaya Agama dan Masyarakat		24.302.165
		1232 Fasilitasi Politik dalam Negeri		45.697.055
		1233 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi		11.043.900
		1234 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional		32.875.271
		1235 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		24.071.374
		1236 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik		38.220.235
010.04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM			261.083.286
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			144.889.304
		010.04.08 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		144.889.304
		1237 Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah		44.165.042
		1240 Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		53.340.304
		1242 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemerintahan Umum		47.383.958
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			35.595.825
		010.04.08 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		35.595.825
		1239 Pembinaan Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		35.595.825
	06 FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM			80.598.157
		010.04.08 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		80.598.157
		1238 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan		16.276.926
		1241 Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		64.321.231
010.05	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			10.591.598.065
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			171.486.422
		010.05.13 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		171.486.422
		1248 Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna		25.577.356
		1249 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		25.537.119
		1250 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		120.371.947
	06 FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM			10.420.111.643
		010.05.13 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		10.420.111.643
		1243 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional		24.520.215
		1244 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		35.947.144
		1245 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)		9.710.424.074
		1246 Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		628.638.608
		1247 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		20.581.602
010.06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH			368.802.335
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			252.991.808





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 010  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
		<b>010.06.06 Program Bina Pembangunan Daerah</b>		<b>252.991.808</b>
			1252 Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	33.757.618
			1253 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu	79.323.219
			1254 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah	34.043.857
			1256 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda	105.867.114
	<b>05 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>88.609.128</b>
		<b>010.06.06 Program Bina Pembangunan Daerah</b>		<b>88.609.128</b>
			1251 Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	88.609.128
	<b>06 FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>			<b>27.201.399</b>
		<b>010.06.06 Program Bina Pembangunan Daerah</b>		<b>27.201.399</b>
			1255 Fasilitasi Penataan Perkotaan	27.201.399
<b>010.07</b>	<b>DITJEN OTONOMI DAERAH</b>			<b>79.426.123</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>79.426.123</b>
		<b>010.07.07 Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah</b>		<b>79.426.123</b>
			1258 Fasilitasi Kdh DPRD dan Hubungan Antar Lembaga	4.138.492
			1259 Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan Dpod	9.908.107
			1261 Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	9.220.300
			1264 Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I	13.812.757
			1265 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Otonomi Daerah	30.512.503
			3991 Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II	11.833.964
<b>010.08</b>	<b>DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			<b>1.040.053.279</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>1.040.053.279</b>
		<b>010.08.10 Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>		<b>1.040.053.279</b>
			1267 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	926.108.978
			1268 Pengelolaan Informasi Kependudukan	32.489.752
			1269 Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	7.254.637
			1270 Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	6.919.540
			1271 Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan	4.848.503
			1272 Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan	5.549.512
			1273 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	56.882.357
<b>010.09</b>	<b>DITJEN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>58.532.517</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>58.532.517</b>
		<b>010.09.09 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah</b>		<b>58.532.517</b>
			1274 Pembinaan Anggaran Daerah	7.034.649
			1275 Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah	7.547.709
			1276 Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan	5.756.808
			1277 Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	7.209.134
			1278 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Keuangan Daerah	30.984.217
<b>010.11</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>44.178.762</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>44.178.762</b>
		<b>010.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri</b>		<b>44.178.762</b>
			1280 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah	4.095.450
			1281 Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesbangpol dan Orda	4.466.350
			1282 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pum dan Kependudukan	4.018.200
			1283 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	3.528.500
			1284 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri	28.070.262
<b>010.12</b>	<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			<b>182.196.204</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>182.196.204</b>
		<b>010.12.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri</b>		<b>182.196.204</b>
			1285 Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis	12.731.067
			1287 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan Kependudukan dan Keuangan Daerah	9.030.983
			1288 Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat	9.769.357
			1289 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah	20.517.933
			1290 Pendidikan dan Pelatihan Regional	68.424.096
			1291 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan	61.722.768
<b>JUMLAH</b>				<b>13.797.035.451</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 011  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
011.01 SEKRETARIAT JENDERAL				4.232.920.264
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			4.232.920.264
		011.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri		3.920.148.703
			1296 Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Kementerian dan Perwakilan	19.981.434
			1297 Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Menteri Luar Negeri	18.163.426
			1298 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri	190.666.152
			1299 Pengelolaan Keuangan Kementerian Luar Negeri	85.819.044
			1300 Penyusunan Perencanaan dan Penguatan Organisasi Kementerian Luar Negeri	15.000.000
			1301 Pengelolaan Perlengkapan serta Urusan Rumah Tangga Kementerian Luar Negeri	51.199.579
			1302 Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional Perwakilan RI	3.333.876.806
			1303 Dukungan Sistem Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri	146.144.500
			1304 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik	59.297.762
		011.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri		312.771.561
			1305 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri	33.176.678
			1306 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI di Luar Negeri	279.594.883
011.02 DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA				42.824.453
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			42.824.453
		011.02.08 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia		42.824.453
			1307 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika	3.653.658
			1308 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	3.076.232
			1309 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	5.134.485
			1310 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	8.531.184
			1311 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah	3.270.452
			1312 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	19.158.442
011.03 DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EUROPA				30.050.070
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			30.050.070
		011.03.10 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Karibia		30.050.070
			1313 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia	1.668.177
			1314 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah	2.398.935
			1315 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat	2.394.352
			1316 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur	1.697.535
			1317 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa	3.189.032
			1318 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Amerika dan Eropa	18.702.039
011.04 DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN				47.712.875
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			47.712.875
		011.04.06 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN		47.712.875
			1319 Kerja Sama Asean Bidang Ekonomi	4.597.637
			1320 Kerja Sama Asean Bidang Fungsional	3.869.964
			1321 Kerja Sama Asean Dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan	4.106.088
			1322 Kerja Sama Asean Bidang Politik dan Keamanan	11.061.192
			1323 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerja Sama Asean	24.077.994
011.05 DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL				296.177.226
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			296.177.226
		011.05.07 Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral		296.177.226
			1324 Kerja Sama Multilateral dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Penanganan Isu Kemanusiaan	6.038.137
			1325 Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme	7.656.346
			1326 Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi Keuangan dan Lingkungan Hidup	3.453.744
			1327 Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Perdagangan Perindustrian Investasi dan Haki	3.665.971
			1328 Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	5.226.666
			1329 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Multilateral	270.136.362
011.06 DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK				60.318.779
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			60.318.779
		011.06.13 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik		60.318.779
			1330 Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik	22.182.798
			1331 Penguatan Citra Indonesia Melalui Informasi dan Pelayanan Media	7.207.919
			1332 Pengamanan Diplomatik Bidang Informasi Personalita dan Kerja Sama Pengamanan	3.144.636





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 011  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			1333 Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerja Sama Teknik	7.440.845
			1334 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	20.342.581
<b>011.07 DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL</b>				<b>29.176.741</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>29.176.741</b>
		<b>011.07.09 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional</b>		<b>29.176.741</b>
			1335 Penguatan Diplomasi Melalui Pelaksanaan Hukum	2.416.311
			1336 Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya serta Pengelolaan Naskah Perjanjian Internasional	6.113.539
			1337 Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik Keamanan Kewilayahan dan Kelautan	9.330.832
			1338 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	11.316.059
<b>011.08 DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER</b>				<b>104.681.503</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>104.681.503</b>
		<b>011.08.12 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran</b>		<b>104.681.503</b>
			1339 Pelayanan Fasilitas Diplomatik	1.960.000
			1340 Pelayanan Kekonsuleran	5.290.000
			1341 Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	78.600.307
			1342 Pelayanan Keprotokolan	1.960.836
			1343 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Protokol dan Konsuler	16.870.360
<b>011.09 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>19.630.884</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>19.630.884</b>
		<b>011.09.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri</b>		<b>19.630.884</b>
			1344 Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Asia dan Kementerian Luar Negeri I	1.707.848
			1345 Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Eropa dan Kementerian Luar Negeri II	2.143.959
			1346 Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Afrika dan Timur Tengah dan Kementerian Luar Negeri III	1.961.694
			1347 Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Amerika Karibia dan Pasifik dan Kementerian Luar Negeri IV	2.286.161
			1348 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri	11.531.222
<b>011.11 BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN</b>				<b>22.322.169</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>22.322.169</b>
		<b>011.11.11 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri</b>		<b>22.322.169</b>
			1349 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri di Kawasan Amerika dan Eropa	2.305.483
			1350 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri di Kawasan Asia Pasifik Timur Tengah dan Afrika	2.445.107
			1351 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri pada Organisasi Internasional dan Regional Sesuai Prioritas Kajian	2.283.028
			1352 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	15.288.551
<b>JUMLAH</b>				<b>4.885.814.964</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 012  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
012.01	KEMENTERIAN PERTAHANAN			20.404.148.321
	02 FUNGSI PERTAHANAN			20.404.148.321
		012.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan		894.354.244
			1354 Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara	107.191.324
			1355 Pelayanan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan	37.928.180
			1357 Pelayanan Bantuan Hukum	14.486.995
			1358 Pelayanan Rehabilitasi dan Perumaksudan	61.532.444
			1359 Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan	255.086.571
			1360 Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UO Kemhan	158.422.925
			1361 Dukungan Pembinaan dan Pengelolaan Pegawai UO Kemhan	126.786.506
			1362 Dukungan Perencanaan dan Penganggaran Program Kerja UO Kemhan	65.383.310
			1363 Dukungan Administrasi Pelayanan Pimpinan UO Kemhan	49.095.930
			1365 Pelayanan Komunikasi Publik	18.440.059
		012.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan		15.791.231.286
			1366 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	4.139.217
			1367 Kelaikan Sarana Pertahanan	3.424.940
			1368 Kodifikasi Materiil Pertahanan	4.302.979
			1369 Pengadaan Jasa Konstruksi Pertahanan	458.659.057
			1370 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan	56.146.271
			1371 Pengadaan Barang dan Jasa Militer	15.211.856.346
			1372 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Rerahan	52.702.476
		012.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan		54.118.311
			1373 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	50.052.232
			1374 Pengawasan Umum Kemhan/TNI	985.000
			1375 Pengawasan Pengadaan Kemhan/TNI	950.000
			1376 Pengawasan Keuangan Kemhan/TNI	882.704
			1377 Pengawasan Logistik Kemhan/TNI	1.248.375
		012.01.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan		311.254.365
			1378 Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan	3.103.743
			1379 Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan	42.282.505
			1380 Penelitian dan Pengembangan Iptek Pertahanan	229.759.932
			1381 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan	2.015.693
			1382 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang	34.092.492
		012.01.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI		78.919.095
			1383 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa	9.830.560
			1384 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan	6.756.555
			1385 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan	6.761.876
			1387 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklat	55.570.104
		012.01.06 Program Strategi Pertahanan		135.295.290
			1388 Analisa Strategis	8.999.494
			1389 Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif	25.714.318
			1390 Kerja Sama Internasional	14.835.232
			1391 Perumusan Kebijakan Pengerahan Komponen Pertahanan Negara	6.147.393
			1392 Perumusan Hukum Strategi Pertahanan	9.910.205
			1393 Pengelolaan Wilayah Pertahanan	5.380.890
			1394 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Strahan	64.307.758
		012.01.07 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan		74.641.009
			1395 Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran	1.968.602
			1397 Pengendalian dan Program Anggaran	3.935.657
			1398 Perencanaan Pembangunan Pertahanan	6.467.614
			1399 Perencanaan Program dan Anggaran	6.925.741
			1400 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Renhan Kemhan	55.343.395
		012.01.08 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan		2.184.173.237
			1401 Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan	2.184.173.237
		012.01.09 Program Potensi Pertahanan		240.867.984
			1402 Pembinaan Keveteranan	8.531.624
			1403 Pembinaan Kesadaran Bela Negara	6.538.117
			1404 Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan	7.131.536
			1405 Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung	5.828.626
			1406 Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan	165.395.896
			1407 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Potan Kemhan	47.442.185
		012.01.10 Program Kekuatan Pertahanan		508.346.838
			1408 Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan	431.472.593
			1409 Pembinaan Kesehatan Pertahanan	14.306.026
			1410 Pembinaan Materiil Pertahanan	7.736.798
			1412 Pembinaan Sumber Daya Manusia	11.779.506
			1413 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kuathan Kemhan	43.051.915
	10 FUNGSI PENDIDIKAN			130.946.662
		012.01.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI		130.946.662
			1386 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan	130.946.662
012.21	MARKAS BESAR TNI			6.917.821.479
	02 FUNGSI PERTAHANAN			6.917.821.479
		012.21.11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif		2.085.732.048



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 012  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			1414 Operasi Militer Untuk Perang (OMP)	1.234.063.054
			1415 Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	650.500.000
			1416 Ops Gaktib dan Ops Yustisi	23.076.300
			1417 Operasi Intelijen Strategis	36.000.008
			1418 Operasi Sar TNI	6.562.096
			1419 Operasi Bantuan TNI	112.120.190
			1420 Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	10.010.400
			1421 Pemeliharaan Alut Integratif	8.300.000
			1422 Pemeliharaan Non-Alut Integratif	5.100.000
		<b>012.21.12 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif</b>		<b>1.493.823.200</b>
			1423 Pengadaan Rantis Sucad Ranpur dan Sucad Rantis	48.855.000
			1424 Pengadaan Non-Alutsista/Senjata	27.296.000
			1427 Pengadaan Materiil Khusus	192.550.000
			1428 Pengadaan MKB	49.090.000
			1430 Pengadaan Non-Alut	69.484.500
			1431 Pembangunan Sarpras Pendukung	17.011.700
			1432 Pengadaan Alutsista Strategis Integratif	1.089.536.000
		<b>012.21.13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif</b>		<b>305.886.641</b>
			1433 Pendidikan Pertama (Dikma) dan Penerimaan (Werving) TNI/PNS	136.540.450
			1434 Pendidikan Pengembangan/Spesialisasi	61.794.202
			1435 Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Latgab/Latma Internasional	48.588.773
			1436 Latihan Pembinaan Balakpus TNI	7.000.000
			1437 Latihan Pratugas Operasi	4.000.000
			1438 Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif	47.963.216
		<b>012.21.23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif</b>		<b>3.032.379.590</b>
			1439 Penyelenggaraan Administrasi dan Perawatan Personel Integratif	1.748.302.646
			1440 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	1.042.126.037
			1441 Penyelenggaraan Pemeliharaan/Perawatan Perkantoran Integratif	219.149.544
			1442 Perawatan Sarana dan Prasarana	20.301.363
			1443 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Integratif	2.500.000
<b>012.22 MARKAS BESAR TNI AD</b>				<b>35.184.226.541</b>
	<b>02 FUNGSI PERTAHANAN</b>			<b>35.184.226.541</b>
		<b>012.22.14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat</b>		<b>1.477.857.213</b>
			1444 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat	189.082.767
			1445 Kerja Sama Internasional Matra Darat	3.644.400
			1446 Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan	4.027.999
			1447 Pemeliharaan/Perawatan Ranpur	29.723.531
			1448 Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang	106.786.765
			1449 Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air	15.956.677
			1450 Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal	418.506.083
			1451 Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista	282.590.301
			1452 Penyelenggaraan Kegiatan Teritorial Matra Darat	201.199.968
			1453 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat	7.829.329
			1454 Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Darat	50.901.745
			1455 Pemeliharaan dan Perawatan Kesatriaian dan Fasilitas Latihan/Tempur	3.220.299
			1456 Penyelenggaraan Pembinaan Potensi Nasional Menjadi Kekuatan Pertahanan	140.576.406
			1457 Penyelenggaraan OMSP	23.801.943
		<b>012.22.15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat</b>		<b>3.570.893.765</b>
			1458 Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur	48.600.000
			1459 Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)	138.846.600
			1460 Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air	22.833.908
			1461 Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi	185.650.920
			1462 Pengadaan/Penggantian Material Alutsista	98.260.756
			1463 Pengadaan/Penggantian Material Non Alutsista	1.102.870.239
			1464 Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat	741.431.342
			1465 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat	1.232.400.000
		<b>012.22.16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat</b>		<b>1.154.714.281</b>
			1466 Latihan Matra Darat	296.000.000
			1467 Latihan Bersama Internasional	20.026.940
			1468 Pendidikan Pertama Matra Darat	468.109.041
			1469 Pendidikan Pembentukan Matra Darat	151.880.600
			1470 Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat	46.353.524
			1471 Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat	70.687.970
			1472 Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat	71.656.206
			1473 Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat	30.000.000
		<b>012.22.24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat</b>		<b>28.980.761.282</b>
			1474 Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat	25.777.843.806
			1475 Penguatan Fungsi Matra Darat	341.709.433
			1476 Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat	2.193.902
			1477 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum	6.597.925
			1478 Penyelenggaraan Administrasi Personel	182.564.174
			1479 Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional Fasilitas dan Sarpras Perkantoran	452.473.388
			1480 Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal	1.533.158.386
			1481 Penyelenggaraan Penpas dan Penum	25.388.000
			1482 Penyelenggaraan Administrasi Umum	633.028.282
			1483 Penyelenggaraan Administrasi Pembinaan Perencanaan Penganggaran dan Keuangan	23.003.986





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 012  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			1484 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	2.800.000
<b>012.23 MARKAS BESAR TNI AL</b>				<b>11.081.087.713</b>
	<b>02 FUNGSI PERTAHANAN</b>			<b>11.081.087.713</b>
		<b>012.23.17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut</b>		<b>938.943.400</b>
			1485 Penyelenggaraan Surta Hidros	10.030.000
			1486 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Laut	8.500.000
			1487 Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Laut	1.750.000
			1488 Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek Matra Laut	14.970.000
			1489 Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi Matra Laut	50.950.000
			1490 Pemeliharaan/Perawatan Alpung KAL KRI dan Ranpur/Rantis	692.380.400
			1491 Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional	
				58.713.000
			1492 Litbanghan Matra Laut	17.500.000
			1493 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut	38.650.000
			1494 Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut	8.000.000
			1495 Pemeliharaan/Perawatan Pesud	37.500.000
		<b>012.23.18 Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut</b>		<b>2.493.926.465</b>
			1496 Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut	343.230.480
			1497 Peningkatan/Pengadaan Peralatan Surta Hidros Matra Laut	15.750.000
			1498 Peningkatan/Pengadaan Peralatan Komlek Matra Laut	15.000.000
			1499 Peningkatan/Pengadaan Senlek dan Amonisi Matra Laut	44.500.000
			1500 Peningkatan/Pengadaan Alpung Kri Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut	275.000.000
			1501 Peningkatan/Pengadaan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut	
				357.883.985
			1502 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut	1.427.562.000
			1503 Peningkatan/Pengadaan Pesud dan Sarana Prasarana Penerbangan Matra Laut	
				15.000.000
		<b>012.23.19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut</b>		<b>327.597.000</b>
			1504 Werving dan Seleksi	6.993.700
			1505 Pembangunan Fasilitas dan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Laut	
				56.249.814
			1506 Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut	67.439.486
			1507 Pendidikan Pertama Pengembangan Umum Spesialisasi Profesi dan Ketrampilan serta Pendidikan Pembentukan Matra Laut	
				194.414.000
			1508 Penyelenggaraan Psikologi Matra Laut	2.500.000
		<b>012.23.25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut</b>		<b>7.320.620.848</b>
			1509 Penyelenggaraan Administrasi Personel Matra Laut	8.600.000
			1510 Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional Fasilitas Sarana Prasarana dan Pengelolaan LTGA	293.684.390
			1511 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Matra Laut	62.565.812
			1512 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Matra Laut	2.200.000
			1513 Penyelenggaraan Admin Perencanaan Penganggaran dan Keuangan Matra Laut	
				22.250.000
			1514 Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal Matra Laut	
				977.897.454
			1515 Penyelenggaraan Penerangan Pasukan (Penpas) dan Penerangan Umum (Penum) Matra Laut	10.250.000
			1516 Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Matra Laut	5.861.981.812
			1517 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Matra Laut	7.500.000
			1518 Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Laut	4.818.180
			1519 Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Laut	68.873.200
<b>012.24 MARKAS BESAR TNI AU</b>				<b>9.713.012.786</b>
	<b>02 FUNGSI PERTAHANAN</b>			<b>9.713.012.786</b>
		<b>012.24.20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara</b>		<b>694.136.751</b>
			1520 Penyelenggaraan OMSP Matra Udara	3.475.000
			1521 Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Udara Senjata dan Almatsus Lainnya	338.479.294
			1522 Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerbangan	41.264.700
			1523 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara	16.493.904
			1524 Pemeliharaan/Perawatan Radar Psu dan Almatsus Komlek Lainnya	106.189.125
			1525 Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Udara	14.019.770
			1526 Litbanghan Matra Udara	25.000.000
			1527 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara	7.665.000
			1528 Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Matra Udara	3.787.500
			1529 Penyelenggaraan Surta	137.762.458
		<b>012.24.21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara</b>		<b>4.670.247.349</b>
			1530 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara	2.522.940.969
			1531 Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara	1.167.444.667
			1532 Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	231.161.713
			1533 Peningkatan/Pengadaan Radar Psu dan Alat Komlek Lainnya	588.000.000
			1534 Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat	70.000.000
			1535 Pengadaan Peralatan Non Alutsista	90.700.000
		<b>012.24.22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara</b>		<b>283.763.616</b>
			1536 Latihan Matra Udara	51.891.738
			1537 Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara	147.725.312
			1538 Pembangunan Sarana-Prasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara	71.376.966
			1539 Werving	8.271.500
			1540 Penyelenggaraan Psikologi Matra Udara	4.498.100
		<b>012.24.26 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara</b>		<b>4.064.865.070</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 012  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			1541 Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara	3.948.004
			1542 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	2.700.000
			1543 Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional Fasilitas dan Sarana Prasarana serta Pengelolaan LTGA	105.252.426
			1544 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	43.074.615
			1545 Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan Penganggaran dan Keuangan	45.957.629
			1546 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum	2.176.114
			1547 Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan Umum dan Pemeliharaan dan Perawatan Perkantoran	628.960.305
			1548 Penyelenggaraan Administrasi Personel Matra Udara	1.450.000
			1549 Penyelenggaraan Penerangan Pasukan (Penpas) dan Penerangan Umum (Penum) Matra Udara	5.350.000
			1550 Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara	3.215.361.077
			1551 Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Udara	10.634.900
<b>JUMLAH</b>				<b>83.300.296.840</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 013  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>013.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>6.307.709.078</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>5.357.756.812</b>
		<b>013.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM</b>		<b>5.357.756.812</b>
			1552 Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri Kementerian Hukum dan HAM	675.776
			1553 Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM	1.185.410
			1554 Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM	8.899.292
			1555 Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja	3.531.378
			1556 Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM	2.390.602
			1557 Pelayanan Ketelausahaan dan Kerumah Tanggahan Kementerian Hukum dan HAM	1.637.575.196
			1558 Pengelolaan Administratif Pelayanan dan Penegakan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	3.700.114.914
			1560 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	3.384.244
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>			<b>949.952.266</b>
		<b>013.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM</b>		<b>949.952.266</b>
			1562 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kanwil	949.952.266
<b>013.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>20.450.983</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>15.382.260</b>
		<b>013.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM</b>		<b>15.382.260</b>
			1569 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	15.382.260
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>			<b>5.068.723</b>
		<b>013.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM</b>		<b>5.068.723</b>
			1563 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	620.583,00
			1564 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	602.422,00
			1565 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	970.871,00
			1566 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	641.062,00
			1567 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	631.720,00
			1568 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI (Wilayah Khusus)	1.602.065,00
<b>013.03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM</b>				<b>245.233.381</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>214.742.268</b>
		<b>013.03.07 Program Administrasi Hukum Umum</b>		<b>214.742.268</b>
			1576 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU	214.742.268
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>			<b>30.491.113</b>
		<b>013.03.07 Program Administrasi Hukum Umum</b>		<b>30.491.113</b>
			1571 Administrasi Hukum Daktiloskopi	1.992.360
			1572 Administrasi Hukum Internasional dan Otoritas Pusat	2.528.228
			1573 Administrasi Hukum Perdata	18.187.718
			1574 Administrasi Hukum Pidana	1.669.723
			1575 Administrasi Hukum Tata Negara	6.113.084
<b>013.05 DITJEN PEMASYARAKATAN</b>				<b>43.307.517</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>37.144.517</b>
		<b>013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan</b>		<b>37.144.517</b>
			1583 Dukungan Pelayanan Teknis dan Administratif di Lingkungan Ditjen Pemasarakatan	37.144.517
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>			<b>6.163.000</b>
		<b>013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan</b>		<b>6.163.000</b>
			1577 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	1.209.200
			1578 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi	1.053.800
			1579 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan	1.000.000
			1580 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan pelayanan Tahanan	1.100.000
			1581 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	800.000
			1582 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1.000.000
<b>013.06 DITJEN IMIGRASI</b>				<b>708.333.841</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>104.008.733</b>
		<b>013.06.10 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian</b>		<b>104.008.733</b>
			1590 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	104.008.733
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>			<b>604.325.108</b>
		<b>013.06.10 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian</b>		<b>604.325.108</b>
			1584 Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian	284.839.672
			1585 Perumusan Kebijakan dan Pendeteksian Pelanggaran Atau Kejahatan Keimigrasian	7.356.350
			1586 Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	8.773.923
			1587 Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri	7.942.563
			1588 Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian	6.908.477
			1589 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	288.504.123
<b>013.07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>				<b>94.131.334</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>71.099.553</b>
		<b>013.07.09 Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI</b>		<b>71.099.553</b>
			1597 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen HKI	71.099.553
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>			<b>23.031.781</b>
		<b>013.07.09 Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI</b>		<b>23.031.781</b>
			1591 Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	810.552





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 013  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			1592 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi HKI	5.075.559
			1593 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	2.005.450
			1594 Penyelenggaraan Sistem Paten	986.844
			1595 Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang HKI	2.526.120
			1596 Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI	11.627.256
<b>013.08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				<b>28.075.424</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>	<b>013.08.06 Program Pembentukan Hukum</b>		<b>17.179.167</b>
			1603 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP	17.179.167
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	<b>013.08.06 Program Pembentukan Hukum</b>		<b>10.896.257</b>
			1598 Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah	933.951
			1599 Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.765.700
			1600 Litigasi Peraturan Perundang-Undangan	483.840
			1601 Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	5.845.932
			1602 Pengundangan Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-Undangan	866.834
<b>013.09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA</b>				<b>20.197.392</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>	<b>013.09.11 Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM</b>		<b>16.192.010</b>
			1609 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen HAM	16.192.010
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	<b>013.09.11 Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM</b>		<b>4.005.382</b>
			1604 Diseminasi HAM	808.200
			1605 Informasi HAM	616.041
			1606 Kerja Sama HAM	906.100
			1607 Pelayanan Komunikasi Masyarakat	616.041
			1608 Penguatan HAM	1.059.000
<b>013.10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL</b>				<b>80.349.543</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>	<b>013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional</b>		<b>24.797.463</b>
			1614 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	24.797.463
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	<b>013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional</b>		<b>55.552.080</b>
			1610 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Publikasi Pengolahan Data Hukum dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	1.307.660
			1611 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Pengkajian dan Penelitian serta Pertemuan Ilmiah dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional	1.703.700
			1612 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional	51.233.420
			1613 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Perencanaan Pembangunan Hukum Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan serta Kerja Sama Bidang Hukum dalam Rangka Pembinaan d	1.307.300
<b>013.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM</b>				<b>14.887.398</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>	<b>013.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM</b>		<b>12.588.517</b>
			1619 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan HAM	12.588.517
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	<b>013.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM</b>		<b>2.298.881</b>
			1615 Penelitian Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	583.459
			1616 Penelitian Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus	580.542
			1617 Penelitian Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik	568.166
			1618 Penelitian Evaluasi dan Pengembangan Transformasi Konflik	566.714
<b>013.12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>				<b>44.821.494</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>	<b>013.12.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM</b>		<b>20.283.613</b>
			1624 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	20.283.613
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	<b>013.12.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM</b>		<b>5.406.805</b>
			1621 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM	1.000.000
			1622 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen	1.000.000
			1623 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	3.406.805
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>	<b>013.12.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM</b>		<b>19.131.076</b>
			1620 Pendidikan Kedinasan	19.131.076
<b>JUMLAH</b>				<b>7.607.497.385</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 015  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
015.01 SEKRETARIAT JENDERAL				6.998.891.061
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			6.409.056.771
		015.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan		6.409.056.771
			1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum	6.172.122
			1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara	13.418.163
			1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan	2.650.803
			1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi/Tata Laksana dan Jabatan Fungsional	5.312.630
			1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran	36.290.562
			1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan	4.858.470
			1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM	26.991.027
			1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian	5.730.937.828
			1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan	8.221.286
			1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan	304.621.759
			1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah	54.156.102
			1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	16.049.216
			1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik	16.254.411
			1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN	138.471.986
			1639 Penyelesaian Sengketa Pajak	38.874.573
			5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan	5.775.833
	10 FUNGSI PENDIDIKAN			589.834.290
		015.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan		589.834.290
			5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	589.834.290
015.02 INSPEKTORAT JENDERAL				87.818.987
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			87.818.987
		015.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan		87.818.987
			1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN	2.734.152
			1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	18.739.999
			1647 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan	6.691.210
			1648 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral	59.653.626
015.03 DITJEN ANGGARAN				130.618.343
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			130.618.343
		015.03.07 Program Pengelolaan Anggaran Negara		130.618.343
			1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)	5.371.716
			1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)	518.060
			1651 Penyusunan Rancangan APBN	3.528.748
			1652 Pengelolaan PNPB dan Subsidi	4.334.497
			1653 Pengembangan Sistem Penganggaran	5.571.190
			1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran	108.769.807
			5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran	2.524.325
015.04 DITJEN PAJAK				5.235.586.424
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			5.235.586.424
		015.04.12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak		5.235.586.424
			1655 Peningkatan Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	65.491.079
			1656 Pembinaan Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi Perpajakan	103.184.538
			1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis	2.951.184
			1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan	3.262.147
			1659 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Penyidikan Perpajakan	9.387.987
			1660 Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding	5.864.579
			1661 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan SDM dan Pengembangan Organisasi	13.399.466
			1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan	10.565.323
			1663 Perumusan Kebijakan Standardisasi dan Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan	4.832.123
			1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN PBB BPHTB KUP PPSP dan Bea Materai	7.596.313
			1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Internasional	10.431.407
			1666 Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi di Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi	121.812.613
			1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah	506.162.958
			1668 Pelaksanaan Penyuluhan Pelayanan Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah	2.853.378.560
			1669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan	63.809.700
			1670 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP	1.441.528.630
			5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan	11.927.817
015.05 DITJEN BEA DAN CUKAI				2.706.249.054



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 015  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>2.706.249.054</b>
		<b>015.05.13 Program Pengawasan Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai</b>		<b>2.706.249.054</b>
			1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	17.282.531
			1672 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai	29.204.994
			1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai	320.244.552
			1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan	869.590
			1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	168.475.990
			1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional	2.118.313
			1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai	20.762.453
			1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai	674.461.185
			1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan	2.169.214
			1680 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	241.946.913
			1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	679.547.681
			1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	128.904.863
			1683 Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	115.269.854
			1684 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan LN	6.714.477
			1685 Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Evaluasi Kinerja Analisis dan Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi	3.004.428
			1686 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC	295.272.016
<b>015.06</b>	<b>DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN</b>			<b>78.443.531</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>78.443.531</b>
		<b>015.06.08 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan</b>		<b>78.443.531</b>
			1687 Perumusan Kebijakan Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Transfer ke Daerah	5.493.034
			1688 Perumusan Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	6.386.593
			1689 Perumusan Kebijakan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD	2.694.697
			1690 Perumusan Kebijakan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah	10.047.822
			1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan	53.821.385
<b>015.07</b>	<b>DITJEN PENGELOLAAN UTANG</b>			<b>57.681.933</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>57.681.933</b>
		<b>015.07.14 Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang</b>		<b>57.681.933</b>
			1692 Pelaksanaan Evaluasi Akuntansi dan Setelmen Utang	2.537.816
			1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah	3.249.656
			1694 Pengelolaan Pinjaman	3.149.628
			1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang	3.732.709
			1696 Pengelolaan Surat Utang Negara	4.186.673
			1697 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang	40.825.451
<b>015.08</b>	<b>DITJEN PERBENDAHARAAN</b>			<b>1.756.646.395</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>1.756.646.395</b>
		<b>015.08.09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara</b>		<b>1.756.646.395</b>
			1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	22.900.074
			1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	6.795.209
			1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	5.648.325
			1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	193.274.615
			1702 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	57.305.700
			1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan	14.778.988
			1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan	337.252.999
			1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara	582.588.384
			1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah	295.585.163
			1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan	240.516.938
<b>015.09</b>	<b>DITJEN KEKAYAAN NEGARA</b>			<b>550.515.392</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>550.515.392</b>
		<b>015.09.10 Program Pengelolaan Kekayaan Negara Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang</b>		<b>550.515.392</b>
			1708 Perumusan Kebijakan Standardisasi Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara	2.958.595
			1709 Perumusan Kebijakan Standardisasi Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan	3.065.684
			1710 Perumusan Peraturan Perundangan Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi	3.160.850
			1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	24.095.078
			1712 Perumusan Kebijakan Standardisasi Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang	2.515.154
			1713 Perumusan Kebijakan Standardisasi Bimbingan Teknis Analisis Supervisi Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian	2.822.930





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 015  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			1714 Perumusan Kebijakan Standardisasi Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain	3.037.162
			1715 Pengelolaan Kekayaan Negara Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN	119.378.736
			1716 Pengelolaan Kekayaan Negara Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL	291.322.898
			1717 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara	98.158.305
<b>015.11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN</b>				<b>502.190.777</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>413.805.777</b>
		<b>015.11.04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara</b>		<b>413.805.777</b>
			1731 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah	110.279.822
			1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	42.092.934
			1733 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	21.784.338
			1734 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	14.032.103
			1735 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran Perbendaharaan Perpajakan Kepabeanaan Cukai Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	15.344.022
			1736 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan	25.167.205
			1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan	154.790.273
			1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK	30.315.080
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>88.385.000</b>
		<b>015.11.04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara</b>		<b>88.385.000</b>
			1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	88.385.000
<b>015.12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL</b>				<b>100.133.936</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>100.133.936</b>
		<b>015.12.11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal</b>		<b>100.133.936</b>
			1740 Perumusan Kebijakan APBN	4.591.790
			1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi	6.555.840
			1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	9.198.193
			1743 Perumusan Kebijakan Pajak Kepabeanaan Cukai dan PNB	4.899.642
			1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan	4.146.897
			1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal	63.992.307
			5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral	6.749.267
<b>JUMLAH</b>				<b>18.204.775.833</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 018  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>018.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>1.103.062.672</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>1.103.062.672</b>
<b>018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian</b>				<b>1.103.062.672</b>
			1746 Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik Bidang Pertanian	12.501.616
			1747 Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral Regional dan Multilateral	31.816.805
			1748 Pengelolaan Keuangan Perlengkapan dan Kearsipan Kementerian Pertanian	794.342.119
			1749 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	18.274.869
			1750 Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian	36.551.455
			1751 Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian	47.590.976
			1752 Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian Kerumahtangaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian	141.161.381
			1753 Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	20.823.451
<b>018.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>65.528.157</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>39.144.857</b>
<b>018.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian</b>				<b>39.144.857</b>
			1760 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	39.144.857
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>26.383.300</b>
<b>018.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian</b>				<b>26.383.300</b>
			1755 Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Setjen Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	6.041.800
			1756 Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Serta Badan Ketahanan Pangan	5.044.700
			1757 Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Ditjen P2Hp dan Badan Litbang Pertanian	5.045.000
			1758 Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Badan Karantina Pertanian	5.050.000
			1759 Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian	5.201.800
<b>018.03 DITJEN TANAMAN PANGAN</b>				<b>2.273.831.705</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>145.664.615</b>
<b>018.03.06 Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada</b>				<b>145.664.615</b>
			1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	145.664.615
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>2.128.167.090</b>
<b>018.03.06 Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada</b>				<b>2.128.167.090</b>
			1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	610.049.900
			1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	1.117.091.104
			1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	105.612.429
			1764 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	117.864.716
			1765 Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	160.846.772
			1767 Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih	6.920.069
			1768 Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	9.782.100
<b>018.04 DITJEN HORTIKULTURA</b>				<b>524.669.821</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>162.658.280</b>
<b>018.04.07 Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan</b>				<b>162.658.280</b>
			1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	162.658.280
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>362.011.541</b>
<b>018.04.07 Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan</b>				<b>362.011.541</b>
			1769 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	94.388.134
			1770 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan	39.764.867
			1771 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan	90.673.532
			1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	66.846.030
			1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura	70.338.978
<b>018.05 DITJEN PERKEBUNAN</b>				<b>1.316.320.121</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>124.797.394</b>
<b>018.05.08 Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</b>				<b>124.797.394</b>
			1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	124.797.394
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>1.191.522.727</b>
<b>018.05.08 Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</b>				<b>1.191.522.727</b>
			1775 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar	325.709.236
			1776 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	511.368.081
			1777 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	173.726.643
			1778 Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan	37.122.683
			1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan	76.992.792
			1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	66.603.292
<b>018.06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>				<b>1.391.463.833</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>248.522.030</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 018  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
		<b>018.06.09 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman</b>		<b>248.522.030</b>
			1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	248.522.030
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>1.142.941.803</b>
		<b>018.06.09 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman</b>		<b>1.142.941.803</b>
			1782 Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	334.368.812
			1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	159.739.249
			1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	251.287.280
			1785 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal	279.428.961
			1786 Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan	118.117.501
<b>018.07</b>	<b>DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN</b>			<b>502.959.082</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>118.395.398</b>
		<b>018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian</b>		<b>118.395.398</b>
			1793 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	118.395.398
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>384.563.684</b>
		<b>018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian</b>		<b>384.563.684</b>
			1788 Pengembangan Mutu dan Standardisasi	37.457.504
			1789 Pengembangan Pemasaran Domestik	83.172.785
			1790 Pengembangan Pemasaran Internasional	20.773.043
			1791 Pengembangan Usaha dan Investasi	29.146.426
			1792 Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	214.013.926
<b>018.08</b>	<b>DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</b>			<b>2.715.885.667</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>448.982.129</b>
		<b>018.08.11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</b>		<b>448.982.129</b>
			1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	165.759.979
			3993 Fasilitas Pupuk dan Pestisida	283.222.150
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>2.266.903.538</b>
		<b>018.08.11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</b>		<b>2.266.903.538</b>
			1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	563.964.660
			1795 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1.159.418.714
			1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	298.796.580
			3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	244.723.584
<b>018.09</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN</b>			<b>1.558.098.627</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>411.200.237</b>
		<b>018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing</b>		<b>411.200.237</b>
			1809 Dukungan Manajemen Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	411.200.237
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>1.146.898.390</b>
		<b>018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing</b>		<b>1.146.898.390</b>
			1798 Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	35.174.522
			1799 Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian	28.906.568
			1800 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian	99.092.560
			1801 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	477.825.812
			1802 Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	21.394.173
			1803 Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	35.242.613
			1804 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura	91.463.658
			1805 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	110.979.742
			1806 Penelitian dan Pengembangan Peternakan	105.106.171
			1807 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	119.666.042
			1808 Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	22.046.529
<b>018.10</b>	<b>BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN</b>			<b>1.098.836.025</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>50.541.012</b>
		<b>018.10.13 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani</b>		<b>50.541.012</b>
			1813 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	50.541.012
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>992.685.013</b>
		<b>018.10.13 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani</b>		<b>992.685.013</b>
			1810 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	211.416.741
			1811 Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian	129.050.105
			1812 Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	652.218.167
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>55.610.000</b>
		<b>018.10.13 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani</b>		<b>55.610.000</b>
			3995 Pendidikan Menengah Pertanian	55.610.000
<b>018.11</b>	<b>BADAN KETAHANAN PANGAN</b>			<b>458.545.471</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>178.619.309</b>
		<b>018.11.14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>		<b>178.619.309</b>
			1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	178.619.309
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>279.926.162</b>
		<b>018.11.14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>		<b>279.926.162</b>
			1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	49.167.591
			1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	67.565.561





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014**

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 018  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			1816 Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	163.193.010
<b>018.12 BADAN KARANTINA PERTANIAN</b>				<b>603.844.735</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>	<b>018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati</b>		<b>66.494.915</b>
			1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian	66.494.915
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>	<b>018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati</b>		<b>537.349.820</b>
			1818 Peningkatan Kepatuhan Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan	8.046.142
			1819 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	5.199.630
			1820 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	7.141.483
			1822 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian	31.561.124
			1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	485.401.441
<b>JUMLAH</b>				<b>13.613.045.916</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 019  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
019.01	SEKRETARIAT JENDERAL			725.697.113
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			304.258.924
		019.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian		286.065.624
			1824 Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi	23.292.629
			1825 Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian Pelayanan Tata Usaha Pimpinan Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Urusan Dalam	35.887.400
			1826 Pengembangan SDM Industri	11.073.865
			1827 Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional	107.905.972
			1828 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	23.779.059
			1829 Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal	31.864.312
			1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri	21.474.834
			1831 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik	30.787.553
		019.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian		18.193.300
			1832 Pembangunan Pengadaan Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja	18.193.300
	10 FUNGSI PENDIDIKAN			421.438.189
		019.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian		421.438.189
			1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri	421.438.189
019.02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO			216.775.906
	04 FUNGSI EKONOMI			216.775.906
		019.02.07 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro		216.775.906
			1833 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	32.621.622
			1834 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau	33.832.550
			1835 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan	102.817.854
			1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	47.503.880
019.03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR			262.032.800
	04 FUNGSI EKONOMI			262.032.800
		019.03.06 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur		262.032.800
			1875 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka	128.737.774
			1876 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir	19.296.567
			1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar	37.879.486
			1878 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam	17.249.700
			1879 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	58.869.273
019.04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI			249.342.213
	04 FUNGSI EKONOMI			249.342.213
		019.04.08 Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi		249.342.213
			1846 Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat	100.158.160
			1847 Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan	12.934.400
			1848 Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika	20.020.500
			1849 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	55.248.086
			1850 Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	60.981.067
019.05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH			428.138.298
	04 FUNGSI EKONOMI			428.138.298
		019.05.09 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah		428.138.298
			1837 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	111.519.400
			1838 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II	151.603.950
			1839 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III	86.189.380
			1840 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	78.825.568
019.06	INSPEKTORAT JENDERAL			45.138.229
	04 FUNGSI EKONOMI			45.138.229
		019.06.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian		45.138.229
			1841 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	3.614.154
			1842 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.954.097
			1843 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	4.214.150
			1844 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	3.960.675
			1845 Dukungan Manajemen Pembinaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	29.395.153
019.07	BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI			572.719.025
	04 FUNGSI EKONOMI			572.719.025
		019.07.12 Program Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri		572.719.025
			1859 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	6.091.172
			1860 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri	70.658.702
			1861 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	11.178.872
			1862 Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha dan Mutu Industri	54.102.241
			1863 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	11.705.171
			1864 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan	23.383.822
			1865 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil	20.859.611
			1866 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit Karet dan Plastik	24.061.010



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 019  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			1867 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro	38.099.689
			1868 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas	19.719.281
			1869 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan	15.158.934
			1870 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin	23.016.758
			1871 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik	20.574.939
			1872 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik	40.083.106
			1873 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	26.323.674
			1874 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik	21.498.286
			3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri	146.203.757
<b>019.08</b>	<b>DIREKTORAT JENDERAL</b>	<b>PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI</b>		<b>85.684.946</b>
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>85.684.946</b>
		<b>019.08.10 Program Pengembangan Perwilayahan Industri</b>		<b>85.684.946</b>
			1851 Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I	20.667.852
			1852 Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II	16.792.040
			1853 Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III	19.810.680
			1854 Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri	28.414.374
<b>019.09</b>	<b>DIREKTORAT JENDERAL</b>	<b>KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL</b>		<b>43.758.892</b>
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>43.758.892</b>
		<b>019.09.11 Program Kerja Sama Industri Internasional</b>		<b>43.758.892</b>
			1855 Peningkatan Ketahanan Industri	4.989.697
			1856 Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral	6.707.646
			1857 Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional	8.194.189
			1858 Peningkatan Dukungan Fasilitas dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional	23.867.360
<b>JUMLAH</b>				<b>2.629.287.422</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 020  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>020.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>1.313.032.400</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>1.313.032.400</b>
		<b>020.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM</b>		<b>1.178.937.090</b>
			1880 Pembinaan Administrasi Hukum	60.824.103
			1881 Pengelolaan SDM Aparatur dan Pengembangan Organisasi KESDM	70.368.614
			1882 Pengelolaan Administrasi Keuangan Kementerian ESDM	297.257.651
			1883 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama KESDM	82.668.431
			1884 Pengelolaan Administrasi Perlengkapan Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM	537.062.458
			1885 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM	68.600.592
			4029 Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM	62.155.241
		<b>020.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM</b>		<b>134.095.310</b>
			1886 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kesdm	134.095.310
<b>020.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>90.318.603</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>62.166.164</b>
		<b>020.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM</b>		<b>62.166.164</b>
			1891 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian ESDM	62.166.164
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>28.152.439</b>
		<b>020.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM</b>		<b>28.152.439</b>
			1887 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Ditjen. Ketenagalistrikan Ditjen. Energi Baru Terbarukan dan Konsevasi Energi dan Satuan Kerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)	8.741.929
			1888 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Setjen Ditjen. Mineral Batubara Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan	6.226.991
			1889 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Itjen Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Setjen Dewan Energi Nasional (DEN)	6.839.119
			1890 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Ditjen. Minyak dan Gas Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral BPH Migas	6.344.400
<b>020.04 DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI</b>				<b>3.591.089.749</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>154.628.814</b>
		<b>020.04.06 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi</b>		<b>154.628.814</b>
			1896 Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas	154.628.814
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>3.436.460.935</b>
		<b>020.04.06 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi</b>		<b>3.436.460.935</b>
			1892 Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional	50.600.489
			1893 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	1.480.754.749
			1894 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	41.148.901
			1895 Pembinaan Lindungan Lingkungan Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas	1.863.956.796
<b>020.05 DITJEN KETENAGALISTRIKAN</b>				<b>4.565.031.319</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>85.676.008</b>
		<b>020.05.07 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>		<b>85.676.008</b>
			1901 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Listrik	85.676.008
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>4.479.355.311</b>
		<b>020.05.07 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>		<b>4.479.355.311</b>
			1898 Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	27.503.004
			1899 Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	4.418.521.329
			1900 Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	33.330.978
<b>020.06 DITJEN MINERAL DAN BATUBARA</b>				<b>372.517.294</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>176.254.146</b>
		<b>020.06.08 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara</b>		<b>176.254.146</b>
			1906 Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	176.254.146
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>196.263.148</b>
		<b>020.06.08 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara</b>		<b>196.263.148</b>
			1904 Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara	50.378.577
			1905 Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	54.194.911
			4030 Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	52.350.290
			4031 Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	39.339.370
<b>020.07 DEWAN ENERGI NASIONAL</b>				<b>76.682.668</b>
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>76.682.668</b>
		<b>020.07.11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional</b>		<b>76.682.668</b>
			1907 Fasilitasi dalam Rangka Perumusan Kebijakan Energi Nasional dan Penetapan Rencana Umum Energi Nasional serta Penyelenggaraan Persidangan	23.737.087
			1908 Fasilitasi dalam Rangka Penetapan Langkah-Langkah Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi serta Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor	10.609.906
			1909 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bidang Personil Pendanaan Peralatan dan Dokumen (P3D)	42.335.675





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 020  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>020.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>702.023.115</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>46.164.756</b>
		<b>020.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM</b>		<b>46.164.756</b>
			1914 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	46.164.756
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>655.858.359</b>
		<b>020.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM</b>		<b>655.858.359</b>
			1910 Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	115.279.976
			1911 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	111.388.344
			1912 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	100.000.000
			1913 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	329.190.039
<b>020.12 BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>657.292.282</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>77.413.790</b>
		<b>020.12.05 Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM</b>		<b>77.413.790</b>
			1915 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	77.413.790
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>432.692.522</b>
		<b>020.12.05 Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM</b>		<b>432.692.522</b>
			1917 Pendidikan dan Pelatihan Geologi	62.235.320
			1918 Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	68.776.230
			1919 Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi	160.546.387
			1920 Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah	53.302.002
			1921 Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral Batubara dan Panas Bumi	87.832.583
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>147.185.970</b>
		<b>020.12.05 Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM</b>		<b>147.185.970</b>
			1916 Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral	147.185.970
<b>020.13 BADAN GEOLOGI</b>				<b>1.315.002.754</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>90.486.002</b>
		<b>020.13.09 Program Penelitian Mitigasi dan Pelayanan Geologi</b>		<b>90.486.002</b>
			1928 Manajemen Dukungan Teknis dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi	90.486.002
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>1.224.516.752</b>
		<b>020.13.09 Program Penelitian Mitigasi dan Pelayanan Geologi</b>		<b>1.224.516.752</b>
			1922 Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	38.537.000
			1923 Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi	105.631.792
			1924 Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah	241.400.000
			1925 Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi	218.446.200
			1926 Survei dan Pelayanan Geologi	384.119.265
			1927 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	236.382.495
<b>020.14 BPH MIGAS</b>				<b>366.820.000</b>
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>366.820.000</b>
		<b>020.14.10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Bbm</b>		<b>366.820.000</b>
			1929 Pengaturan Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bbm	162.016.656
			1930 Pengaturan Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	46.000.000
			1931 Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas	158.803.344
<b>020.15 DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI</b>				<b>1.291.656.788</b>
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>1.291.656.788</b>
		<b>020.15.12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi</b>		<b>1.291.656.788</b>
			4032 Pembinaan Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi	143.268.650
			4033 Pembinaan Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	925.395.776
			4034 Perencanaan Energi Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih	80.248.032
			4035 Pembinaan Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi	44.500.000
			4036 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	98.244.330
<b>JUMLAH</b>				<b>14.341.466.972</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 022  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>022.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>556.380.105</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>556.380.105</b>
		<b>022.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan</b>		<b>556.380.105</b>
			1932 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum serta Kerja Sama Luar Negeri	33.108.472
			1933 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawajian	36.904.578
			1934 Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	22.503.236
			1935 Penyusunan Dokumen Rencana Program Evaluasi serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di Sektor Perhubungan	27.215.769
			1936 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan	252.078.093
			1937 Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi	39.522.435
			1938 Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran	25.217.696
			1939 Pengelolaan Data dan Informasi Perhubungan	48.427.559
			1940 Pemanfaatan Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa Transportasi	26.118.365
			1941 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang Perhubungan	45.283.902
<b>022.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>79.618.815</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>44.593.296</b>
		<b>022.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan</b>		<b>44.593.296</b>
			1948 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	44.593.296
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>35.025.519</b>
		<b>022.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan</b>		<b>35.025.519</b>
			1943 Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I	8.465.913
			1944 Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II	7.207.790
			1945 Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III	6.518.183
			1946 Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV	6.339.596
			1947 Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat V	6.494.037
<b>022.03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT</b>				<b>3.619.419.968</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>188.502.994</b>
		<b>022.03.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat</b>		<b>188.502.994</b>
			1953 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	188.502.994
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>3.430.916.974</b>
		<b>022.03.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat</b>		<b>3.430.916.974</b>
			1949 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	431.810.507
			1950 Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	40.017.784
			1951 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	874.776.616
			1952 Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP	2.084.312.067
<b>022.04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT</b>				<b>9.420.947.845</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>2.531.033.529</b>
		<b>022.04.08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut</b>		<b>2.531.033.529</b>
			1959 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut	2.531.033.529
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>6.889.914.316</b>
		<b>022.04.08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut</b>		<b>6.889.914.316</b>
			1954 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	1.058.562.651
			1955 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	327.789.435
			1956 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	867.495.745
			1957 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	4.636.066.485
<b>022.05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA</b>				<b>7.492.985.310</b>
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>7.492.985.310</b>
		<b>022.05.09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara</b>		<b>7.492.985.310</b>
			1960 Pelayanan Angkutan Udara Perintis	362.958.112
			1961 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	5.049.683.550
			1962 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan	294.912.127
			1963 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	356.240.679
			1964 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan	198.988.242
			1965 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara	1.230.202.600
<b>022.08 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN</b>				<b>11.847.171.670</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>147.184.592</b>
		<b>022.08.07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian</b>		<b>147.184.592</b>
			5031 Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	72.599.900
	<b>04 FUNGSI EKONOMI *</b>			<b>11.699.987.078</b>
		<b>022.08.07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian</b>		<b>11.699.987.078</b>
			1967 Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	97.843.700
			1968 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	11.511.887.018





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 022  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			1966 Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian	90.256.360
<b>022.11</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN</b>			<b>205.717.711</b>
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>205.717.711</b>
		<b>022.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan</b>		<b>205.717.711</b>
			1970 Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda	22.508.589
			1971 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	52.284.530
			1972 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut	31.415.758
			1973 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara	34.239.300
			1974 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Pergubungan	65.269.534
<b>022.12</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN</b>			<b>2.780.923.908</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>275.654.330</b>
		<b>022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan</b>		<b>275.654.330</b>
			1978 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	205.512.393
			1979 Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	70.141.937
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>667.759.378</b>
		<b>022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan</b>		<b>667.759.378</b>
			1975 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	151.908.455
			1976 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	330.902.132
			1977 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara	184.948.791
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>1.837.510.200</b>
		<b>022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan</b>		<b>1.837.510.200</b>
			3996 Pendidikan Perhubungan Darat	264.849.152
			3997 Pendidikan Perhubungan Laut	900.504.890
			3998 Pendidikan Perhubungan Udara	672.156.158
<b>JUMLAH</b>				<b>36.003.165.332</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 023  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>023.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>1.441.562.300</b>
10 FUNGSI PENDIDIKAN				<b>1.441.562.300</b>
023.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan				<b>1.441.562.300</b>
1980 Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Kementerian				69.187.545
1981 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi				25.739.457
1982 Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian yang Andal				56.082.409
1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas				253.700.904
1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri				347.736.093
1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian				143.080.362
1986 Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan				54.896.652
1987 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Informasi dan Kehumasan				56.174.261
1991 Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendayagunaan E-Pembelajaran dan E-Administrasi				245.131.826
4079 Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara				82.500.019
5173 Peningkatan Sensor Film				39.759.314
5174 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi				67.573.458
<b>023.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>205.000.000</b>
10 FUNGSI PENDIDIKAN				<b>205.000.000</b>
023.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				<b>205.000.000</b>
1993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I				22.770.752
1994 Penguatan Pengawasan Inspektorat II				22.128.243
1995 Penguatan Pengawasan Inspektorat III				31.706.234
1996 Penguatan Audit Investigasi				13.953.654
1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen				90.975.486
4072 Penguatan Pengawasan Inspektorat IV				23.465.631
<b>023.03 DITJEN PENDIDIKAN DASAR</b>				<b>16.613.504.100</b>
10 FUNGSI PENDIDIKAN				<b>16.613.504.100</b>
023.03.06 Program Pendidikan Dasar				<b>16.613.504.100</b>
1999 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB				716.574.000
2000 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP				4.642.192.230
2003 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD				5.575.895.000
2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar				312.017.870
3999 Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar				5.366.825.000
<b>023.04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI</b>				<b>35.418.817.072</b>
10 FUNGSI PENDIDIKAN				<b>35.418.817.072</b>
023.04.08 Program Pendidikan Tinggi				<b>35.418.817.072</b>
2011 Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama				608.907.681
2012 Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu				2.715.900.368
2013 Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat				1.213.224.142
2014 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi				11.840.820.046
4073 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa				7.981.118.545
4075 Peningkatan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Mutu Pendidikan Kesehatan				513.714.330
4076 Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik				263.240.130
4077 Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi				106.046.806
4078 Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi				10.175.845.024
<b>023.05 DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL</b>				<b>2.338.034.530</b>
10 FUNGSI PENDIDIKAN				<b>2.338.034.530</b>
023.05.09 Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal				<b>2.338.034.530</b>
2015 Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan				197.983.082
2016 Penyediaan Layanan Paud				608.128.700
2017 Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				994.143.837
2018 Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat				275.628.369
2019 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal				94.408.920
4074 Layanan Pengkajian Pengembangan dan Pengendalian Mutu Paud-NI				167.741.622
<b>023.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>1.186.700.000</b>
10 FUNGSI PENDIDIKAN				<b>1.186.700.000</b>
023.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				<b>1.186.700.000</b>
2027 Penyempurnaan Kurikulum Sistem Pembelajaran dan Perbukuan				112.731.858
2028 Penyediaan Informasi Untuk Perumusan Kebijakan Nasional				45.219.955
2029 Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan				59.211.466
2031 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi				882.495.866
2032 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas				63.272.564
5176 Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan				23.768.291
<b>023.12 DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH</b>				<b>14.881.960.000</b>
10 FUNGSI PENDIDIKAN				<b>14.881.960.000</b>
023.12.07 Program Pendidikan Menengah				<b>14.881.960.000</b>
2006 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA				5.801.167.630



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 023  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			2007 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	6.288.300.773
			2008 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB	378.192.273
			2009 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah	198.904.987
			4000 Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Menengah	2.215.394.337
<b>023.13</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA</b>			<b>359.531.800</b>
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>359.531.800</b>
		<b>023.13.10 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra</b>		<b>359.531.800</b>
			2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	285.294.350
			2021 Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	33.878.073
			2022 Pembinaan Bahasa dan Sastra	40.359.377
<b>023.14</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN &amp; KEBUDAYAAN &amp; PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN</b>			<b>2.930.045.100</b>
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>2.930.045.100</b>
		<b>023.14.11 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu</b>		<b>2.930.045.100</b>
			4001 Peningkatan Layanan Tenaga Kependidikan	86.037.522
			4002 Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan	15.799.261
			4003 Peningkatan Layanan Pendidik Untuk Jenjang Paud Dikdas Dikmen dan Dikti	41.028.854
			4004 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	780.148.535
			4005 Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan	1.945.951.420
			4006 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPSDMP dan PMP	41.282.935
			5177 Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	19.796.573
<b>023.15</b>	<b>DITJEN KEBUDAYAAN</b>			<b>1.182.750.000</b>
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>1.182.750.000</b>
		<b>023.15.12 Program Pelestarian Budaya</b>		<b>1.182.750.000</b>
			5172 Pengembangan Galeri Nasional	41.556.143
			5178 Pengelolaan Permuseuman	140.509.728
			5179 Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	88.605.638
			5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	64.200.000
			5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	326.758.491
			5182 Pelestarian Cagar budaya dan Permuseuman	194.100.000
			5183 Pembinaan Kesenian dan Perfilman	141.950.000
			5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	60.000.000
			5185 Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya	61.720.000
			5186 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	63.350.000
<b>JUMLAH</b>				<b>76.557.904.902</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 024  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>024.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>26.767.777.948</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>26.767.777.948</b>
<b>024.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan</b>				<b>26.767.777.948</b>
2033 Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi				18.500.000
2034 Pembinaan Administrasi Kepegawaian				72.962.224
2035 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara				35.000.252
2036 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan				117.632.872
2037 Pengelolaan Urusan Tata Usaha Keprotokolalan Rumah Tangga Keuangan dan Gaji				2.491.517.116
2038 Pengelolaan Data dan Informasi				72.486.800
2040 Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri				18.163.601
2041 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji				197.446.900
2042 Pengelolaan Komunikasi Publik				35.934.900
2043 Pembinaan Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan				23.401.293.330
2044 Penanggulangan Krisis Kesehatan				64.484.700
2048 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan				193.131.785
2049 Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia				28.536.603
2050 Peningkatan Intelegensia Kesehatan				20.686.865
<b>024.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>92.926.900</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>43.751.232</b>
<b>024.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan</b>				<b>43.751.232</b>
2057 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan				43.751.232
<b>07 KESEHATAN</b>				<b>49.175.668</b>
<b>024.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan</b>				<b>49.175.668</b>
2052 Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen				12.617.955
2053 Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen				8.740.294
2054 Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PP dan PL dan Balitbangkes				10.486.252
2055 Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Badan PPSDMK				10.271.789
2056 Pengusutan dan Investigasi kasus-kasus yang beridikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan				7.059.378
<b>024.03 DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK</b>				<b>1.926.320.673</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>157.559.018</b>
<b>024.03.06 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak</b>				<b>157.559.018</b>
2085 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak				157.559.018
<b>07 KESEHATAN</b>				<b>1.768.761.655</b>
<b>024.03.06 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak</b>				<b>1.768.761.655</b>
2080 Pembinaan Gizi Masyarakat				273.908.600
2081 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak				85.876.001
2082 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi				94.000.000
2089 Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga				49.583.936
2092 Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dan Alternatif				37.895.677
2093 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)				1.227.497.441
<b>024.04 DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN</b>				<b>12.252.787.900</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>8.978.871.205</b>
<b>024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan</b>				<b>8.978.871.205</b>
2051 Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan				24.843.670
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan				8.954.027.535
<b>07 KESEHATAN</b>				<b>3.273.916.695</b>
<b>024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan</b>				<b>3.273.916.695</b>
2083 Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketechnisian Medis				23.096.138
2087 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar				615.509.081
2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan				2.615.854.706
2095 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa				19.456.770
<b>024.05 DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</b>				<b>1.812.234.812</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>649.733.523</b>
<b>024.05.08 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</b>				<b>649.733.523</b>
2063 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan				649.733.523
<b>07 KESEHATAN</b>				<b>1.162.501.289</b>
<b>024.05.08 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</b>				<b>1.162.501.289</b>
2058 Pembinaan Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Mata				310.536.894
2059 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang				113.372.550
2060 Pengendalian Penyakit Menular Langsung				311.227.070
2061 Pengendalian Penyakit Tidak Menular				104.623.681
2062 Penyehatan Lingkungan				322.741.094
<b>024.07 DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN</b>				<b>1.764.681.263</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>80.730.259</b>
<b>024.07.09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan</b>				<b>80.730.259</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 024  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			2068 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	80.730.259
	<b>07 KESEHATAN</b>			<b>1.683.951.004</b>
		<b>024.07.09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan</b>		<b>1.683.951.004</b>
			2064 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	22.329.057
			2065 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	1.564.212.272
			2066 Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	26.503.149
			2067 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	70.906.526
<b>024.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN</b>				<b>509.592.602</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>73.801.707</b>
		<b>024.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</b>		<b>73.801.707</b>
			2039 Desentralisasi dan Daerah Bermasalah Kesehatan	2.000.000
			2074 Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	71.801.707
	<b>07 KESEHATAN</b>			<b>435.790.895</b>
		<b>024.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</b>		<b>435.790.895</b>
			2069 Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	125.910.013
			2070 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat	84.882.653
			2071 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik	74.525.881
			2072 Penelitian dan Pengembangan Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	58.391.066
			2073 Riset Operasional Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran	17.469.500
			4010 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional	43.202.082
			4011 Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit	31.409.700
<b>024.12 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN</b>				<b>2.350.151.585</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>822.868.539</b>
		<b>024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)</b>		<b>822.868.539</b>
			2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	822.868.539
	<b>07 KESEHATAN</b>			<b>206.392.246</b>
		<b>024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)</b>		<b>206.392.246</b>
			2075 Standardisasi Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan	27.047.048
			2076 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	67.262.568
			2077 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	16.368.630
			2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	95.714.000
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>1.320.890.800</b>
		<b>024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)</b>		<b>1.320.890.800</b>
			4049 Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	495.108.093
			5033 Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi	23.807.000
			5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	660.975.707
			5234 Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	141.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>47.476.473.683</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014**

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 025  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>025.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>2.876.118.610</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>2.777.903.641</b>
		<b>025.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama</b>		<b>2.672.997.579</b>
			2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	43.926.144
			2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	86.613.311
			2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	1.890.085.431
			2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	42.156.161
			2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan	104.968.338
			2103 Pembinaan Administrasi Umum	446.865.422
			2106 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	58.382.772
		<b>025.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama</b>		<b>104.906.062</b>
			2114 Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	104.906.062
	<b>09 FUNGSI AGAMA</b>			<b>91.714.969</b>
		<b>025.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama</b>		<b>91.714.969</b>
			2096 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	78.267.976
			2107 Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama	13.446.993
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>6.500.000</b>
		<b>025.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama</b>		<b>6.500.000</b>
			2097 Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	6.500.000
<b>025.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>129.915.085</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>129.915.085</b>
		<b>025.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama</b>		<b>129.915.085</b>
			2115 Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I	15.485.058
			2116 Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II	16.608.659
			2117 Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III	15.310.859
			2118 Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV	19.131.750
			2119 Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi	4.409.495
			2120 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Agama	58.969.264
<b>025.03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM</b>				<b>2.585.739.278</b>
	<b>09 FUNGSI AGAMA</b>			<b>2.585.739.278</b>
		<b>025.03.08 Program Bimbingan Masyarakat Islam</b>		<b>2.585.739.278</b>
			2121 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf	38.607.175
			2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat	38.830.316
			2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	364.007.034
			2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	475.288.728
			2125 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1.669.006.025
<b>025.04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM</b>				<b>42.551.801.568</b>
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>42.551.801.568</b>
		<b>025.04.07 Program Pendidikan Islam</b>		<b>42.551.801.568</b>
			2127 Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam	290.809.005
			2128 Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam	462.792.170
			2129 Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	13.917.922.407
			2132 Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	3.219.000.432
			2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	24.661.277.554
<b>025.05 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN</b>				<b>1.030.903.265</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>52.398.219</b>
		<b>025.05.09 Program Bimbingan Masyarakat Kristen</b>		<b>52.398.219</b>
			2138 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	52.398.219
	<b>09 FUNGSI AGAMA</b>			<b>133.548.704</b>
		<b>025.05.09 Program Bimbingan Masyarakat Kristen</b>		<b>133.548.704</b>
			2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	133.548.704
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>844.956.342</b>
		<b>025.05.09 Program Bimbingan Masyarakat Kristen</b>		<b>844.956.342</b>
			2136 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	41.576.157
			5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	725.011.775
			5101 Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	78.368.410
<b>025.06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK</b>				<b>615.653.658</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>79.811.674</b>
		<b>025.06.10 Program Bimbingan Masyarakat Katolik</b>		<b>79.811.674</b>
			2141 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	79.811.674
	<b>09 FUNGSI AGAMA</b>			<b>69.427.244</b>
		<b>025.06.10 Program Bimbingan Masyarakat Katolik</b>		<b>69.427.244</b>
			2140 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	69.427.244
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>466.414.740</b>
		<b>025.06.10 Program Bimbingan Masyarakat Katolik</b>		<b>466.414.740</b>
			2139 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	85.741.772
			5102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	380.672.968
<b>025.07 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU</b>				<b>572.863.673</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>6.281.960</b>
		<b>025.07.11 Program Bimbingan Masyarakat Hindu</b>		<b>6.281.960</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 025  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			2144 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	6.281.960
	<b>09 FUNGSI AGAMA</b>			<b>75.083.471</b>
		<b>025.07.11 Program Bimbingan Masyarakat Hindu</b>		<b>75.083.471</b>
			2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	75.083.471
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>491.498.242</b>
		<b>025.07.11 Program Bimbingan Masyarakat Hindu</b>		<b>491.498.242</b>
			2142 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	35.912.424
			5103 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	356.212.198
			5104 Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	99.373.620
<b>025.08</b>	<b>DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA</b>			<b>270.826.478</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>20.051.989</b>
		<b>025.08.12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha</b>		<b>20.051.989</b>
			2146 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	20.051.989
	<b>09 FUNGSI AGAMA</b>			<b>34.169.654</b>
		<b>025.08.12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha</b>		<b>34.169.654</b>
			2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	34.169.654
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>216.604.835</b>
		<b>025.08.12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha</b>		<b>216.604.835</b>
			4012 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	126.695.490
			5105 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	59.375.399
			5106 Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha	30.533.946
<b>025.09</b>	<b>DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH</b>			<b>654.550.641</b>
	<b>09 FUNGSI AGAMA</b>			<b>654.550.641</b>
		<b>025.09.06 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah</b>		<b>654.550.641</b>
			2147 Pelayanan Haji	239.398.072
			2148 Pembinaan Haji dan Umrah	202.879.605
			2149 Pengelolaan Dana Haji	8.318.306
			2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	200.037.858
			5107 Pelayanan Atase Haji di Jeddah	1.200.000
			5108 Pelayanan Misi Haji Indonesia di Arab Saudi	2.716.800
<b>025.11</b>	<b>BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN</b>			<b>280.080.256</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>167.186.369</b>
		<b>025.11.04 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama</b>		<b>167.186.369</b>
			2151 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	16.760.400
			2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	150.425.969
	<b>09 FUNGSI AGAMA</b>			<b>35.458.887</b>
		<b>025.11.04 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama</b>		<b>35.458.887</b>
			2109 Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	5.311.593
			2152 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	6.405.674
			2153 Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan	12.551.964
			2154 Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan	11.189.656
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>77.435.000</b>
		<b>025.11.04 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama</b>		<b>77.435.000</b>
			2155 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	28.085.000
			5109 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	49.350.000
<b>JUMLAH</b>				<b>51.568.452.512</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 026  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>026.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>326.150.099</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>326.150.099</b>
<b>026.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan</b>				<b>326.150.099</b>
			2157 Pembentukan Pembaruan dan Penyelesaian Masalah Hukum	14.280.112
			2158 Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	70.408.798
			2159 Peningkatan Pengelolaan Organisasi Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	15.484.200
			2160 Peningkatan Perencanaan Program dan Anggaran	15.811.226
			2161 Peningkatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Pelayanan Umum	91.321.769
			2162 Peningkatan dan Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri	6.853.720
			2163 Peningkatan dan Pengelolaan Hubungan Masyarakat	22.474.167
			2164 Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	59.616.662
			2165 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	22.802.537
			2166 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	7.096.908
<b>026.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>42.922.400</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>42.922.400</b>
<b>026.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan</b>				<b>42.922.400</b>
			2167 Pengawasan Inspektorat I	4.203.660
			2168 Pengawasan Inspektorat II	4.203.660
			2169 Pengawasan Inspektorat III	4.203.660
			2170 Pengawasan Inspektorat IV	4.283.715
			2171 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	26.027.705
<b>026.04 DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>				<b>589.884.351</b>
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>589.884.351</b>
<b>026.04.07 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>				<b>589.884.351</b>
			2172 Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja	19.295.207
			2173 Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri	31.342.222
			2174 Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tki Luar Negeri	77.766.767
			2175 Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	328.172.834
			2176 Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja	43.741.302
			2177 Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	10.638.231
			2178 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	78.927.788
<b>026.05 DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL &amp; JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA</b>				<b>287.389.651</b>
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>287.389.651</b>
<b>026.05.08 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>				<b>287.389.651</b>
			2179 Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	67.026.216
			2180 Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	54.637.892
			2181 Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial	33.864.998
			2182 Pengelolaan Persyaratan Kerja Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	35.541.222
			2183 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	91.765.872
			2184 Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan	4.553.451
<b>026.06 DITJEN PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>				<b>720.623.240</b>
<b>06 FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>				<b>720.623.240</b>
<b>026.06.10 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>				<b>720.623.240</b>
			2185 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	43.204.824
			2186 Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	518.159.636
			2187 Penyediaan Tanah Transmigrasi	29.804.551
			2188 Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi	20.201.707
			2189 Partisipasi Masyarakat	20.619.726
			2190 Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P2KTrans	88.632.796
<b>026.07 DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>				<b>791.578.589</b>
<b>06 FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>				<b>791.578.589</b>
<b>026.07.11 Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</b>				<b>791.578.589</b>
			2191 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	274.329.212
			2192 Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi	195.306.607
			2193 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	183.699.983
			2194 Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi	17.877.605
			2195 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	17.171.086
			2196 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT	103.194.096
<b>026.08 DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>				<b>359.464.058</b>
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>359.464.058</b>
<b>026.08.09 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan</b>				<b>359.464.058</b>
			2197 Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	15.736.472
			2198 Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	102.000.000
			2199 Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	104.962.145
			2200 Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	19.349.870
			2201 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	117.415.571
<b>026.11 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI</b>				<b>76.613.847</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>76.613.847</b>
<b>026.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>				<b>76.613.847</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 026  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			2202 Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	5.313.300
			2203 Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan	5.667.324
			2204 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi	44.107.380
			2205 Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian	8.930.308
			2206 Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian	12.595.529
<b>026.13</b>		<b>DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS</b>		<b>767.302.376</b>
	<b>04</b>	<b>FUNGSI EKONOMI</b>		<b>338.802.376</b>
		<b>026.13.06 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas</b>		<b>338.802.376</b>
			2207 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi	21.328.004
			2208 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri	36.225.084
			2209 Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja Orientasi Pasar Kerja Luar Negeri	23.652.776
			2210 Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pelatihan Bagi Calon Transmigran	7.860.082
			2211 Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja Orientasi Pasar Kerja dalam Negeri	19.632.512
			2212 Pengembangan Program dan Peningkatan Kapasitas SDM Pelatihan Ketransmigrasian	10.041.622
			2213 Pelaksanaan dan Peningkatan Produktivitas	7.852.066
			2214 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Industri	84.492.242
			2215 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelatihan Bagi Calon Transmigran dan Transmigrasi	17.952.494
			2216 Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian	4.029.520
			2217 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas	44.570.736
			2218 Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri	1.840.260
			2219 Pelatihan Kewirausahaan	1.061.189
			2220 Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	6.440.799
			2221 Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan	11.513.829
			2223 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Binalattas	40.309.161
				<b>428.500.000</b>
	<b>10</b>	<b>FUNGSI PENDIDIKAN</b>		<b>428.500.000</b>
		<b>026.13.06 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas</b>		<b>428.500.000</b>
			4053 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalattas	3.670.423
			4054 Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja Orientasi Pasar Kerja Binalattas	432.680
			4055 Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian Binalattas	19.940.297
			4056 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas	142.899.971
			4057 Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas	26.359.343
			4058 Pelatihan Kewirausahaan Binalattas	2.240.872
			4059 Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas	25.264.627
			4060 Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Binalattas	207.691.787
<b>JUMLAH</b>				<b>3.961.928.611</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 027  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>027.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>166.715.701</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>166.715.701</b>
<b>027.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial</b>				<b>166.715.701</b>
2224 Hubungan Masyarakat				13.666.995
2225 Tata Kelola Keuangan				41.541.461
2226 Tata Kelola Organisasi dan Kepegawaian				11.328.304
2227 Perencanaan dan Penganggaran				24.562.680
2228 Peningkatan Sarana dan Prasarana				56.578.227
2229 Penyuluhan Sosial				12.973.576
2230 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum				6.064.458
<b>027.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>23.891.755</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>23.891.755</b>
<b>027.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial</b>				<b>23.891.755</b>
2231 Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan				2.603.042
2232 Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial				2.783.839
2233 Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial				2.625.643
2234 Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Penunjang				2.406.421
2235 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Sosial				13.472.810
<b>027.03 DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>				<b>727.856.388</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>30.139.900</b>
<b>027.03.08 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan</b>				<b>30.139.900</b>
2241 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan				30.139.900
<b>11 FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL</b>				<b>697.716.488</b>
<b>027.03.08 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan</b>				<b>697.716.488</b>
2236 Pelestarian Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial				64.410.649
2237 Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan				279.306.550
2239 Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat				82.564.930
2240 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)				117.948.371
4013 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan				153.485.988
<b>027.04 DITJEN REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>761.898.486</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>44.749.326</b>
<b>027.04.06 Program Rehabilitasi Sosial</b>				<b>44.749.326</b>
2247 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial				44.749.326
<b>11 FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL</b>				<b>717.149.160</b>
<b>027.04.06 Program Rehabilitasi Sosial</b>				<b>717.149.160</b>
2242 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza				25.231.440
2243 Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan				265.393.828
2244 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial				29.772.100
2245 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak				276.377.136
2246 Pelayanan Sosial Lanjut Usia				120.374.650
<b>027.05 DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>4.776.726.361</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>36.398.200</b>
<b>027.05.07 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>				<b>36.398.200</b>
2253 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial				36.398.200
<b>11 FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL</b>				<b>4.740.328.161</b>
<b>027.05.07 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>				<b>4.740.328.161</b>
2248 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam				158.797.288
2249 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial				65.996.595
2250 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran				32.828.900
2251 Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)				4.449.944.358
2252 Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial				13.885.820
4014 Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)				18.875.200
<b>027.11 BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>				<b>227.183.972</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>137.485.320</b>
<b>027.11.04 Program Pendidikan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial</b>				<b>137.485.320</b>
2254 Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)				100.728.807
2257 Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat				27.865.198
2261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Badiklit Kesos				8.891.315
<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>				<b>41.805.737</b>
<b>027.11.04 Program Pendidikan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial</b>				<b>41.805.737</b>
2260 Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial				41.805.737
<b>11 FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL</b>				<b>47.892.915</b>
<b>027.11.04 Program Pendidikan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial</b>				<b>47.892.915</b>
2255 Penelitian Terapan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial				15.244.526
2256 Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial				11.741.179
2258 Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial				12.569.096
2259 Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial				8.338.114
<b>JUMLAH</b>				<b>6.684.272.663</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 029  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>029.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>294.897.336</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>245.273.336</b>
<b>029.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan</b>				<b>245.273.336</b>
2262 Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan				4.500.000
2263 Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian Kehutanan				6.500.000
2264 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan				20.093.636
2265 Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan				60.800.000
2266 Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan				139.961.700
2269 Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan				7.158.000
2270 Pembinaan dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri				6.260.000
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>49.624.000</b>
<b>029.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan</b>				<b>49.624.000</b>
2271 Pengelolaan Keuangan Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan				22.200.000
2272 Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I				4.332.000
2273 Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II				4.342.000
2274 Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III				3.445.000
2275 Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV				5.729.000
2276 Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim Kehutanan				6.801.000
5230 Penataan Sarana dan Peralatan Kehutanan				2.775.000
<b>029.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>44.911.300</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>44.911.300</b>
<b>029.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan</b>				<b>44.911.300</b>
2277 Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I				3.000.000
2278 Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II				2.800.000
2279 Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III				3.500.000
2280 Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV				3.100.000
2281 Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN				2.700.000
2282 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan				29.811.300
<b>029.03 DITJEN BINA USAHA KEHUTANAN</b>				<b>186.537.415</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>30.786.749</b>
<b>029.03.06 Program Peningkatan Usaha Kehutanan</b>				<b>30.786.749</b>
2290 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Usaha Kehutanan				30.786.749
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>155.750.666</b>
<b>029.03.06 Program Peningkatan Usaha Kehutanan</b>				<b>155.750.666</b>
2283 Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL				101.776.732
2284 Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan				13.902.507
2285 Peningkatan Usaha Hutan Alam				8.891.909
2286 Peningkatan Usaha Hutan Tanaman				8.887.346
2287 Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan				10.534.284
2288 Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan				11.757.888
<b>029.04 DITJEN BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL</b>				<b>1.797.997.462</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>115.121.062</b>
<b>029.04.07 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat</b>				<b>115.121.062</b>
2299 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial				115.121.062
<b>05 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>1.682.876.400</b>
<b>029.04.07 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat</b>				<b>1.682.876.400</b>
2291 Pengembangan Perhutanan Sosial				15.313.563
2292 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas				31.061.852
2293 Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Das				9.447.570
2294 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan				11.500.664
2295 Perencanaan Penyelenggaraan Rhl Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai				1.528.301.279
2296 Perencanaan Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Hutan Mangrove				15.357.533
2297 Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan				60.336.285
2298 Pengembangan Persuteraan Alam				11.557.654
<b>029.05 DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM</b>				<b>1.220.034.125</b>
<b>05 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>1.220.034.125</b>
<b>029.05.08 Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan</b>				<b>1.220.034.125</b>
2300 Pengembangan Kawasan Konservasi Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung				23.960.653
2301 Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik				12.389.690
2302 Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan				16.870.464
2303 Pengendalian Kebakaran Hutan				35.625.442
2304 Penyidikan dan Pengamanan Hutan				38.320.935
2305 Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam				481.311.658
2306 Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional				556.769.711





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 029  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			2308 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	54.785.572
<b>029.06</b>	<b>DITJEN</b>	<b>PLANOLOGI KEHUTANAN</b>		<b>526.997.851</b>
	<b>01</b>	<b>FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>		<b>46.638.662</b>
		<b>029.06.09 Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan</b>		<b>46.638.662</b>
			2316 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	46.638.662
	<b>04</b>	<b>FUNGSI EKONOMI</b>		<b>464.430.649</b>
		<b>029.06.09 Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan</b>		<b>464.430.649</b>
			2310 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	5.231.681
			2311 Pengukuhan Kawasan Hutan	11.843.031
			2313 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	7.894.256
			2314 Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	439.461.681
	<b>05</b>	<b>FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>15.928.540</b>
		<b>029.06.09 Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan</b>		<b>15.928.540</b>
			2309 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	6.744.454
			2312 Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan	9.184.086
<b>029.07</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN</b>			<b>210.888.173</b>
	<b>01</b>	<b>FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>		<b>210.888.173</b>
		<b>029.07.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan</b>		<b>210.888.173</b>
			2317 Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Hutan dan Pengelolaan Hasil Hutan	23.787.768
			2318 Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi	76.040.825
			2319 Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan	78.698.124
			2320 Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan	16.795.783
			2321 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Badan Litbang Kehutanan	15.565.673
<b>029.08</b>	<b>BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN</b>			<b>225.037.846</b>
	<b>01</b>	<b>FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>		<b>14.670.674</b>
		<b>029.08.10 Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan</b>		<b>14.670.674</b>
			4015 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	14.670.674
	<b>05</b>	<b>FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>59.787.237</b>
		<b>029.08.10 Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan</b>		<b>59.787.237</b>
			2267 Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	49.777.957
			5231 Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan	10.009.280
	<b>10</b>	<b>FUNGSI PENDIDIKAN</b>		<b>150.579.935</b>
		<b>029.08.10 Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan</b>		<b>150.579.935</b>
			2268 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya	150.579.935
<b>JUMLAH</b>				<b>4.507.301.508</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 032  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>032.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>346.731.141</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>346.731.141</b>
<b>032.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP</b>				<b>346.731.141</b>
			2322 Pembinaan dan Koordinasi Penyediaan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP	10.000.000
			2323 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP	11.000.000
			2324 Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP	11.500.000
			2325 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Penganggaran dan Money Pembangunan KKP	34.500.000
			2326 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP	225.498.632
			2327 Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan	15.000.000
			2328 Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga Bidang Kelautan Perikanan	15.105.383
			2329 Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan Perikanan	24.127.126
<b>032.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>50.532.570</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>50.532.570</b>
<b>032.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP</b>				<b>50.532.570</b>
			2331 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) BPSDMKP dan BKIPM dan Pelaksana Pembangunan KP	4.730.000
			2332 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP serta Pelaksana Pembangunan KP	5.300.000
			2333 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K serta Pelaksana Pembangunan KP	5.220.000
			2334 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen P2HP dan Badan Litbang KP serta Pelaksana Pembangunan KP	4.206.000
			2335 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Itjen	4.000.000
			2336 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan	27.076.570
<b>032.03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP</b>				<b>1.594.231.229</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>180.130.320</b>
<b>032.03.06 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>				<b>180.130.320</b>
			2342 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	180.130.320
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>1.414.100.909</b>
<b>032.03.06 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>				<b>1.414.100.909</b>
			2337 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan Alat Penangkap Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	189.410.884
			2338 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	989.438.618
			2339 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien Tertib dan Berkelanjutan	22.648.260
			2340 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	152.395.004
			2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	60.208.143
<b>032.04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>875.292.741</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>212.595.861</b>
<b>032.04.07 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>				<b>212.595.861</b>
			2348 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	212.595.861
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>662.696.880</b>
<b>032.04.07 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>				<b>662.696.880</b>
			2343 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	67.007.423
			2344 Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	65.523.288
			2345 Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	240.669.144
			2346 Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	96.391.249
			2347 Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	181.604.544
			2349 Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya	11.501.232
<b>032.05 DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>576.269.549</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>109.358.140</b>
<b>032.05.10 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>				<b>109.358.140</b>
			2355 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	109.358.140
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>466.911.409</b>
<b>032.05.10 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>				<b>466.911.409</b>
			2350 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	135.786.185
			2351 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	15.156.237
			2352 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	12.449.655
			2353 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	24.071.318
			2354 Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	279.448.014
<b>032.06 DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)</b>				<b>487.983.903</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>126.699.868</b>
<b>032.06.08 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>				<b>126.699.868</b>
			2361 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	126.699.868
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>361.284.035</b>
<b>032.06.08 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>				<b>361.284.035</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 032  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			2356 Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan	81.856.927
			2357 Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	18.263.027
			2358 Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	155.410.014
			2359 Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	34.112.712
			2360 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	71.641.355
<b>032.07</b>	<b>DITJEN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)</b>			<b>613.114.106</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>113.839.497</b>
		<b>032.07.09 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>		<b>113.839.497</b>
			2367 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	113.839.497
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>235.864.054</b>
		<b>032.07.09 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>		<b>235.864.054</b>
			2363 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	182.480.950
			2365 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	53.383.104
	<b>05 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>263.410.555</b>
		<b>032.07.09 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>		<b>263.410.555</b>
			2362 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	82.286.355
			2364 Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	142.630.200
			2366 Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	38.494.000
<b>032.11</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>467.891.773</b>
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>467.891.773</b>
		<b>032.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan</b>		<b>467.891.773</b>
			2368 Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	30.841.835
			2369 Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	18.215.305
			2370 Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan Budidaya	126.212.193
			2371 Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	99.728.373
			2372 Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan	121.658.546
			2373 Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir	26.549.339
			2374 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	44.686.182
<b>032.12</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>476.864.189</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>45.527.807</b>
		<b>032.12.05 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>		<b>45.527.807</b>
			2378 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPSDM KP	45.527.807
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>178.398.382</b>
		<b>032.12.05 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>		<b>178.398.382</b>
			2375 Pelatihan Kelautan dan Perikanan	104.308.882
			2377 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	74.089.500
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>252.938.000</b>
		<b>032.12.05 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan</b>		<b>252.938.000</b>
			2376 Pendidikan Kelautan dan Perikanan	252.938.000
<b>032.13</b>	<b>BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b>			<b>259.762.597</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>223.312.187</b>
		<b>032.13.11 Program Pengembangan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>		<b>223.312.187</b>
			3987 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	223.312.187
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>36.450.410</b>
		<b>032.13.11 Program Pengembangan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>		<b>36.450.410</b>
			3988 Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan	10.670.800
			3989 Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	16.484.110
			3990 Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	9.295.500
<b>JUMLAH</b>				<b>5.748.673.798</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 033  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>033.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>814.215.696</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>814.215.696</b>
<b>033.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum</b>				<b>447.485.594</b>
2379 Penyusunan Perencanaan Pemrograman Penganggaran Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan PHLN				47.681.921
2380 Pengembangan Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya				41.429.873
2382 Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana				34.700.000
2383 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian				26.801.200
2384 Pembinaan Perencanaan Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum				26.379.600
2385 Penyusunan Pengkajian serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dan Permukiman				37.200.200
2387 Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU				32.300.000
2388 Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman				200.992.800
<b>033.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum</b>				<b>366.730.102</b>
2381 Pembangunan Infrastruktur				177.950.802
2386 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik				55.930.000
2389 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU				76.149.300
2390 Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman				56.700.000
<b>033.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>85.604.248</b>
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>85.604.248</b>
<b>033.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum</b>				<b>85.604.248</b>
2391 Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Pemantauan dan Pemeriksaan				53.799.177
2392 Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah I				8.636.010
2393 Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah II				5.442.099
2394 Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah III				8.041.565
2395 Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah IV				7.183.097
2396 Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Inspektorat Khusus				2.502.300
<b>033.03 DITJEN PENATAAN RUANG</b>				<b>975.069.011</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>127.257.390</b>
<b>033.03.09 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>				<b>127.257.390</b>
2397 Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang				127.257.390
<b>05 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>847.811.621</b>
<b>033.03.09 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>				<b>847.811.621</b>
2398 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah II				192.762.648
2399 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I				137.460.387
2400 Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional				146.407.991
2401 Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan				262.924.951
2402 Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang				108.255.644
<b>033.04 DITJEN BINA MARGA</b>				<b>39.293.944.663</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>583.368.736</b>
<b>033.04.08 Program Penyelenggaraan Jalan</b>				<b>583.368.736</b>
2403 Dukungan Manajemen Koordinasi Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan				583.368.736
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>38.710.575.927</b>
<b>033.04.08 Program Penyelenggaraan Jalan</b>				<b>38.710.575.927</b>
2404 Pengaturan Pembinaan Perencanaan Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan				109.296.685
2405 Pengaturan dan Pembinaan Teknik Preservasi Peningkatan Kapasitas Jalan				1.304.040.010
2406 Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitas Jalan Daerah				106.101.285
2409 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional				37.112.698.828
2410 Pengaturan Pengusahaan Pengawasan Jalan Tol				78.439.119
<b>033.05 DITJEN CIPTA KARYA</b>				<b>14.118.911.243</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>297.507.426</b>
<b>033.05.07 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman</b>				<b>297.507.426</b>
2411 Pelayanan Manajemen				235.744.626
2417 Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan				61.762.800
<b>05 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>2.543.064.506</b>
<b>033.05.07 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman</b>				<b>2.543.064.506</b>
2414 Pengaturan Pembinaan Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan				2.543.064.506
<b>06 FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>				<b>11.278.339.311</b>
<b>033.05.07 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman</b>				<b>11.278.339.311</b>
2412 Pengaturan Pembinaan Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman				3.270.928.472





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 033  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			2413 Pengaturan Pembinaan Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	2.813.322.510
			2415 Pengaturan Pembinaan Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.929.314.660
			2416 Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran Kerja Sama Luar Negeri Data Informasi dan Evaluasi Kinerja	264.773.669
<b>033.06</b>	<b>DITJEN SUMBER DAYA AIR</b>			<b>18.405.213.552</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>17.449.648.059</b>
		<b>033.06.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air</b>		<b>17.449.648.059</b>
			2421 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air	258.548.211
			5035 Pembinaan Keamanan Bendungan	22.181.710
			5036 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	5.710.822.345
			5037 Pengendalian Banjir Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai	5.238.802.027
			5038 Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu	919.566.477
			5039 Pengelolaan dan Konservasi Waduk Embung Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	3.583.597.288
			5040 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1.716.130.001
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>955.565.493</b>
		<b>033.06.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air</b>		<b>955.565.493</b>
			2418 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	9.877.342
			2419 Pembinaan Program Ditjen SDA	86.981.872
			2420 Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air	69.019.717
			2422 Pembinaan Irigasi Rawa Tambak Air Baku dan Air Tanah	160.138.207
			2423 Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	495.305.036
			2424 Pembinaan Sungai Danau Waduk Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai	134.243.319
<b>033.11</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>483.763.714</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>28.500.000</b>
		<b>033.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum</b>		<b>28.500.000</b>
			2430 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang	28.500.000
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>455.263.714</b>
		<b>033.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum</b>		<b>455.263.714</b>
			2431 Penelitian dan Pengembangan Subbidang Sumber Daya Air	145.946.532
			2432 Penelitian dan Pengembangan Subbidang Jalan dan Jembatan	160.645.723
			2433 Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman	110.590.246
			2434 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan	38.081.213
<b>033.13</b>	<b>BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI</b>			<b>345.522.754</b>
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>345.522.754</b>
		<b>033.13.06 Program Pembinaan Konstruksi</b>		<b>345.522.754</b>
			2435 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa	67.566.195
			2436 Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	40.270.918
			2437 Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	20.762.961
			2438 Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi	22.913.212
			2439 Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	194.009.468
<b>JUMLAH</b>				<b>74.522.244.881</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 034  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>034.01 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN</b>				<b>448.348.622</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>32.801.903</b>
		<b>034.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam</b>		<b>32.801.903</b>
			5041 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)	20.358.780
			5042 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan RI	12.443.123
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>			<b>415.546.719</b>
		<b>034.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam</b>		<b>81.725.839</b>
			2440 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana Perpustakaan dan Data	3.564.577
			2441 Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga	199.200
			2442 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Perlengkapan dan Rumah Tangga Keuangan Protokol dan Keamanan	76.191.162
			2443 Pengelolaan Pengawasan Internal	1.077.800
			2444 Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam	693.100
		<b>034.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam</b>		<b>6.498.969</b>
			2445 Peningkatan Sarana dan Prasarana	6.498.969
		<b>034.01.06 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan</b>		<b>64.873.400</b>
			2446 Koordinasi Pendayagunaan Aparatur	668.300
			2447 Koordinasi Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional	693.307
			2448 Koordinasi Pengembangan Sistem Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara	924.618
			2449 Koordinasi Harmonisasi Sosial	532.000
			2450 Koordinasi Hubungan Multilateral	1.279.307
			2451 Koordinasi Hukum Internasional	716.700
			2452 Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat	728.246
			2453 Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara	732.000
			2454 Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa	975.163
			2455 Koordinasi Kerja Sama Asean	826.580
			2456 Koordinasi Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika	935.475
			2457 Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal	701.271
			2458 Koordinasi Materi Hukum	996.080
			2459 Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan	570.066
			2460 Koordinasi Informasi Media Massa	416.944
			2461 Koordinasi Telekomunikasi dan Telematika	1.174.250
			2462 Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi	1.291.245
			2463 Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil	503.774
			2464 Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM	2.663.020
			2465 Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan	8.340.650
			2466 Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	983.014
			2467 Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus	9.007.249
			2468 Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum	612.053
			2469 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	532.000
			2470 Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerja Sama Keamanan	460.204
			2471 Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi	13.468.977
			2472 Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	463.885
			2473 Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme)	1.630.462
			2474 Koordinasi Penegakan Hukum	2.826.101
			2475 Koordinasi Pengelolaan Pemilu	3.496.266
			2476 Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus	532.000
			2477 Koordinasi Kekuatan Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan	822.759
			2478 Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri	881.234
			2479 Koordinasi Wawasan Kebangsaan	932.526
			2480 Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan	2.555.674
		<b>034.01.07 Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Di Laut</b>		<b>262.448.511</b>
			2481 Koordinasi Informasi dan Penegakan Hukum di Laut	23.653.485
			2482 Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan Laut	104.942.041
			2483 Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut	87.801.000
			2484 Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut	4.105.700
			2485 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Keamanan Laut	41.946.285
<b>JUMLAH</b>				<b>448.348.622</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 035  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>035.01 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>				<b>291.265.583</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>158.754.778</b>
<b>035.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian</b>				<b>107.972.678</b>
2486 Peningkatan Pelayanan Perencanaan				6.300.000
2487 Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan Hukum dan Humas				10.000.000
2488 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)				88.272.678
2489 Pengawasan Inspektorat				600.000
2490 Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian				2.800.000
<b>035.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Perekonomian</b>				<b>1.204.300</b>
2491 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Sarpras)				1.204.300
<b>035.01.06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian</b>				<b>49.577.800</b>
2501 Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah				2.200.000
5047 Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus				10.700.000
5200 Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia				30.877.800
5226 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis				1.400.000
5227 Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri				1.500.000
5228 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi				1.500.000
5229 Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan				1.400.000
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>94.289.765</b>
<b>035.01.06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian</b>				<b>94.289.765</b>
2492 Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja				1.900.000
2493 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati				1.000.000
2494 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi				1.000.000
2495 Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW				3.500.000
2496 Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi				3.800.000
2497 Koordinasi Pembiayaan Kredit Asuransi dan Remitansi Untuk Pekerja Migran				1.600.000
2498 Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN				1.100.000
2499 Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen				1.200.000
2500 Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan				3.200.000
2502 Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan				10.489.765
2503 Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal				1.100.000
2504 Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan				1.600.000
2505 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur				1.100.000
2506 Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air				8.600.000
2507 Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi				6.900.000
2508 Koordinasi Kebijakan Bidang Kehutanan				1.900.000
2509 Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi				4.000.000
2510 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik				6.300.000
2511 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia				2.500.000
2512 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Afrika dan Timur Tengah				2.600.000
2513 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan				1.300.000
2514 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional				2.900.000
2515 Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi				1.600.000
2516 Koordinasi Kebijakan Pangan				2.600.000
2517 Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)				1.500.000
2518 Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan				1.100.000
2519 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan Koperasi dan UKM				1.500.000
2521 Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan LN dan Kepariwisata				1.900.000
2522 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi				1.200.000
2523 Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)				3.200.000
2524 Koordinasi Kebijakan Kelautan Perikanan dan Peternakan				2.100.000
2525 Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura				2.100.000
2526 Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara				1.600.000
2528 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana Sarana Pangan dan Sumber Daya Hayati				1.900.000
2529 Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas				2.400.000
<b>06 FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>				<b>38.221.040</b>
<b>035.01.06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian</b>				<b>38.221.040</b>
2520 Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal				4.600.000
2527 Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan Pertanahan dan Kerja Sama Pemerintah Swasta				33.621.040
<b>JUMLAH</b>				<b>291.265.583</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 036  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
036.01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT			194.329.457
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			101.040.918
		036.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Kesra		101.040.918
			2530 Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Informasi dan Persidangan	4.890.655
			2531 Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran Penyusunan Data Pelaporan dan Administrasi KLN	4.331.077
			2532 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum	71.578.170
			2533 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko Kesra	643.104
			2534 Penyelenggaraan Pembinaan Korpri Kemenko Kesra	407.638
			2535 Koordinasi Kajian Bidang Kesra	2.247.476
			2567 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	16.942.798
	11 FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL			93.288.539
		036.01.06 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		93.288.539
			2536 Koordinasi Kebijakan Urusan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	1.254.035
			2537 Koordinasi Kebijakan Urusan Lingkungan	2.466.400
			2538 Koordinasi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	861.675
			2539 Koordinasi Kebijakan Bimbingan Umat Beragama Pendidikan Agama dan Keagamaan	1.008.300
			2540 Koordinasi Kebijakan Urusan Bencana	1.803.354
			2541 Koordinasi Pengembangan Regulasi Sistem Jaminan Sosial	1.462.691
			2542 Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan	2.536.561
			2543 Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan	10.016.116
			2544 Sekretariat Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	1.085.931
			2545 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Keluarga dan Kesejahteraan Anak	1.323.672
			2546 Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan KB	956.648
			2547 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga	2.098.361
			2548 Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro dan Penguatan TTG	1.194.501
			2549 Koordinasi Urusan Kompensasi Sosial	3.659.040
			2550 Koordinasi Kebijakan Urusan Konflik Sosial	1.849.130
			2551 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1.383.535
			2552 Koordinasi Kebijakan Penguatan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan	933.240
			2553 Koordinasi Kebijakan Bidang Olahraga	1.251.400
			2554 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Dampak Pariwisata	8.057.349
			2555 Koordinasi Kebijakan Penguatan Pelayanan Kesehatan	871.332
			2556 Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lansia	814.275
			2557 Koordinasi Kebijakan Pembinaan Generasi Muda	756.784
			2558 Koordinasi Kebijakan Pendidikan Dasar Paud dan Pendidikan Masyarakat	1.653.616
			2559 Koordinasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Tinggi	929.858
			2560 Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	1.339.800
			2561 Koordinasi Kebijakan Penguatan Masyarakat dan Kawasan	1.272.579
			2562 Koordinasi Kebijakan Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	4.029.795
			2563 Pencegahan dan Penanggulangan Hiv/Aids	11.165.000
			2564 Koordinasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	951.874
			2565 Koordinasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	1.128.279
			2566 Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Strategis Bidang Kesra	7.505.797
			2568 Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN)	15.667.611
JUMLAH				194.329.457





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 040  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
040.01	SEKRETARIAT JENDERAL			151.158.121
	08 FUNGSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			151.158.121
		040.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan		143.158.081
		2569 Pelayanan Hukum dan Administrasi Kepegawaian		7.579.083
		2570 Peningkatan Kerja Sama Internasional		7.655.892
		2571 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan		6.855.349
		2572 Pengembangan Perencanaan dan Organisasi		14.599.094
		2573 Peningkatan Layanan Administrasi Umum		84.728.146
		2574 Peningkatan Layanan Komunikasi Publik		7.802.443
		2575 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur		5.938.074
		2576 Peningkatan Layanan Data dan Informasi		8.000.000
		040.01.02 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		8.000.040
		2577 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana		8.000.040
040.02	INSPEKTORAT JENDERAL			25.730.656
	08 FUNGSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			25.730.656
		040.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi		25.730.656
		2578 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektur I		2.053.388
		2579 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektur II		2.271.266
		2580 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektur III		1.856.630
		2581 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal		19.549.372
040.05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA			319.168.299
	08 FUNGSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			319.168.299
		040.05.08 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		319.168.299
		2599 Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata		41.118.134
		2600 Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata		42.702.117
		2601 Pengembangan Daya Tarik Pariwisata		99.231.489
		2603 Pengembangan Industri Pariwisata		17.823.516
		2604 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata		39.874.739
		5187 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata		46.400.000
		5188 Pengembangan Wisata Minat Khusus Konvensi Insentif dan Even		32.018.304
040.06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN			373.025.298
	08 FUNGSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			373.025.298
		040.06.09 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		373.025.298
		2605 Peningkatan Promosi Konvensi Insentif Even dan Minat Khusus		37.574.000
		2606 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata		15.507.307
		2607 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri		41.769.208
		2608 Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri		97.411.503
		2609 Peningkatan Pencitraan Pariwisata		84.350.000
		2610 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasaran Pariwisata		96.413.280
040.10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			333.925.231
	08 FUNGSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			62.724.172
		040.10.10 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		62.724.172
		2613 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pariwisata		5.721.420
		2614 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		9.185.030
		2616 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		32.540.243
		5189 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Ekonomi Kreatif		5.840.573
		5190 Peningkatan Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif		9.436.906
	10 FUNGSI PENDIDIKAN			271.201.059
		040.10.10 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		271.201.059
		2615 Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata		271.201.059
040.11	DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA			210.288.827
	08 FUNGSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			210.288.827
		040.11.11 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya		210.288.827
		5191 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik		69.813.000
		5192 Pengembangan Industri Perfilman		47.000.000
		5193 Pengembangan Seni Rupa		34.000.000
		5195 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya		59.475.827
040.12	DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA DESAIN DAN IPTEK			94.396.321
	08 FUNGSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			94.396.321
		040.12.12 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek		94.396.321
		5196 Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Media		21.119.924
		5197 Pengembangan Desain dan Arsitektur		21.088.978
		5198 Penguatan Kerja Sama dan Fasilitas		14.413.661
		5199 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek		37.773.758
JUMLAH				1.507.692.753



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 041  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
041.01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA				123.456.840
	04 FUNGSI EKONOMI			123.456.840
		041.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN		100.952.249
			2617 Peningkatan Kualitas Perencanaan SDM dan Pengelolaan Keuangan	9.929.396
			2618 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Hukum dan Bantuan Hukum	3.395.432
			2619 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Pelayanan Administrasi dan Humas	84.513.165
			2620 Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian Bumh	2.093.261
			2621 Penelaahan Kebijakan Pimpinan	1.020.995
		041.01.06 Program Pembinaan BUMN		22.504.591
			2622 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Industri Primer I	943.790
			2623 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Industri Primer II	1.078.208
			2624 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Industri Primer III	998.179
			2625 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Industri Strategis dan Manufaktur I	962.817
			2626 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Industri Strategis dan Manufaktur II	950.970
			2627 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Industri Strategis dan Manufaktur III	844.423
			2628 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Infrastruktur dan Logistik I	
			2629 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Infrastruktur dan Logistik II	
			2630 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Infrastruktur dan Logistik III	
			2631 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Jasa I	841.584
			2632 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Jasa II	1.297.216
			2633 Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Jasa III	705.684
			2634 Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha	4.169.038
			2635 Pendayagunaan Aset dan Sinergi	444.900
			2636 Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan	164.200
			2637 Riset dan Informasi	9.103.582
JUMLAH				123.456.840





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 042  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
042.01	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI			555.028.797
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			555.028.797
		042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KRT		123.769.199
			2638 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas KRT	1.480.494
			2639 Pembinaan dan Pengembangan Humas dan Hukum	7.738.355
			2640 Peningkatan Kualitas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Penjalinan Kerja Sama dan Evaluasi Pencapaian Kinerja	13.943.373
			2641 Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Umum	100.606.977
		042.01.06 Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional		431.259.598
			2644 Arah Pengembangan Kelembagaan Sistem Inovasi	1.728.928
			2645 Pengelolaan Data dan Informasi Iptek	5.251.557
			2646 Pengembangan Hubungan Lembaga Regulasi Dengan Penyedia Iptek	1.375.906
			2647 Peningkatan Investasi Litbang	1.377.926
			2648 Pengembangan Jaringan Penyedia Dengan Pengguna Iptek	98.706.455
			2649 Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek	647.073
			2650 Peningkatan Efektivitas Riset Secara Sinergi Antara Perguruan Tinggi Dengan Lembaga Litbang	350.800
			2651 Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek Dengan Internasional	5.928.141
			2652 Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek Pusat Dengan Daerah	3.578.592
			2653 Pengembangan Kebijakan Riset Iptek Nasional	591.686
			2654 Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Standardisasi	455.163
			2655 Fasilitasi Proses Perolehan Hak Paten dan Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif	1.841.711
			2656 Penguatan Kompetensi Lembaga Litbang	5.183.017
			2657 Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan Obat-Obatan dan Instrumentasi Medis	16.540.615
			2658 Pengembangan Sistem Legislasi Iptek	1.712.018
			2659 Pengembangan Budaya dan Etika Iptek	2.402.819
			2660 Penataan Kelembagaan Litbang	2.040.158
			2661 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi Pemerintah	2.876.203
			2662 Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana	533.000
			2663 Adaptasi Perubahan Iklim	276.999
			2664 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Besar	1.856.996
			2665 Insentif Riset SINas	79.238.028
			2666 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM)	7.874.500
			2667 Peningkatan Kemampuan Inovasi dan Kreativitas Pemuda	1.000.000
			2668 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Masyarakat	700.000
			2669 Peningkatan Promosi dan Diseminasi Iptek	18.196.800
			2670 Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Pendukung Pembangunan Daerah Tertinggal Terdepan dan Pasca Konflik	1.822.365
			2671 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Strategis	990.400
			2672 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis "Open Source"	791.576
			2674 Pengembangan Riset Iptek Industri	1.694.400
			2675 Pengembangan Riset Iptek Masyarakat	2.462.272
			2676 Pengembangan Riset Iptek Strategis Nasional	2.542.282
			2677 Peningkatan Dukungan Teknologi Bagi Pemberdayaan Industri Strategis Bidang Pertahanan	1.631.619
			2678 Peningkatan Dukungan Teknologi Bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan Termasuk Energi Alternatif Geothermal Tenaga Surya Mycrohidro Bio-Energy dan Nuklir	644.105
			2679 Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi	644.007
			2681 Pengembangan Program Riset Iptek Nasional	510.034
			2683 Peningkatan Sarana dan Prasarana Litbang	1.380.228
			2684 Peningkatan SDM Iptek	442.372
			2685 Peningkatan Kapasitas SDM Iptek (Beasiswa)	153.438.847
JUMLAH				555.028.797



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 043  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>043.01 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>945.756.945</b>
<b>05 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>945.756.945</b>
<b>043.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup</b>				<b>336.706.019</b>
			2686 Pengembangan Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup	21.500.000
			2687 Peningkatan Kinerja Dewan Nasional Perubahan Iklim	35.000.000
			2688 Pengendalian Internal Kementerian Lingkungan Hidup	4.896.324
			2689 Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Rumah Tangga Keuangan dan Kepegawaian Kemen Lingkungan Hidup	262.309.695
			2690 Pengembangan Telaahan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4.500.000
			2704 Pengembangan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Hubungan Masyarakat	8.500.000
<b>043.01.06 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>				<b>609.050.926</b>
			2692 Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3	9.161.200
			2693 Peningkatan Data Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup	14.884.492
			2694 Peningkatan Komunikasi Lingkungan	7.364.557
			2695 Pengembangan Ekonomi Lingkungan	7.065.643
			2696 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	7.440.020
			2697 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan	12.000.000
			2698 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	7.740.000
			2699 Penguatan Inisiatif Masyarakat	27.527.615
			2700 Peningkatan Peran Masyarakat	6.450.000
			2701 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	13.756.000
			2702 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor	19.320.680
			2705 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir	18.610.000
			2706 Adaptasi Perubahan Iklim	6.143.636
			2707 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	7.740.000
			2708 Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	17.591.632
			2709 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	13.090.200
			2710 Perjanjian Internasional Lingkungan	6.020.000
			2711 Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak	15.434.152
			2712 Pengelolaan Sampah Bidang Lingkungan Hidup	16.705.600
			2713 Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil	11.574.174
			2714 Pengendalian Pencemaran Manufaktur Prasarana dan Jasa	16.722.674
			2715 Pengendalian Pencemaran Pertambangan Energi dan Migas	13.945.000
			2716 Peningkatan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	8.995.514
			2717 Penyelesaian Sengketa Lingkungan	8.001.855
			2718 Pengakuan Hukum Pidana Lingkungan	9.195.645
			2719 Peningkatan Kebijakan Standardisasi Teknologi dan Produksi Bersih dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.208.692
			2720 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	14.590.508
			2721 Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan	25.060.000
			2722 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	108.878.454
			2723 Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan	7.472.116
			4024 Pengelolaan Ekoregion Sumatera	36.831.298
			4025 Pengelolaan Ekoregion Jawa	37.521.944
			4026 Pengelolaan Ekoregion Kalimantan	20.596.923
			4027 Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	16.103.580
			4028 Pengelolaan Ekoregion Sulawesi dan Maluku	21.254.455
			5239 Pengelolaan Ekoregion Papua	13.052.667
<b>JUMLAH</b>				<b>945.756.945</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 044  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
044.01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH			1.420.448.122
	04 FUNGSI EKONOMI			1.205.448.122
		044.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM		216.720.935
			2724 Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM	15.662.368
			2725 Monitoring Evaluasi/Pelaporan dan Pengelolaan Data dan Informasi Koperasi dan Umkm	15.938.576
			2727 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan HMN	96.760.797
			2728 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah	5.810.000
			2729 Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian	31.249.996
			2731 Penyelenggaraan Kehumasan dalam Rangka Penyelenggaraan Sosialisasi/Publikasi/Visualisasi dan Pelayanan Informasi	51.299.198
		044.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM		59.950.220
			2732 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan Koperasi	59.950.220
		044.01.06 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM		928.776.967
			2726 Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah	123.318.953
			2733 Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.365.000
			2734 Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan	7.414.371
			2735 Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Perikanan dan Peternakan	3.780.000
			2736 Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan	13.928.569
			2737 Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	18.295.000
			2740 Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan Bagi Koperasi dan UMKM	14.292.120
			2741 Pengembangan Pengendalian dan Pengawasan KSP/USP-Koperasi KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM	15.755.960
			2742 Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	127.336.380
			2743 Pengembangan Asuransi Jasa Keuangan dan Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM	2.871.500
			2744 Pengembangan Pembiayaan Penjaminan Kredit dan Pengembangan Sektor Strategis Bagi Koperasi dan UMKM	4.495.000
			2745 Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	5.363.167
			2746 Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan Umkm	7.487.704
			2747 Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan Umkm	9.645.026
			2749 Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerja Sama Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop)	27.998.658
			2750 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi	11.106.603
			2751 Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan Umkm	38.242.900
			2753 Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UKM	8.032.383
			2754 Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran Kumkm	60.368.400
			2755 Pengembangan Kemitraan Koperasi dan Umkm	7.250.950
			2756 Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan Ukm	12.452.338
			2757 Pemasarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan	27.537.553
			2758 Revitalisasi Sistem Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perkoperasian	1.571.500
			2759 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengusaha Skala Mikro Kecil dan Menengah serta Pengelola Koperasi	745.350
			2760 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam SDM KUMKM	16.929.550
			2761 Peningkatan Daya Saing KUMKM	121.500
			2762 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM	1.095.600
			2763 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola LKM/KSP/USP	846.000
			2765 Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM	10.599.612
			2766 Perluasan KUR	14.069.204
			2767 Pengembangan Restrukturisasi Usaha	4.553.746
			2768 Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis	5.459.121
			2770 Pengembangan Fasilitas Investasi Ukm	9.976.566
			2774 Pengembangan Sistem Bisnis	4.320.400
			2775 Penelitian Koperasi dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah	2.571.690
			2776 Penelitian UKM dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah	2.532.478
			2777 Penelitian Sumber Daya Koperasi dan UKM dalam Peningkatan Ekonomi Kawasan	9.842.570
			2778 Pengembangan Perkaderan UKMK Melalui Peningkatkan Kapasitas Kerja Sama dan Jaringan	4.579.013
			2779 Pengelolaan Dana Bergulir	99.775.766
			2782 Layanan Pemasaran Bagi KUKM	59.096.915
			4018 Bantuan Operasional Dekopin	35.000.000
			5202 Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM	93.751.851
	10 FUNGSI PENDIDIKAN			215.000.000
		044.01.06 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM		215.000.000
			4017 Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM	215.000.000
JUMLAH				1.420.448.122



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 047  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>047.01 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>191.629.656</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>4.564.064</b>
<b>047.01.06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>				<b>2.473.663</b>
5049 Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi				2.473.663
<b>047.01.07 Program Perlindungan Anak</b>				<b>2.090.401</b>
5050 Penguatan Kelembagaan Pemenuhan hak anak di provinsi				2.090.401
<b>11 FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL</b>				<b>187.065.592</b>
<b>047.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP dan PA</b>				<b>162.791.192</b>
2783 Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat				4.148.532
2784 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran				4.410.959
2785 Pengembangan SDM administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA				144.326.672
2786 Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KPP dan PA				905.029
2787 Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAL)				7.600.000
2788 Telaahan PP dan PA				1.400.000
<b>047.01.06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>				<b>15.154.400</b>
2789 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan Data Gender				520.581
2790 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Hukum yang Responsif Gender				1.118.574
2791 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur yang Responsif Gender				844.860
2792 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan Sumber Daya Ekonomi yang Responsif Gender				974.245
2793 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan				2.908.696
2794 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Kesehatan yang Responsif Gender				745.846
2795 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang Responsif Gender				963.792
2796 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Industri dan Perdagangan yang Responsif Gender				864.859
2797 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan				782.073
2798 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang Responsif Gender				785.537
2799 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Korban Perdagangan Orang				1.154.397
2800 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan				668.653
2801 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan Kelautan Ketahanan Pangan dan Agrobisnis yang Responsif Gender				912.244
2802 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan				1.191.603
2803 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Responsif Gender				718.440
<b>047.01.07 Program Perlindungan Anak</b>				<b>9.120.000</b>
2804 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Untuk Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum				956.690
2805 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus				852.985
2806 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak				1.017.407
2807 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak				1.055.251
2808 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak				712.000
2809 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan yang Layak Untuk Anak				712.000
2810 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang Masalah Sosial Anak				677.667
2811 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak				1.037.000
2812 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak				887.000
2813 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLa)				1.212.000
<b>JUMLAH</b>				<b>191.629.656</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 048  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>048.01 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI</b>				<b>146.153.116</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>146.153.116</b>
<b>048.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB</b>				<b>89.349.423</b>
2814 Pengelolaan dan Pembinaan Hukum Komunikasi Publik dan Sistem Informasi				9.388.700
2815 Pengelolaan dan Pembinaan Manajemen Kinerja dan Penganggaran Kerja Sama Lembaga dan Pelaporan				2.835.183
2816 Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Keuangan dan Perkantoran				73.837.728
2817 Pembinaan dan Pengawasan Intern dan Quality Assurance				2.184.650
2818 Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB				1.103.162
<b>048.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan RB</b>				<b>3.642.740</b>
2819 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kementerian				3.642.740
<b>048.01.06 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</b>				<b>53.160.953</b>
2820 Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan				5.017.811
2821 Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan				5.425.690
2822 Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur				1.995.771
2823 Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I				2.201.340
2824 Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II				2.287.135
2825 Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III				2.275.880
2826 Pengembangan Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi				2.581.042
2827 Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Tata Laksana				2.398.326
2828 Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana				1.246.260
2829 Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan E-Government				1.476.527
2830 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I				711.955
2831 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II				1.457.860
2832 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III				1.165.572
2833 Koordinasi Kebijakan Penyusunan Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur				2.731.397
2834 Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur				1.634.000
2835 Perumusan Kebijakan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur				5.761.445
2836 Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur				1.807.240
2837 Pengembangan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur				1.607.410
2838 Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik				1.294.609
2839 Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik				2.406.168
2840 Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I				1.961.300
2841 Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik II				1.820.000
2842 Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III				1.896.215
<b>JUMLAH</b>				<b>146.153.116</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 050  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NEGARA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
050.01		BADAN INTELIJEN NEGARA		1.830.146.365
	03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN		1.830.146.365
		050.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara		750.476.365
			2851 Penyelenggaraan Dukungan Administrasi dan Sumber Daya Manusia	722.276.365
			2852 Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen	28.200.000
		050.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara		2.000.000
			2853 Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.000.000
		050.01.06 Program Pengembangan Penyelidikan Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara		1.077.670.000
			2854 Operasi Intelijen Luar Negeri	133.011.000
			2855 Operasi Intelijen dalam Negeri	569.659.000
			2856 Operasi Kontra Intelijen	225.000.000
			2857 Operasi Intelijen Ekonomi	60.000.000
			2858 Operasi Intelijen Teknologi	30.000.000
			2859 Operasi Intelijen Komunikasi dan Informasi	42.000.000
			5235 Analisis dan Produksi Intelijen	18.000.000
JUMLAH				1.830.146.365





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 051  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA SANDI NEGARA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>051.01 LEMBAGA SANDI NEGARA</b>				<b>1.521.421.505</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>239.365.183</b>
		<b>051.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara</b>		<b>239.365.183</b>
			2861 Dukungan Administratif Bidang Perencanaan Hukum Organisasi Tata Laksana Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat	46.157.830
			2862 Dukungan Administratif Umum Bidang Keuangan dan Persuratan	96.199.341
			2863 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	94.827.782
			2864 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemsaneg	2.180.230
	<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>			<b>1.243.050.276</b>
		<b>051.01.06 Program Pengembangan Persandian Nasional</b>		<b>1.243.050.276</b>
			2866 Analisa Sinyal	704.468.668
			2867 Operasionalisasi Materil Sandi	344.839.215
			2868 Pembinaan Persandian	19.572.503
			2869 Pengamanan Sinyal	138.849.946
			2870 Pengendalian Persandian	17.564.905
			2871 Pengkajian Pengamanan Komunikasi Sandi	6.078.234
			2872 Pengkajian Kriptografi dan Sistem Sandi	4.178.753
			2873 Pengkajian dan Pengembangan Peralatan Sandi	7.498.052
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>39.006.046</b>
		<b>051.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara</b>		<b>39.006.046</b>
			2860 Pembentukan As II dan Fungsional Lainnya	11.375.821
			2865 Penyelenggaraan Pendidikan Profesional di Bidang Persandian	27.630.225
<b>JUMLAH</b>				<b>1.521.421.505</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 052  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN KETAHANAN NASIONAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
052.01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL			27.456.304
	02 FUNGSI PERTAHANAN			27.456.304
		052.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas		13.751.645
			2874 Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	7.396.704
			2875 Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat	190.080
			2876 Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Umum	936.510
			2877 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas	320.341
			2878 Pengelolaan Asset Wantanas	4.908.010
		052.01.06 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional		13.704.659
			2879 Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional	13.542.444
			2880 Pengembangan Sistem Informasi Wantannas	162.215
<b>JUMLAH</b>				<b>27.456.304</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 054  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
054.01	BADAN PUSAT STATISTIK			3.251.034.005
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			3.205.083.332
		054.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS		1.733.176.704
			2881 Penyusunan Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran	16.133.350
			2882 Pelayanan Publik Hubungan Masyarakat dan Hukum	8.218.324
			2883 Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	4.408.215
			2884 Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	146.308.916
			2885 Dukungan Manajemen BPS Lainnya	64.265.052
			2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	1.464.261.490
			2887 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	29.581.357
		054.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS		290.133.308
			2890 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya	15.520.112
			2891 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	274.613.196
		054.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS		6.588.480
			2892 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	2.103.343
			2893 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	2.354.250
			2894 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	2.130.887
		054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik		1.175.184.840
			2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	785.889.253
			2896 Pengembangan dan Analisis Statistik	5.159.157
			2897 Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	7.159.420
			2898 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	5.410.761
			2899 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	3.729.228
			2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	1.123.939
			2901 Pengembangan Sistem Informasi Statistik	176.204.095
			2902 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	11.119.914
			2903 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	6.846.339
			2904 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri Pertambangan dan Penggalian Energi dan Konstruksi	7.100.205
			2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	10.416.920
			2906 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	50.758.874
			2907 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	10.989.295
			2908 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata	57.731.296
			2909 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan	1.358.997
			2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	34.187.138
	10 FUNGSI PENDIDIKAN			45.950.673
		054.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS		45.950.673
			2888 Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	45.950.673
JUMLAH				3.251.034.005



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 055  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>055.01 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>				<b>1.143.501.617</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>1.143.501.617</b>
<b>055.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas</b>				<b>528.103.948</b>
2911 Pelayanan Kehumasan Keprotokolan/Persidangan dan Ketatausahaan Pimpinan				8.140.000
2912 Pembinaan dan Pelayanan Hukum				1.455.000
2913 Penyusunan Perencanaan Analisis Organisasi dan Tata Laksana				41.047.677
2914 Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian				8.187.770
2915 Pelayanan Umum dan Keuangan				188.038.351
2916 Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional				6.580.000
2917 Pembinaan Perencana dan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan				271.155.150
2918 Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan				3.500.000
<b>055.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas</b>				<b>33.000.000</b>
2919 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional				33.000.000
<b>055.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas</b>				<b>4.300.000</b>
2920 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum				2.688.000
2921 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan				1.612.000
<b>055.01.06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional</b>				<b>578.097.669</b>
2922 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan				2.500.259
2923 Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan				4.281.642
2924 Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan				2.640.600
2925 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara				3.773.541
2926 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi Telekomunikasi dan Informatika				1.650.000
2927 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				9.205.692
2928 Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial				2.470.054
2929 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia				1.980.355
2930 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri Iptek Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				2.480.571
2931 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN				2.119.322
2932 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal				3.923.313
2933 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama Kebudayaan Pemuda dan Olahraga				7.301.760
2934 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air				2.577.920
2935 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan				4.101.841
2936 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				5.139.373
2937 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat				9.573.637
2938 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisa Moneter				3.814.540
2939 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup				11.458.691
2940 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Otonomi Daerah				4.607.597
2941 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian				3.487.987
2942 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				2.990.000
2943 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan				6.600.000
2944 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral				1.930.644
2945 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral				2.481.193
2947 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi				22.660.090
2948 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta				60.021.327
2949 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah				18.041.942
2950 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional				2.774.627
2951 Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan				2.795.101
2952 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro				1.806.240
2953 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan dan Perdesaan				3.214.430
2954 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat				9.200.000
2955 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Permukiman dan Perumahan				15.643.430
2956 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan				1.442.755
2957 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi				3.376.885
2958 Pengembangan Kebijakan dalam Bidang Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan				2.370.054
2959 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan				3.373.726
2960 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan				4.019.630
2961 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja				3.760.950
2962 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi				3.868.740





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 055  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			5203 Pengelolaan Hibah MCC Indonesia	260.000.000
			5233 Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional	4.261.820
			5246 Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	52.375.390
<b>JUMLAH</b>				<b>1.143.501.617</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 056  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERTANAHAN NASIONAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>056.01 BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b>				<b>4.418.398.040</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>2.715.380.452</b>
<b>056.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN</b>				<b>2.291.124.725</b>
2963 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional				14.971.300
2964 Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian Bpn				15.076.221
2965 Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanahan				9.403.374
2966 Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Pimpinan Pengamanan dan Urusan Keprotokolan				6.059.843
2967 Pengelolaan Administrasi Umum (BPN)				507.310.462
2968 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan				53.969.739
2969 Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat				14.708.959
2970 Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pertanahan				20.607.687
2971 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanahan				5.978.013
2973 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi				1.643.039.127
<b>056.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN</b>				<b>411.179.236</b>
2974 Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Pusat)				73.061.924
2975 Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Daerah)				338.117.312
<b>056.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN</b>				<b>13.076.491</b>
2976 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bpn RI Wilayah I				2.801.435
2977 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bpn RI Wilayah II				2.280.430
2978 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bpn RI Wilayah III				2.479.968
2979 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bpn RI Wilayah IV				3.119.654
2980 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bpn RI Wilayah V				2.395.004
<b>05 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>1.674.324.330</b>
<b>056.01.06 Program Pengelolaan Pertanahan Nasional</b>				<b>1.674.324.330</b>
2981 Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan				8.188.806
2982 Pengelolaan Konsolidasi Tanah				3.020.197
2983 Pengelolaan Landreform				6.022.319
2984 Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Pertanahan				2.297.397
2985 Pemetaan Dasar				11.410.739
2986 Pemetaan Tematik				14.595.951
2987 Pengembangan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah				4.283.884
2988 Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang				3.723.525
2989 Peningkatan Kualitas Pengukuran Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Ruang dan Perairan				23.705.496
2990 Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah				1.844.212
2991 Pengaturan dan Pengadaan Tanah dan Legalisasi Tanah Instansi Pemerintah dan BUMN/ BUMD				3.330.999
2992 Pengelolaan Tanah Negara Tanah Terlantar dan Tanah Kritis				6.111.594
2993 Pengendalian Pertanahan				8.329.344
2994 Pengukuran Dasar				7.600.957
2995 Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan				3.266.987
2996 Pengkajian Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan				2.745.056
2997 Survei Potensi Tanah				9.547.028
2998 Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)				5.287.300
2999 Pengelolaan Pertanahan Provinsi				1.549.012.539
<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>				<b>28.693.258</b>
<b>056.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN</b>				<b>28.693.258</b>
2972 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN				28.693.258
<b>JUMLAH</b>				<b>4.418.398.040</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014**

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 057  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>057.01 PERPUSTAKAAN NASIONAL</b>				<b>422.439.149</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>112.439.149</b>
<b>057.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional</b>				<b>110.069.899</b>
3000 Perencanaan Hukum Humas dan Pengawasan Perpustakaan Nasional				25.174.958
3001 Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepegawaian dan Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional				80.997.480
5204 Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional				3.897.461
<b>057.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional</b>				<b>2.369.250</b>
3002 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Biro Umum Perpusnas				2.369.250
<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>				<b>310.000.000</b>
<b>057.01.06 Program Pengembangan Perpustakaan</b>				<b>310.000.000</b>
3003 Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional				7.450.000
3004 Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi				41.460.000
3005 Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan				10.100.000
3006 Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional				16.380.000
3007 Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca				207.560.000
3008 Pengembangan Pustakawan				6.300.000
3009 Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno				12.290.000
3010 Pengelolaan Perpustakaan Proklamator				8.460.000
<b>JUMLAH</b>				<b>422.439.149</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 059  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>059.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>278.194.000</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>268.587.900</b>
<b>059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>				<b>260.587.900</b>
3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika				15.633.800
3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika				47.123.700
3014 Koordinasi Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Lintas Sektor dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika				10.882.000
3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika				39.846.400
3016 Pelayanan Pengelolaan Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika				13.393.600
3017 Pelayanan Informasi Promosi Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika				9.763.200
3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika				14.600.700
3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika				15.417.800
3020 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat				14.366.700
3021 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat				60.600.000
3022 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers				18.960.000
<b>059.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>				<b>8.000.000</b>
3023 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika				8.000.000
<b>08 FUNGSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>				<b>9.606.100</b>
<b>059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>				<b>9.606.100</b>
3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika				9.606.100
<b>059.02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>26.227.477</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>26.227.477</b>
<b>059.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>				<b>26.227.477</b>
3024 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika				3.203.232
3025 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika				2.054.740
3026 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik				1.288.605
3027 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang SDM				1.738.856
3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal				17.942.044
<b>059.03 DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA</b>				<b>703.744.609</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>181.161.835</b>
<b>059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</b>				<b>181.161.835</b>
3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika				181.161.835
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>522.582.774</b>
<b>059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</b>				<b>522.582.774</b>
3052 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika				32.496.186
3053 Pelaksanaan Monitoring Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika				312.426.471
3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit				26.718.506
3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika				110.164.015
3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit				21.122.514
3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika				19.655.082
<b>059.04 DITJEN APLIKASI INFORMATIKA</b>				<b>151.243.859</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>37.985.058</b>
<b>059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika</b>				<b>37.985.058</b>
3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Aplikasi Informatika				37.985.058
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>113.258.801</b>
<b>059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika</b>				<b>113.258.801</b>
3029 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis				11.346.112
3030 Pembinaan dan Pengembangan E-Government				59.326.933
3031 Pembinaan Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika				6.757.772
3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat				16.676.713
3033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi				19.151.271
<b>059.05 DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA</b>				<b>2.052.482.316</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>105.756.196</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 059  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
		<b>059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika</b>		<b>105.756.196</b>
			3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika	105.756.196
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>1.946.726.120</b>
		<b>059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika</b>		<b>1.946.726.120</b>
			3059 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet	18.794.000
			3060 Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	1.802.086.700
			3061 Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika	31.311.600
			3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika	22.176.920
			3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos	22.082.950
			3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi	27.251.300
			3065 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran	23.022.650
<b>059.06 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				<b>184.475.571</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>30.112.461</b>
		<b>059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika</b>		<b>30.112.461</b>
			3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM	30.112.461
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>122.497.910</b>
		<b>059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika</b>		<b>122.497.910</b>
			3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika 2 Lokasi B2P2KI	15.150.995
			3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika 6 Lokasi B2P2KI	26.044.179
			3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika Informasi dan Komunikasi Publik	3.500.954
			3039 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika	58.515.940
			3040 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika	4.506.453
			3041 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	4.355.477
			3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.423.912
	<b>10 FUNGSI PENDIDIKAN</b>			<b>31.865.200</b>
		<b>059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika</b>		<b>31.865.200</b>
			3037 Pendidikan dan Pelatihan Multi Media	31.865.200
<b>059.07 DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				<b>161.650.620</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>50.559.690</b>
		<b>059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik</b>		<b>50.559.690</b>
			3051 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	50.559.690
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>111.090.930</b>
		<b>059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik</b>		<b>111.090.930</b>
			3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional	14.817.777
			3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi	17.610.160
			3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik	32.255.373
			3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	18.639.320
			3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional	16.488.300
			3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda Bersejarah di Bidang Pers	5.740.000
			3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi	5.540.000
<b>JUMLAH</b>				<b>3.558.018.452</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 060  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
060.01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA			43.603.877.580
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			24.107.920.516
		060.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri		24.107.920.516
			3068 Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	7.886.756
			3070 Penerangan Masyarakat	1.056.710
			3071 Penyelenggaraan Teknologi Informasi	3.329.230
			3072 Pelayanan Kesehatan Polri	367.290.636
			3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	23.728.357.184
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			19.495.957.064
		060.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri		40.969.139
			5051 Penyusunan Kebijakan Polri	2.631.054
			5052 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri	1.575.331
			5053 Reformasi Birokrasi Polri	3.346.298
			5054 Manajemen Anggaran	8.233.106
			5055 Teknologi Komunikasi	248.402
			5056 Pengelola Informasi dan Dokumentasi	833.829
			5057 Penyelenggaraan Kesenjangan Museum dan Perpustakaan Polri	2.904.232
			5058 Perencanaan dan Penganggaran Kewilayahan	21.196.887
		060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri		6.337.100.134
			3084 Pengembangan Peralatan Polri	4.337.115.335
			5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	1.188.934.272
			5060 Pengkajian dan Strategi Sarpras	337.997.674
			5061 Pengembangan Perbekalan Umum	33.533.128
			5062 Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	68.683.072
			5063 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	370.836.653
		060.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri		331.729.333
			3087 Dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan	287.789.560
			3088 Pertanggungjawaban Profesi	1.763.188
			3089 Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	2.316.034
			3090 Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	1.545.398
			3091 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	9.082.886
			5064 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan	13.607.640
			5065 Penyelenggaraan Propam Kewilayahan	15.624.627
		060.01.04 Program Penelitian dan Pengembangan Polri		14.425.076
			5066 Dukungan Manajemen Teknis Litbang	6.411.660
			5067 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri	8.013.416
		060.01.05 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri		1.197.177.066
			3096 Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan Diklat Polri	485.620.501
			3097 Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri	2.710.680
			3098 Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian	12.906.335
			3099 Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri	5.703.428
			3100 Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	616.983.325
			5068 Pengkajian Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri	1.536.332
			5069 Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri	5.595.300
			5070 Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Polri	907.270
			5071 Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri	4.489.600
			5072 Pendidikan AKPOL	60.724.295
		060.01.06 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri		332.338.434
			3103 Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri	204.820.031
			3104 Pengkajian dan Strategi SDM Polri	2.174.100
			3105 Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	1.626.970
			3107 Pengendalian Pegawai Polri	120.808.129
			3108 Pembinaan Karier Personel Polri	1.521.593
			3110 Pelayanan Psikologi Anggota Polri	1.387.611
		060.01.07 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban		505.838.706
			3111 Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban	343.879.360
			3112 Analisis Keamanan	1.354.484
			3114 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	4.838.000
			3115 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	2.316.124
			3116 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	2.362.950
			3117 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	2.520.400
			3119 Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan	148.567.388
		060.01.08 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban		92.995.970
			3120 Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L	8.673.223
			3122 Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri	6.545.227
			5073 Dukungan Manajemen dan Teknis Kerja sama dan Ketertiban	52.629.983
			5074 Misi Internasional	25.147.537
		060.01.09 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan		309.004.891
			5075 Dukungan Manajemen dan Teknis Potensi Keamanan	108.454.073
			5076 Pembinaan Potensi Keamanan	200.550.818
		060.01.10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		6.592.243.196
			3127 Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan	1.145.001.670
			3128 Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3.749.974.480
			3130 Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	18.893.103
			3131 Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	5.981.013





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 060  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			3133 Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas	1.537.676.458
			3134 Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	72.417.933
			3135 Penyelenggaraan Kepolisian Udara	50.420.423
			5077 Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan	756.778
			5078 Pengkajian dan Strategi Operasi Kepolisian	514.976
			5079 Pembinaan Operasi Kepolisian	5.104.450
			5080 Pengendalian Operasi Kepolisian	607.977
			5081 Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	4.893.935
		<b>060.01.11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana</b>		<b>1.589.294.756</b>
			3136 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan	591.964.735
			3137 Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	840.926.933
			3140 Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3.966.859
			3141 Penyelenggaraan Laboratrium Forensik	7.364.608
			3142 Penindakan Tindak Pidana Umum	12.249.647
			3143 Penindakan Tindak Pidana Terorisme	90.876.930
			3144 Penindakan Tindak Pidana Narkoba	11.272.829
			3145 Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	8.932.664
			3146 Penindakan Tindak Pidana Korupsi	8.921.677
			5082 Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.608.181
			5083 Penindakan Tindak Pidana Tertentu	5.620.747
			5084 Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional	1.446.810
			5085 Koordinasi dan Pengawasan PPNS	1.725.637
			5086 Pengawasan Penyidikan	1.416.499
		<b>060.01.12 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi</b>		<b>2.127.540.710</b>
			3147 Penanggulangan Keamanan dalam Negeri Kewilayahan	25.197.072
			3148 Dukungan Teknis Manajemen Penanggulangan Keamanan dalam Negeri	2.098.498.031
			5087 Penanggulangan Keamanan dalam Negeri	3.845.607
		<b>060.01.13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian</b>		<b>25.299.653</b>
			3154 Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	11.988.196
			3155 Penyusunan dan Penyuluhan Hukum	3.287.198
			5088 Dukungan Manajemen dan Teknis Hukum Kepolisian	10.024.259
<b>JUMLAH</b>				<b>43.603.877.580</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 063  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
063.01		BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		1.008.841.514
	07	KESEHATAN		1.008.841.514
		063.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	132.910.183
			3157 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bantuan Hukum Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	7.598.031
			3158 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Badan POM	4.542.301
			3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi Penyusunan Program dan Anggaran Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	38.566.793
			3160 Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	60.081.792
			3161 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	7.172.572
			3162 Pelayanan Informasi Obat dan Makanan Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi	14.948.694
		063.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	31.639.979
			3163 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan POM	8.907.047
			3164 Pengadaan Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Badan POM	22.732.932
		063.01.06	Program Pengawasan Obat dan Makanan	844.291.352
			3165 Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM	605.338.209
			3166 Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen	15.396.762
			3167 Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	13.008.260
			3168 Pengembangan Obat Asli Indonesia	3.889.634
			3169 Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT	5.450.761
			3170 Pengawasan Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif	9.291.070
			3171 Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	25.582.110
			3172 Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	10.984.109
			3173 Penilaian Makanan	8.704.508
			3174 Penilaian Obat dan Produk Biologi	9.249.776
			3175 Penilaian Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen	9.472.927
			3176 Standardisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen	19.890.721
			3177 Standardisasi Makanan	6.822.136
			3178 Standardisasi Produk Terapeutik dan PKRT	26.265.248
			3179 Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan	16.558.518
			3180 Pemeriksaan Secara Laboratorium Pengujian dan Penilaian Keamanan Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium Pom	42.667.473
			3181 Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan	8.963.830
			3182 Riset Keamanan Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan	6.755.300
JUMLAH				1.008.841.514





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 064  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
064.01	LEMBAGA	KETAHANAN NASIONAL RI		290.329.102
	01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		265.946.357
		064.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas		215.581.513
			3183 Pengelolaan Hubungan Masyarakat Lemhannas	3.778.551
			3184 Pengelolaan Hubungan Kerja Sama Lemhannas	3.753.290
			3185 Penyusunan Rencana Kerja Pembinaan Pengelolaan Anggaran dan Laporan Keuangan Lemhannas	3.486.700
			3186 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lemhannas	15.000.000
			3187 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Lemhannas	189.562.972
		064.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas		1.500.000
			3189 Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Lemhanas	1.500.000
		064.01.06 Program Pengembangan Ketahanan Nasional		48.864.844
			3190 Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Nasional di Bidang Program Pendidikan	6.653.820
			3191 Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Nasional di Bidang Materi Pendidikan	2.228.635
			3192 Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Nasional di Bidang Operasi Pendidikan	28.128.413
			3193 Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Nasional di Bidang Evaluasi Pendidikan	2.771.526
			3199 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Politik	1.636.490
			3200 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Ekonomi	2.486.490
			3201 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Sosial Budaya	1.486.490
			3202 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan	1.786.490
			3203 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Internasional	1.686.490
	02	FUNGSI PERTAHANAN		24.382.745
		064.01.06 Program Pengembangan Ketahanan Nasional		24.382.745
			3194 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	4.730.692
			3195 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Konstitusi dan Sistem Nasional	4.563.584
			3196 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Semangat Bela Negara	4.807.400
			3197 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Transformasi Nilai-Nilai Universal	4.172.972
			3198 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	6.108.097
JUMLAH				290.329.102



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 065  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>065.01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL</b>				<b>574.236.381</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>176.763.543</b>
<b>065.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM</b>				<b>164.539.020</b>
			3204 Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM	2.614.532
			3205 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal	126.682.672
			3206 Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	16.395.173
			3207 Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1.350.486
			3208 Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.113.992
			3209 Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal	2.880.000
			3210 Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM	2.974.064
			3211 Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal serta Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat Keprotokolan dan Tata Usaha Pimpinan	5.528.101
<b>065.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM</b>				<b>3.954.323</b>
			3212 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	3.954.323
<b>065.01.06 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal</b>				<b>8.270.200</b>
			3223 Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal	2.878.607
			3224 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	2.492.186
			3225 Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	2.899.407
<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>				<b>397.472.838</b>
<b>065.01.06 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal</b>				<b>397.472.838</b>
			3213 Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	15.298.343
			3214 Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	5.833.819
			3215 Pemberdayaan Usaha Nasional	6.553.976
			3216 Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal	53.575.618
			3217 Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di dalam dan Luar Negeri	182.352.086
			3218 Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal	11.044.719
			3219 Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal Untuk Kegiatan di dalam dan Luar Negeri	10.336.377
			3220 Kerja Sama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal	9.923.500
			3221 Kerja Sama Regional di Bidang Penanaman Modal	6.645.300
			3222 Kerja Sama Dengan Dunia Usaha Asing di dalam dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal	3.274.000
			3226 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	5.723.254
			3227 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	9.147.264
			3228 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	7.213.605
			3229 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	21.531.379
			3230 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal	20.808.398
			3231 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	4.901.292
			3232 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	6.200.247
			3233 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan	4.724.000
			3234 Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1.758.700
			5089 Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta	10.626.961
<b>JUMLAH</b>				<b>574.236.381</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 066  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>066.01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL</b>				<b>703.121.464</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>286.210.381</b>
<b>066.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN</b>				<b>286.210.381</b>
3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan				220.995.377
3237 Pengembangan Organisasi Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia				5.286.258
3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN				5.927.102
3239 Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan Tata Usaha Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana				36.435.235
3241 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja				6.500.000
3244 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan				11.066.409
<b>03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>				<b>416.911.083</b>
<b>066.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN</b>				<b>15.445.607</b>
3242 Penyelenggaraan Penelitian Data dan Informasi P4GN				10.711.410
3243 Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba				4.734.197
<b>066.01.06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>				<b>401.465.476</b>
3246 Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas P4GN di Daerah				234.808.358
3247 Penyelenggaraan Advokasi				7.302.530
3248 Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif				4.128.181
3249 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN				16.197.518
3250 Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum				2.825.329
3251 Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi				10.751.400
3252 Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara Laut Darat dan Lintas Darat				8.850.587
3253 Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri				4.670.008
3254 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Alami				3.676.096
3255 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Sintetis				3.314.237
3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba				5.500.000
3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat				9.830.914
3258 Pengawasan Tahanan Barang Bukti dan Penyidikan dan Pengelolaan Aset				4.109.054
3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah				8.505.020
3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat				7.000.000
3261 Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran				4.771.901
3262 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor				2.900.000
4020 Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba				62.324.343
<b>JUMLAH</b>				<b>703.121.464</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 067  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
067.01	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL			2.445.935.657
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			211.338.679
		067.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPDT		211.338.679
			3263 Penyelenggaraan Hukum dan Humas	41.161.829
			3264 Penyelenggaraan Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri	45.678.001
			3265 Penyelenggaraan Pelayanan Umum	117.452.386
			3266 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara KPDT	7.046.463
		067.01.06 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		2.234.596.978
			3267 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Sumber Daya Hayati di Daerah Tertinggal	15.000.000
			3269 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Kesehatan Dasar Lanjutan Daerah Tertinggal	305.355.000
			3271 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan dan Ketrampilan di Daerah Tertinggal	128.905.000
			3273 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Daerah Tertinggal	20.500.000
			3274 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Daerah Tertinggal	24.550.000
			3275 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal	28.400.000
			3276 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Daerah Tertinggal	45.200.000
			3277 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal	83.200.000
			3278 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal	45.070.000
			3279 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal	290.203.475
			3280 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Daerah Tertinggal	20.590.000
			3281 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pendanaan dan Kemitraan Usaha Daerah Tertinggal	147.450.000
			3282 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Investasi Ekonomi Daerah Tertinggal	15.920.000
			3283 Pengembangan Jaringan Corporate Social Responsibility (CSR)	13.500.000
			3284 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Lembaga Perekonomian Daerah Tertinggal	15.400.000
			3285 Peningkatan Kapasitas Enterpreneur Masyarakat	10.390.000
			3286 Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Komoditas Unggulan	150.079.591
			3287 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lokal	23.700.000
			3288 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal Terdepan Terluar dan Pasca Konflik	10.295.052
			3289 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat Daerah Tertinggal	19.060.000
			3290 Pengembangan Kebijakan Koordinasi Dan Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga Sosial dan Budaya di Daerah Tertinggal	27.150.000
			3292 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	14.075.000
			3293 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Ketenagakerjaan di Daerah Tertinggal	20.450.000
			3294 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal	16.850.000
			3295 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan di Daerah Tertinggal	203.151.509
			3296 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Daerah Tertinggal di Kawasan Perbatasan	110.984.550
			3297 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Daerah Pasca Bencana Alam dan Sosial di Daerah Tertinggal	58.660.901
			3298 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di Daerah Tertinggal	322.475.000
			3299 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah Strategis	8.175.000
			4050 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Sumber Daya Mineral Energi dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	18.030.000
			5205 Pengembangan Kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tertinggal	21.826.900
JUMLAH				2.445.935.657





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 068  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>068.01 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL</b>				<b>2.522.866.646</b>
	<b>07 KESEHATAN</b>			<b>2.522.866.646</b>
		<b>068.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN</b>		<b>130.094.590</b>
			3300 Pengelolaan Hukum Organisasi dan Humas	5.332.637
			3301 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	8.036.790
			3302 Perencanaan Program dan Anggaran	9.089.345
			3303 Pengelolaan Administrasi Pegawai	5.213.572
			3304 Pengelolaan Administrasi Umum	102.422.246
		<b>068.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN</b>		<b>5.369.905</b>
			3306 Peningkatan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum	1.568.753
			3307 Peningkatan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan	1.803.662
			3308 Peningkatan Pengawasan Program	1.997.490
		<b>068.01.04 Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN</b>		<b>31.787.220</b>
			3309 Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	12.957.036
			3310 Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	7.075.370
			3311 Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	5.872.303
			3312 Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana	5.882.511
		<b>068.01.06 Program Kependudukan dan KB</b>		<b>2.355.614.931</b>
			3313 Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB	145.773.259
			3314 Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB	4.686.017
			3315 Peningkatan Kemitraan Dengan Lintas Sektor Pemerintah dan Swasta serta Pemerintah Daerah	4.646.326
			3316 Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah	496.071.261
			3317 Pembinaan Keluarga Bahita dan Anak	5.734.398
			3318 Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan	6.617.080
			3319 Pembinaan Ketahanan Remaja	5.238.552
			3320 Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	3.667.023
			3322 Peningkatan Kesertaan KB Galciltas Wilayah Khusus dan Sasaran Khusus	10.574.804
			3323 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	3.841.956
			3324 Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	3.881.790
			3325 Kerja Sama Pendidikan Kependudukan	3.860.429
			3326 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	3.844.512
			3327 Peningkatan Kemandirian dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Swasta	5.057.000
			3328 Analisis Dampak Kependudukan	4.160.957
			3329 Perencanaan Pengendalian Penduduk	4.321.723
			3330 Penyediaan Teknologi Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB	6.295.857
			3331 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi	1.637.341.987
<b>JUMLAH</b>				<b>2.522.866.646</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 074  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
074.01 KOMNAS HAM				66.656.303
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			42.212.886
		074.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM		42.212.886
			3335 Pengembangan Perencanaan dan Kerja Sama Komnas HAM	6.024.996
			3336 Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM	36.187.890
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			24.443.417
		074.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM		24.443.417
			3332 Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	4.627.278
			3333 Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	11.509.009
			3334 Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	8.307.130
JUMLAH				66.656.303





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 075  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>075.01 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA</b>				<b>1.432.871.062</b>
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>1.432.871.062</b>
		<b>075.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bmkg</b>		<b>294.858.673</b>
			3337 Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma BMKG	21.141.964
			3338 Perencanaan Hukum Kerja Sama Organisasi dan Humas BMKG	15.630.911
			3339 Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Tarif Program dan Anggaran Monitoring dan Evaluasi BMKG	12.554.394
			3340 Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Keuangan Perlengkapan Tata Usaha dan Rumah Tangga BMKG	183.945.427
			3341 Pengawasan Internal BMKG	13.545.393
			3342 Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia BMKG	29.270.584
			3343 Penelitian dan Pengembangan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	18.770.000
		<b>075.01.06 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika</b>		<b>1.138.012.389</b>
			3344 Pengelolaan Database BMKG	24.474.065
			3345 Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	79.048.533
			3346 Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	66.574.792
			3347 Pengelolaan Instrumentasi Rekayasa dan Kalibrasi BMKG	54.696.713
			3348 Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG	53.225.736
			3349 Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG	130.178.943
			3350 Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	269.879.145
			3352 Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG	29.793.730
			3353 Pengelolaan Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG	27.626.825
			3354 Pengembangan dan Pengelolaan Upt BMKG	402.513.907
<b>JUMLAH</b>				<b>1.432.871.062</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 076  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
076.01	KOMISI PEMILIHAN UMUM			13.880.947.578
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			13.880.947.578
		076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU		5.535.926.674
			3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	564.009.328
			3356 Pengelolaan Data Dokumentasi Pengadaan Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3.536.642.464
			3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	841.017.018
			3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	167.654.632
			3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	415.103.232
			3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	11.500.000
		076.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU		15.000.000
			3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	15.000.000
		076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		8.330.020.904
			3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	216.649.019
			3364 Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	8.113.371.885
JUMLAH				13.880.947.578





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 077  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI				208.183.647
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			108.669.628
		077.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI		96.680.307
			3366 Pelayanan Hubungan Masyarakat Kerjasama Keprotokolan TU Kepaniteraan dan Risalah	14.111.116
			3367 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Evaluasi Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana	1.657.165
			3368 Penyelenggaraan Penelitian Pengkajian Perkara Perpustakaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	8.453.025
			3369 Pengelolaan Kerumahtanggaan Pengadaan Perlengkapan Arsip dan Ekspedisi	40.587.409
			5238 Pengelolaan Keuangan Administrasi Hakim dan Kepegawaian	31.871.592
		077.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI		11.989.321
			3370 Pembangunan Rehabilitasi Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana	840.000
			3371 Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung	11.149.321
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			99.514.019
		077.01.06 Program Penanganan Perkara Konstitusi		86.778.643
			3372 Penanganan Perkara PUU SKLN PHPU Legislatif Pilpres Pilgub Pilbup Walikota dan Perkara Lainnya	86.778.643
		077.01.07 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara		12.735.376
			3373 Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	12.735.376
JUMLAH				208.183.647



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014**

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 078  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
		<b>078.01 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN</b>		<b>59.115.283</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>59.115.283</b>
		<b>078.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK</b>		<b>38.702.721</b>
			3374 Pengawasan Internal PPATK	312.704
			3375 Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	24.085.193
			3376 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Organisasi dan Ketatalaksanaan PPATK	2.867.863
			3377 Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan PPATK	11.436.961
		<b>078.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK</b>		<b>3.000.000</b>
			3378 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PPATK	3.000.000
		<b>078.01.06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan</b>		<b>17.412.562</b>
			3379 Pengelolaan Bidang Hukum PPATK	2.189.081
			3380 Pelaksanaan Kerja Sama dan Humas PPATK	3.034.191
			3381 Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	7.652.446
			3382 Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor	1.038.030
			3383 Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor	859.295
			3384 Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat	654.493
			5232 Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU	1.985.026
<b>JUMLAH</b>				<b>59.115.283</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 079  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
079.01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA			993.005.089
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			202.302.471
		079.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI		202.302.471
			3385 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Penelitian dan Pemasyarakatan Iptek	8.689.512
			3386 Penataan Pengembangan Organisasi dan SDM	7.714.800
			3387 Perencanaan Penganggaran Verifikasi dan Perbendaharaan	23.815.639
			3388 Peningkatan Pengawasan Audit dan Sistem Akuntabilitas Kinerja	5.273.061
			3389 Pengukuran dan Penelitian Perkembangan Iptek	10.436.210
			3390 Pembinaan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Peneliti	19.258.495
			3391 Penatausahaan Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	127.114.754
	04 FUNGSI EKONOMI			790.702.618
		079.01.06 Program Penelitian Penguasaan dan Pemanfaatan Iptek		790.702.618
			3392 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	14.283.784
			3393 Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah	40.375.639
			3394 Pengembangan Inovasi	6.465.733
			3395 Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia-Kebun Raya Baru	7.000.000
			3396 Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia-Kebun Raya	74.181.602
			3397 Penelitian dan Penguatan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian	11.627.216
			3398 Litbang Pupuk Organic Dari Mikroba Hayati Indonesia	2.410.178
			3400 Penelitian Biologi	123.745.193
			3401 Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler	2.188.542
			3402 Penelitian Bioteknologi Peternakan Modern	6.233.224
			3403 Penelitian Bioteknologi	24.835.661
			3404 Penelitian Ekonomi	15.995.470
			3405 Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi	51.576.046
			3406 Penelitian Fisika	31.784.362
			3408 Penelitian Geoteknologi	28.516.325
			3409 Penelitian Informatika	9.945.187
			3410 Penelitian dan Pengembangan KIM	26.355.214
			3411 Pengembangan dan Perlindungan Kekayaan Budaya	1.272.369
			3412 Penelitian Masyarakat dan Budaya	8.890.856
			3413 Penelitian Kependudukan	31.010.860
			3414 Penelitian Konversi Energi	3.260.378
			3415 Penelitian Kimia	44.165.845
			3416 Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat)	15.342.900
			3417 Penelitian Metalurgi	18.273.751
			3419 Penelitian Oseanografi	134.631.554
			3420 Penelitian Politik	9.266.593
			3421 Penelitian Sumber Daya Regional	4.201.768
			3422 Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik	18.456.065
			3423 Penelitian Kebumihan-Karang Sambung	4.434.139
			3424 Pengembangan Penerbitan Ilmiah	4.715.591
			3425 Pengembangan Instrumentasi	6.516.299
			3426 Penelitian Biomaterial	8.744.274
JUMLAH				993.005.089



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 080  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
080.01		BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL		667.285.816
	01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		650.285.816
		080.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan		91.634.065
			3427 Penyelenggaraan Bantuan Hukum Humas Kerja Sama Pengamanan dan Penyusunan Peraturan Perundangan	3.502.877
			3428 Perencanaan Program Penyusunan Anggaran dan Evaluasi Program	5.164.455
			3429 Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	4.064.951
			3430 Pengelolaan Keuangan Perlengkapan Rumah Tangga dan Ketatausahaan	46.437.777
			3431 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur	5.218.118
			3432 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan BATAN	20.122.452
			3433 Pelaksanaan Standardisasi Jaminan Mutu Nuklir Akreditasi dan Sertifikasi	7.123.435
		080.01.06 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir Isotop dan Radiasi		558.651.751
			3435 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi	57.102.505
			3436 Diseminasi dan Kemitraan Hasil Litbang Iptek Nuklir	31.685.920
			3437 Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir	53.686.502
			3438 Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi Nuklir	19.234.051
			3439 Pengembangan Eksplorasi dan Teknologi Pengelolaan Bahan Galian Nuklir	31.110.834
			3440 Pengembangan Informatika Nuklir	1.876.418
			3441 Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	74.406.362
			3442 Pengoperasian dan Pemanfaatan Reaktor Serba Guna	39.322.587
			3443 Perekayasaan Perangkat dan Fasilitas Nuklir	22.390.830
			3444 Pengembangan Sains dan Teknologi Akselerator Teknologi Proses dan Pengelolaan Reaktor Riset	50.662.401
			3445 Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir	34.639.395
			3446 Pengembangan Sains dan Teknologi Bahan Maju Dengan Iptek Nuklir	25.595.851
			3447 Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir Radioekologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi	36.638.801
			3448 Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif	24.691.101
			3449 Pengembangan Sains dan Teknologi Nuklir Terapan dan Revitalisasi Reaktor Riset	33.902.661
			3450 Pengembangan Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir	21.705.532
	10	FUNGSI PENDIDIKAN		17.000.000
		080.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan		17.000.000
			3434 Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	17.000.000
JUMLAH				667.285.816





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 081  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
081.01	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI			768.191.792
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			14.000.000
		081.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT		14.000.000
			5206 Pengadaan dan Peningkatan Fasilitas Laboratoria	9.200.000
			5207 Pembangunan dan Pengembangan fasilitas BPPT	4.800.000
	04 FUNGSI EKONOMI			754.191.792
		081.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT		333.238.118
			3451 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT	2.122.181
			3452 Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Pengelolaan Perbendaharaan Verifikasi dan Akuntansi Keuangan BPPT	238.232.600
			3453 Dukungan Manajemen Layanan Sistem Informasi dan Standardisasi BPPT	4.111.348
			3454 Dukungan Manajemen Perencanaan Program dan Kegiatan BPPT	13.771.426
			3455 Dukungan Manajemen dan Administrasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi BPPT	4.100.221
			3456 Dukungan Manajemen Layanan Umum dan Kehumasan BPPT	70.900.342
		081.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT		1.000.000
			3457 Peningkatan dan Pembangunan Laboratorium BPPT Terpadu	1.000.000
		081.01.06 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi		419.953.674
			3458 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi	22.541.307
			3459 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kekuatan Struktur	29.955.190
			3460 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pati	12.967.646
			3461 Dukungan Manajemen Pelayanan Jasa Teknologi	45.797.667
			3462 Pengkajian dan Penerapan Jaringan Informasi Iptek	11.260.483
			3463 Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi	6.882.286
			3464 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Mesin Perkakas Teknik Produksi dan Otomasi	5.191.380
			3465 Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi	14.492.215
			3466 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Obat Generik dan Obat Herbal	2.940.409
			3467 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dinamika Pantai	8.303.976
			3468 Pengkajian Penerapan Teknologi Polimer	9.766.979
			3469 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi	6.708.138
			3470 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Remediasi Lingkungan	3.992.442
			3471 Pengkajian Penerapan dan Pelayanan Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi	15.300.791
			3473 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan	35.158.326
			3474 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Difusi Teknologi	1.844.606
			3475 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi	1.989.867
			3476 Peningkatan Kemandirian Daya Saing Industri dan Umkm Berbasis Teknologi	2.040.800
			3478 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri	6.464.010
			3480 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bioindustri	2.602.987
			3481 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.992.725
			3482 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farmasi dan Medika	1.738.140
			3485 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.648.149
			3487 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Manufaktur	5.346.524
			3488 Pengembangan Pupuk Berimbang	1.579.994
			3489 Pengkajian dan Penerapan Teknologi industri Proses	4.520.564
			3490 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan	5.994.921
			3493 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam	2.355.240
			3494 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Untuk Transportasi Masal	3.258.509
			3495 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri dan Sistem Transportasi	3.230.334
			3496 Pengembangan PLTP Skala Kecil	5.014.075
			3498 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi dan Konservasi Energi	6.852.114
			3500 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan	5.491.821
			3501 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material	5.391.698
			3503 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Pertanian	9.595.036
			3506 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi	5.832.960
			3507 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Reduksi Risiko Bencana	3.593.790
			3508 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sumber Daya Mineral	4.872.983
			3509 Dukungan Manajemen Diklat SDM BPPT dan Pembinaan Nasional Jabfung Perekayasa dan Teknis Litkayasa	6.315.853
			3510 Pengkajian dan Penelitian Teknologi Hidrodinamika	13.885.980
			3511 Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global	1.722.505
			3512 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca	40.684.317
			3513 Pengkajian Penerapan dan Pelayanan Teknologi Aerodinamika dan Getaran	13.164.748
			3514 Pengkajian Penerapan dan Pelayanan Teknologi Keramik Seni	5.824.017
			3515 Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi	3.845.172
JUMLAH				768.191.792



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 082  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
082.01	L A P A N			690.157.599
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			565.019.545
		082.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan		69.662.630
			3516 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur (Inspektorat)	5.427.438
			3517 Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Kedirgantaraan	11.961.861
			3518 Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Organisasi Ketatalaksanaan dan Hukum (Biro Renor)	10.205.788
			3519 Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Sumber Daya dan Tata Usaha	30.393.461
			3520 Pelayanan Pengguna Berbasis Teknologi Kedirgantaraan (PUSFATEKGAN)	11.674.082
		082.01.06 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa		495.356.915
			3521 Pengembangan Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan	8.656.985
			3525 Pengembangan Sains Antariksa	31.003.711
			3530 Pengembangan Sains Atmosfer	17.796.778
			3532 Pengembangan Teknologi Penerbangan	330.227.067
			3533 Pengembangan Teknologi Satelit	41.350.037
			3534 Pengembangan Teknologi Roket	66.322.337
	05 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP			125.138.054
		082.01.06 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa		125.138.054
			3522 Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	101.946.763
			3531 Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh	23.191.291
<b>JUMLAH</b>				<b>690.157.599</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 083  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
083.01	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL			729.651.464
	05 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP			729.651.464
		083.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial		154.685.648
			3535 Pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan	82.965.124
			3536 Penyelenggaraan Perencanaan Kepegawaian dan Organisasi serta Hukum	37.419.238
			3538 Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara	3.197.050
			3539 Penyelenggaraan Promosi Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk	31.104.236
		083.01.06 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial		574.965.816
			3540 Pemetaan Tata Ruang dan Atlas	23.833.228
			3541 Pembangunan Jaringan Kontrol Geodesi dan Geodinamika	21.052.800
			3543 Pemetaan Batas Wilayah	16.460.400
			3544 Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai	17.264.100
			3545 Pemetaan Rupabumi dan Toponim	364.507.521
			3546 Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial	9.460.000
			3547 Pemetaan dan Integrasi Tematik	30.137.800
			3548 Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial	92.249.967
<b>JUMLAH</b>				<b>729.651.464</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 084  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
084.01	BADAN STANDARISASI NASIONAL			84.560.083
	04 FUNGSI EKONOMI			84.560.083
		084.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN		42.098.250
			3549 Peningkatan Pelayanan Hukum Organisasi dan Humas BSN	10.105.558
			3550 Peningkatan Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha BSN	31.060.160
			3551 Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bsn	932.532
		084.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN		2.928.196
			3552 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Bsn	2.928.196
		084.01.06 Program Pengembangan Standardisasi Nasional		39.533.637
			3553 Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4.000.000
			3554 Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	8.385.206
			3555 Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	3.821.795
			3556 Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi	3.190.189
			3557 Kerja Sama Standardisasi	4.025.644
			3558 Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi	6.681.853
			3559 Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	1.857.279
			3560 Perumusan Standar	2.706.288
			3561 Peningkatan Penerapan Standar	4.865.383
JUMLAH				84.560.083





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 085  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
085.01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR			90.511.416
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			90.511.416
		085.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN		65.979.764
			3562 Pengembangan dan Peningkatan Sistem Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	3.974.591
			3563 Peningkatan Kapabilitas Manajemen Hukum dan Informasi Publik	5.923.300
			3564 Pengembangan dan Perencanaan Program Kerja Sama dan Pengelolaan Data dan Informasi	7.800.800
			3565 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum	47.092.973
			3566 Pengawasan Internal	1.188.100
		085.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN		1.000.000
			3567 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.000.000
		085.01.06 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir		23.531.652
			3568 Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	4.161.300
			3569 Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan Keamanan dan Seigard Instalasi dan Bahan Nuklir	2.477.700
			3570 Penyelenggaraan dan Pengembangan Keteknikan Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir	3.587.000
			3571 Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	1.325.700
			3572 Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Instalasi dan Bahan Nuklir	2.114.100
			3573 Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	5.763.652
			3574 Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	1.399.400
			3575 Pengkajian Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	1.520.800
			3576 Pengkajian Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	1.182.000
JUMLAH				90.511.416



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 086  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
086.01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA			221.700.397
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			221.700.397
		086.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN		133.748.993
			3577 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Hukum Humas Dan Keprotokolan Dalam Lingkup LAN	2.746.414
			3578 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN	79.416.142
			3579 Pengawasan dalam Rangka Akuntabilitas Publik	500.000
			3580 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN	8.819.126
			3581 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN	0.783.949
			3582 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN	5.592.442
			3583 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN	3.875.973
			3584 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta	9.722.021
			3585 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung	6.036.673
			3586 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar	7.256.253
		086.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN		20.000.000
			3591 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN	20.000.000
		086.01.06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara		46.287.162
			3595 Pengembangan Program Dan Pembinaan Diklat	4.621.535
			3596 Pembinaan Widyaiswara	742.932
			3597 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN	8.129.027
			3598 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN	8.191.352
			3599 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN	2.681.776
			3600 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN	578.692
			3601 Promosi Inovasi Dan Pengembangan Kapasitas	544.210
			3602 Pengkajian Sistem Dan Hukum Administrasi Negara	480.897
			3603 Inovasi Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur	717.600
			3604 Pengkajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah	773.537
			3605 Pengkajian Reformasi Administrasi	776.754
			3606 Pembinaan Analisis Kebijakan	700.339
			3607 Inovasi Pelayanan Publik	388.013
			3608 Inovasi Tata Pemerintahan	408.183
			3609 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional	13.698.810
			3610 Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional	2.853.505
	10 FUNGSI PENDIDIKAN			21.664.242
		086.01.06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara		21.664.242
			3611 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta	9.459.400
			3612 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung	5.987.561
			3613 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar	6.217.281
JUMLAH				221.700.397





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 087  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
087.01	ARSIP NASIONAL			117.043.549
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			117.043.549
		087.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia		91.387.216
			3614 Peningkatan Layanan Hukum Pembinaan Organisasi dan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Pegawai di Lingkungan Anri	2.685.370
			3615 Peningkatan Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran Evaluasi dan Pelaporan Ketatausahaan Pimpinan serta Hubungan Masyarakat di Lingkungan Anri	2.985.188
			3616 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Anri	85.167.383
			3617 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Anri	549.073
		087.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI		2.580.500
			3618 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan ANRI	2.580.500
		087.01.06 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional		23.075.833
			3619 Pelaksanaan Akreditasi dan Profesi Kearsipan	818.558
			3620 Penilaian dan Akuisisi Arsip	1.519.172
			3621 Pembinaan Kearsipan Daerah	1.941.500
			3622 Pembinaan Kearsipan Pusat	1.700.410
			3623 Pemanfaatan Arsip	2.443.950
			3624 Pengolahan Arsip Statis	1.029.996
			3625 Preservasi Kearsipan	2.298.410
			3626 Peningkatan Jasa Sistem dan Pembenahan Penyimpanan dan Perawatan Arsip	4.212.704
			3627 Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	5.503.450
			3628 Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan	790.531
			3629 Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional	817.152
JUMLAH				117.043.549



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 088  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
088.01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA			502.261.594
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			502.261.594
		088.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN		379.209.529
			3630 Penyelenggaraan Humas Protokol dan Operasional Pimpinan	2.016.984
			3631 Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BKN	5.107.734
			3632 Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan BKN	205.176.915
			3633 Perencanaan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bkn dan Kerja Sama Antar Instansi dalam dan Luar Negeri	3.925.694
			3634 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	29.720.653
			3635 Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	1.492.652
			3636 Penyelenggaraan Operasional dan Tugas Teknis Lainnya Kantor Regional I S/D XII BKN	131.768.897
		088.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN		33.119.035
			3637 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.500.000
			3638 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Regional I s/d XII	31.619.035
		088.01.06 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara		89.933.030
			3639 Penyelenggaraan Pertimbangan Kepegawaian	900.000
			3640 Perumusan Kebijakan di Bidang Gaji Tunjangan dan Kesejahteraan	674.024
			3641 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	924.425
			3642 Perumusan Kebijakan di Bidang Jabatan Karier	945.228
			3643 Penetapan Persetujuan dan Pertimbangan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Lainnya	1.093.715
			3644 Perumusan Kebijakan di Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian	1.014.642
			3645 Pelayanan Administrasi Pengadaan PNS	812.100
			3646 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian PNS I	1.866.500
			3647 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian PNS II	1.773.070
			3648 Pengembangan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Kepegawaian	18.487.463
			3649 Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah I	1.460.050
			3650 Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah II	1.227.520
			3651 Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah III	1.373.625
			3652 Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database Kepegawaian	5.940.139
			3653 Penetapan Sk dan Pertek Pensiun PNS dan Pejabat Negara serta Janda/Dudanya	2.824.695
			3654 Perencanaan Kepegawaian dan Formasi	1.662.400
			3655 Pengembangan Sistem Rekrutment Pegawai Negeri Sipil	2.886.946
			3656 Standardisasi dan Kompetensi PNS	505.030
			3657 Penetapan Status dan Kedudukan Kepegawaian	671.390
			3658 Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Kantor Regional I - XII BKN	28.612.249
			3659 Analisis/Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum	550.838
			3660 Perumusan Kebijakan di Bidang Kinerja Pegawai	920.000
			3661 Analisis/Evaluasi Implementasi Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian	307.240
			3662 Pengkajian dan Penelitian Bidang Kepegawaian	1.025.235
			3663 Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS	1.385.384
			3664 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	10.089.122
JUMLAH				502.261.594





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 089  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
089.01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN			1.264.272.374
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			1.264.272.374
		089.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP		944.118.151
			3665 Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Kehumasan	3.324.973
			3666 Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi	15.364.439
			3667 Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah	4.613.261
			3668 Penyusunan dan Evaluasi Rencana	81.418.998
			3669 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan Biro Umum	265.890.579
			3670 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP	31.287.971
			3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	542.217.930
		089.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-BPKP		62.124.431
			3677 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP Pusat	4.327.447
			3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP	57.796.984
		089.01.06 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem		258.029.792
			3671 Pengawasan Intern BPKP	1.796.132
			3672 Penyelenggaraan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Pemerintah/Presiden dan Internal BPKP	16.662.222
			3673 Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Tata Kelola APIP	5.108.678
			3674 Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	46.608.269
			3675 Penelitian dan Pengembangan Pengawasan	1.569.815
			3679 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait Investigasi pada BUMN/D	1.392.000
			3680 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan	978.000
			3681 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait Investigasi pada Kementerian/Lembaga	2.560.000
			3682 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis Jasa Konstruksi dan Perdagangan	778.202
			3683 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur	865.457
			3684 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Perhubungan Pariwisata Kawasan Industri dan Jasa Lainnya serta Kementerian	1.105.152
			3685 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah	878.933
			3686 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi	977.934
			3687 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi	989.923
			3688 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP K/L Bidang Fiskal dan Investasi (OPN)	7.138.153
			3689 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Fiskal dan Investasi-SPIP	8.072.528
			3690 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Industri dan Distribusi	1.467.403
			3691 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.977.963
			3692 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara	1.604.251
			3693 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian Lainnya	1.473.962
			3694 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan	6.270.814
			3695 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Palsoskam Lainnya	2.976.259
			3696 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan	1.347.360
			3697 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali	1.720.720
			3698 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Nusa Tenggara Maluku dan Papua	1.616.800



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 089  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

(Dalam Ribuan Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			3699 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada Kegiatan yang Dibiayai Dari Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	1.269.670
			3700 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam	1.365.286
			3701 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	134.457.904
<b>JUMLAH</b>				<b>1.264.272.374</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 090  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>090.01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>				<b>605.538.975</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>522.933.385</b>
		<b>090.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan</b>		<b>522.933.385</b>
			3702 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan	23.416.249
			3703 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	20.465.741
			3704 Peningkatan Pengelolaan Keuangan	178.712.396
			3705 Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan	74.387.401
			3706 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan	12.071.775
			3707 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan	26.183.180
			3708 Pengelolaan Pendidikan / Pelatihan Fungsional dan Teknis Kemetrolagian	26.845.704
			3709 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	20.142.941
			3710 Koordinasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kementerian Perdagangan	5.792.518
			3711 Penanganan Anti-Dumping dan Tindakan Imbalan	11.381.016
			3712 Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)	7.881.406
			3713 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan	49.390.878
			3714 Penyelenggaraan Atase Perdagangan	58.500.000
			3973 Fasilitasi Pelayanan Hukum Perdagangan Internasional	4.985.060
			5112 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang	2.777.120
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>82.605.590</b>
		<b>090.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan</b>		<b>82.605.590</b>
			3718 Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	82.605.590
<b>090.02 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>				<b>893.364.382</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>114.862.660</b>
		<b>090.02.09 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri</b>		<b>114.862.660</b>
			3719 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan dalam Negeri	52.998.771
			5090 Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan	61.863.889
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>778.501.722</b>
		<b>090.02.09 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri</b>		<b>778.501.722</b>
			3716 Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah	188.449.919
			3720 Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok	65.281.450
			3721 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	441.000.000
			3722 Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan	18.770.353
			3974 Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah	65.000.000
<b>090.03 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>				<b>189.629.632</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>51.762.207</b>
		<b>090.03.07 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri</b>		<b>51.762.207</b>
			3729 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri	51.762.207
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>137.867.425</b>
		<b>090.03.07 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri</b>		<b>137.867.425</b>
			3728 Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	876.550
			3730 Peningkatan dan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	56.500.000
			3731 Peningkatan dan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	4.720.286
			3736 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor	21.400.000
			3737 Pengelolaan Impor	8.300.000
			3745 Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	6.006.620
			3975 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	40.063.969
<b>090.04 DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL</b>				<b>96.534.551</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>28.797.142</b>
		<b>090.04.08 Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional</b>		<b>28.797.142</b>
			3739 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional	28.797.142
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>67.737.409</b>
		<b>090.04.08 Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional</b>		<b>67.737.409</b>
			3738 Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional	36.680.325
			3740 Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan Jasa	7.193.510
			3741 Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Multilateral	4.819.319
			3742 Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN	8.141.380
			3743 Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral	5.588.092
			3744 Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya	5.314.783
<b>090.05 INSPEKTORAT JENDERAL</b>				<b>30.720.088</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>21.141.021</b>
		<b>090.05.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan</b>		<b>21.141.021</b>
			3746 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	21.141.021
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>9.579.067</b>
		<b>090.05.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan</b>		<b>9.579.067</b>
			3747 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I	2.474.708
			3748 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah II	2.323.577





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 090  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(Dalam Ribu Ropiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			3749 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah III	2.362.352
			3750 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah IV	2.418.430
<b>090.06 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL</b>				<b>239.421.861</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>31.883.617</b>
		<b>090.06.06 Program Pengembangan Ekspor Nasional</b>		<b>31.883.617</b>
			3752 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PEN	31.883.617
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>207.538.244</b>
		<b>090.06.06 Program Pengembangan Ekspor Nasional</b>		<b>207.538.244</b>
			3717 Pengembangan Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif	8.418.315
			3751 Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor	108.406.894
			3753 Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	6.293.993
			3754 Pengembangan Promosi dan Citra	57.522.267
			3755 Kerja Sama Pengembangan Ekspor	6.175.859
			3756 Pengembangan SDM Bidang Ekspor	20.720.916
<b>090.07 BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b>				<b>66.606.684</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>41.263.968</b>
		<b>090.07.10 Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi</b>		<b>41.263.968</b>
			3758 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	41.263.968
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>25.342.716</b>
		<b>090.07.10 Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi</b>		<b>25.342.716</b>
			3759 Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	5.233.975
			3760 Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	8.142.654
			3761 Peningkatan Pelayanan Hukum	5.713.170
			3762 Pengkajian dan Pengembangan PBK SRG dan PL	6.252.917
<b>090.08 BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN</b>				<b>53.482.946</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>22.522.946</b>
		<b>090.08.04 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan</b>		<b>22.522.946</b>
			3763 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	22.522.946
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>30.960.000</b>
		<b>090.08.04 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan</b>		<b>30.960.000</b>
			3764 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen	4.250.000
			3765 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengamanan Perdagangan	4.250.000
			3766 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kerja Sama Perdagangan Internasional	4.250.000
			3767 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan	18.210.000
<b>090.09 DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>				<b>179.863.744</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>74.949.856</b>
		<b>090.09.11 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen</b>		<b>74.949.856</b>
			3732 Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	14.803.308
			3733 Peningkatan Pengawasan Mutu Barang	23.967.678
			3734 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	6.731.457
			3735 Peningkatan Pelayanan Sertifikasi Mutu	6.183.551
			3977 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	23.263.862
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>104.913.888</b>
		<b>090.09.11 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen</b>		<b>104.913.888</b>
			3715 Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan	10.910.000
			3724 Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen	14.774.900
			3725 Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional	9.510.920
			3726 Peningkatan Tertib Ukur	51.714.742
			3727 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	18.003.326
<b>JUMLAH</b>				<b>2.355.162.864</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 091  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>091.01 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT</b>				<b>4.001.327.698</b>
<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>				<b>271.854.569</b>
<b>091.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat</b>				<b>198.114.569</b>
3768 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				139.609.579
3769 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman				27.254.990
3770 Peningkatan Produk Hukum dan Kepegawaian				19.750.000
3771 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perumahan Rakyat				7.000.000
3772 Dukungan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman				4.500.000
<b>091.01.06 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				<b>73.740.000</b>
5214 Pemeliharaan Pengamanan Pemanfaatan Penghunian Pengelolaan dan Serah Terima Aset Rusunawa dan Rumah Khusus				73.740.000
<b>06 FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>				<b>3.729.473.129</b>
<b>091.01.06 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				<b>3.493.161.600</b>
3773 Perencanaan Pemrograman dan Penganggaran Pendataan serta Sosialisasi Pengembangan Kawasan				19.819.450
3774 Fasilitasi Penyediaan Prasarana Kawasan				6.413.211
3775 Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman				131.225.000
3776 Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga				4.292.571
3778 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh				148.340.000
3779 Pembinaan Pengelolaan Prasarana Kawasan				4.178.167
3780 Pemantauan Evaluasi Pengkajian Analisis dan Pelaporan Kinerja Bidang Pengembangan Kawasan				4.725.601
3781 Perencanaan Perumahan Formal				15.700.000
3782 Dukungan Penyediaan Perumahan Formal				10.800.000
3783 Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa)				1.333.020.600
3784 Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Kerja Sama Kemitraan Perumahan Formal				5.200.000
3785 Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus				269.980.000
3786 Standardisasi Perumahan Formal				6.850.000
3787 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Formal				6.400.000
3788 Perencanaan Penganggaran Pendataan dan Sosialisasi Kebijakan Perumahan Swadaya				5.900.000
3789 Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Perumahan Swadaya				700.000
3791 Kemitraan dan Keswadayaan dalam Penyelenggaraan Perumahan Swadaya				2.100.000
3792 Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya				1.514.565.807
3793 Peningkatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya				200.000
3794 Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya				51.550
3795 Fasilitasi Pra-Sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi				99.643
3796 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Swadaya				2.600.000
<b>091.01.07 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				<b>236.311.529</b>
3797 Perencanaan Kebijakan Program dan Anggaran Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman				11.520.500
3798 Pengembangan Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman				5.150.000
3799 Pengembangan Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi Perumahan dan Kawasan Permukiman				206.885.029
3800 Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-sumber Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman				5.600.000
3801 Evaluasi Pelaporan dan Pengkajian Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman				7.150.000
<b>JUMLAH</b>				<b>4.001.327.698</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 092  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
092.01 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA				1.761.855.098
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			273.736.498
		092.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga		225.703.598
			3802 Penyelenggaraan Kehumasan Pelayanan Hukum dan Kepegawaian	30.582.030
			3803 Perencanaan Penganggaran Pengorganisasian dan Evaluasi Program	30.756.124
			3804 Pengelolaan Keuangan dan Kerumahtanggaan	160.365.444
			3805 Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	4.000.000
		092.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga		48.032.900
			3806 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Biro Umum Kementerian Pemuda dan Olah Raga	48.032.900
	08 FUNGSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			384.569.600
		092.01.08 Program Pembinaan Olahraga Prestasi		384.569.600
			3829 Pemberdayaan Organisasi Olahraga	41.850.000
			3831 Pengembangan Industri Olahraga	11.808.800
			3833 Pembinaan Olahraga Prestasi	330.910.800
	10 FUNGSI PENDIDIKAN			1.103.549.000
		092.01.06 Program Kepemudaan dan Keolahragaan		1.103.549.000
			3807 Pengembangan Tenaga Kepemudaan	17.250.000
			3808 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	35.511.000
			3809 Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda	18.338.240
			3810 Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	105.804.000
			3811 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	30.165.000
			3812 Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan	12.218.800
			3813 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	50.000.000
			3814 Pengembangan Kepramukaan	83.150.000
			3815 Peningkatan Kapasitas Pemuda	16.161.760
			3816 Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda	19.000.000
			3817 Peningkatan Wawasan Pemuda	44.000.000
			3818 Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	43.438.000
			3819 Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	8.100.000
			3820 Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	15.900.000
			3821 Pengembangan Olahraga Pendidikan	16.250.000
			3822 Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan	33.457.000
			3823 Pengembangan Sentra Keolahragaan	140.893.000
			3824 Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan	116.552.000
			3825 Pengembangan Promosi dan Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	90.024.750
			3826 Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan Keolahragaan	9.899.750
			3827 Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga	8.817.800
			3828 Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga	17.088.700
			3830 Pengembangan Pembibitan Olahragawan	154.184.200
			3832 Pengembangan Tenaga Keolahragaan	17.345.000
JUMLAH				1.761.855.098





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 093  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
093.01	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI			559.466.618
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			454.048.672
		093.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK		454.048.672
		3834 Perancangan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum		1.351.000
		3835 Penyelenggaraan Humas dan Protokoler		6.142.627
		3836 Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan		448.701
		3837 Manajemen Sumber Daya Manusia		271.320.247
		3838 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK)		174.786.097
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			105.417.947
		093.01.06 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		105.417.947
		3839 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Penindakan		895.678
		3840 Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi		4.243.251
		3841 Penyidikan Tindak Pidana Korupsi		8.218.000
		3842 Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi		9.026.288
		3843 Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi		6.175.000
		3844 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Pencegahan		550.427
		3845 Pengelolaan LHKPN		3.596.498
		3846 Pengelolaan Gratifikasi		3.648.450
		3847 Penyelenggaraan Pendidikan Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi		12.170.053
		3848 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan KPK serta Pengkajian Sistem Pengelolaan Administrasi di Semua Lembaga Negara dan Pemerintah		9.851.216
		3849 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Informasi dan Data (INDA)		117.679
		3850 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi		32.711.366
		3851 Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI)		7.789.012
		3852 Penyediaan Data dan Informasi Untuk Pemberantasan Korupsi		3.731.992
		3853 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM)		78.665
		3854 Pengawasan Internal KPK		719.662
		3855 Penanganan Pengaduan Masyarakat		1.885.710
<b>JUMLAH</b>				<b>559.466.618</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 095  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
095.01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI			411.119.523
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			411.119.523
		095.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI		350.419.523
			3856 Penatausahaan Organisasi Keanggotaan SDM dan Pengawasan Internal	17.000.000
			3857 Administrasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI	293.144.523
			3859 Pengolahan Data dan Teknologi Informasi	15.200.000
			3860 Pengelolaan dan Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Daerah	1.800.000
			3861 Penyelenggaraan Pengkajian Kebijakan dan Hukum	1.675.000
			5240 Penyelenggaraan Pengawasan Intern	800.000
			5241 Penyelenggaraan Dukungan Teknis Administratif dan Keahlian DPD RI di Daerah Pemilihan	20.800.000
		095.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI		60.700.000
			3862 Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sarana dan Prasarana DPD RI	60.700.000
095.02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH			259.590.000
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			259.590.000
		095.02.06 Program Penguatan Kelembagaan Dpd Dalam Sistem Demokrasi		259.590.000
			3858 Pengelolaan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD RI	38.790.000
			3863 Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Pertimbangan Pengawasan DPD dan Pengembangan Kerja Sama DPD	66.500.000
			3864 Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Pertimbangan Pengawasan DPD dan Fungsi Badan Kehormatan	154.300.000
JUMLAH				670.709.523



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014**

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 100  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL RI

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
100.01	KOMISI YUDISIAL RI			<b>77.720.059</b>
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			<b>52.787.866</b>
		100.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial		<b>50.334.125</b>
			3867 Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perlengkapan Rumah Tangga serta Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	-47.291.700
			3868 Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	3.042.425
		100.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial		<b>2.453.741</b>
			3869 Pengadaan Sarana dan Prasarana (KY)	865.112
			3870 Pengembangan Sistem Informasi dan Database Hakim	1.588.629
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			<b>24.932.193</b>
		100.01.06 Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim		<b>24.932.193</b>
			3866 Penyelenggaraan Investigasi Hakim, Calon Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc	2.668.078
			3871 Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan Peningkatan Kompetensi Hakim	15.931.922
			3872 Seleksi Hakim Agung Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim	6.332.193
<b>JUMLAH</b>				<b>77.720.059</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014**

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 103  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

(Dalam Ribu Ropiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
103.01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA			2.304.367.639
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			2.304.367.639
		103.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB		226.181.931
		3873 Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Telaahan Hukum Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana		5.000.000
		3874 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BNPB		42.680.931
		3875 Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran Pemantauan dan Evaluasi Program		19.301.000
		3876 Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum		28.200.000
		3878 Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana		131.000.000
		103.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB		465.000.000
		3877 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur		465.000.000
		103.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB		17.500.000
		3879 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara BNPB dalam Lingkup Wewenang Inspektorat I		9.500.000
		3880 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara BNPB dalam Lingkup Wewenang Inspektorat II		8.000.000
		103.01.06 Program Penanggulangan Bencana		1.595.685.708
		3881 Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan di Daerah Terkena Bencana		5.000.000
		3882 Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana		120.005.211
		3883 Penyiapan Peralatan dan Logistik di Kawasan Rawan Bencana Direktorat Logistik		87.372.180
		3884 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana		15.754.848
		3885 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana		21.421.250
		3886 Penanganan Pengungsi Akibat Bencana		7.000.000
		3887 Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana		38.887.067
		3888 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana		10.500.000
		3889 Penyiapan Peralatan dan Logistik di Kawasan Rawan Bencana Direktorat Peralatan		275.650.000
		3890 Perbaikan Darurat Bencana dalam Rangka Pemulihan Dini Sarana dan Prasarana Vital di Daerah Terkena Bencana		5.000.000
		3891 Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana		757.745.152
		3892 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana		47.350.000
		3893 Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam		204.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>2.304.367.639</b>

103.01.06



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 104  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
104.01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI			375.047.635
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			267.083.671
		104.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNP2TKI		107.874.722
			3895 Perumusan/Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Publikasi dan Humas (BNP2TKI)	4.870.058
			3896 Administrasi Keuangan Kerumahtanggaan serta Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja (BNP2TKI)	74.686.123
			3897 Penguatan Kelembagaan (Organisasi) dan Kepegawaian (BNP2TKI)	5.129.400
			3898 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Administrasi Kerja Sama Serta Evaluasi dan Laporan (BNP2TKI)	9.932.481
			3899 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Aparatur (BNP2TKI)	6.048.762
			3900 Penelitian Pengembangan dan Pengembangan Sistem Informasi (BNP2TKI)	7.207.898
		104.01.06 Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI		159.208.949
			3894 Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI/UPTP3TKI)	159.208.949
	04 FUNGSI EKONOMI			107.963.964
		104.01.06 Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI		107.963.964
			3901 Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri	3.130.131
			3902 Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I	4.380.131
			3903 Peningkatan Promosi TKI ke Negara Penempatan	4.352.469
			3904 Peningkatan Kerja Sama dan Verifikasi Pelayanan Dokumen	4.380.131
			3905 Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah	8.884.747
			3906 Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan	3.735.640
			3907 Peningkatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan	33.076.309
			3908 Peningkatan Pemberdayaan TKI	12.401.150
			3909 Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan TKI	11.721.864
			3910 Peningkatan Pelayanan Pengaduan	4.865.272
			3911 Peningkatan Mediasi dan Advokasi	10.459.180
			5225 Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II	6.576.940
JUMLAH				375.047.635



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 105  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>105.01 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)</b>				<b>735.646.022</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>28.892.616</b>
		<b>105.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur</b>		<b>28.892.616</b>
			3912 Penyiapan Program Anggaran Pengelolaan Data dan Informasi serta Penyelesaian Peraturan dan Hukum	2.350.000
			3913 Pengembangan Kapasitas Organisasi Tatalaksana Hubungan Masyarakat Kerumahtanggaan dan Keamanan	26.142.616
			3914 Pengelolaan Keuangan serta Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Barang Milik Negara dan LAKIP	330.000
			3915 Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Barang	70.000
	<b>04 FUNGSI EKONOMI</b>			<b>95.294.422</b>
		<b>105.01.06 Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo</b>		<b>95.294.422</b>
			3922 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	2.100.000
			3923 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Luapan Lumpur	37.195.385
			3924 Pembangunan Relokasi Infrastruktur	55.999.037
	<b>05 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>155.943.311</b>
		<b>105.01.06 Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo</b>		<b>155.943.311</b>
			3916 Perencanaan Operasi Luapan Lumpur	1.861.600
			3917 Penanganan Luapan Lumpur	152.735.711
			3918 Mitigasi dan Penanganan Bencana Geologi dan Monitoring Lingkungan	1.346.000
	<b>11 FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL</b>			<b>455.515.673</b>
		<b>105.01.06 Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo</b>		<b>455.515.673</b>
			3919 Perencanaan Sosial	340.000
			3920 Pengelolaan Penanganan Pemulihan Sosial	2.791.200
			3921 Peningkatan dan Pengelolaan Perlindungan Sosial	452.384.473
<b>JUMLAH</b>				<b>735.646.022</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 106  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
106.01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH			145.745.938
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			145.745.938
		106.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP		43.228.971
			3925 Pelayanan Hukum Hubungan Masyarakat Sistem Informasi dan Kepegawaian	3.270.280
			3926 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana	1.486.845
			3927 Pengelolaan Keuangan Operasional Perkantoran dan Pelayanan Tata Usaha	38.471.846
		106.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP		75.448.835
			3928 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	75.448.835
		106.01.06 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		27.068.132
			3929 Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	1.190.750
			3930 Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.128.300
			3931 Pengembangan Sistem dan Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2.135.270
			3932 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional	11.748.233
			3933 Penyusunan Strategi Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	700.000
			3934 Penyusunan Strategi Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan	750.000
			3935 Penyusunan Strategi Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum	750.000
			3936 Penyusunan Sistem Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	1.765.300
			3937 Pemberian Saran Rekomendasi dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa	1.844.820
			3938 Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.140.663
			3939 Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	1.060.750
			3940 Pengembangan Sistem Katalog	2.854.046
JUMLAH				145.745.938



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 107  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
107.01	BADAN SAR NASIONAL			1.902.680.618
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			491.130.940
		107.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional		339.402.696
			3941 Penyusunan Rencana dan Program serta Kerja Sama Teknik Luar Negeri	14.069.886
			3942 Penyusunan Produk Hukum dan Pengaturan Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian	16.991.858
			3943 Pembinaan Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Keuangan	299.642.952
			3945 Pengembangan Sistem Informasi serta Penyediaan Data dan Informasi SAR	4.662.000
			4021 Pengawasan dan Pembinaan Internal Basarnas	4.036.000
		107.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional		151.728.244
			3944 Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan	151.728.244
	04 FUNGSI EKONOMI			1.411.549.678
		107.01.06 Program Pengelolaan Pencarian Pertolongan dan Penyelamatan		1.411.549.678
			3946 Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	997.792.279
			3947 Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasarakatan SAR	35.750.000
			3948 Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR	131.528.846
			3949 Pengelolaan Komunikasi SAR	246.478.553
<b>JUMLAH</b>				<b>1.902.680.618</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 108  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
108.01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA			84.035.163
	04 FUNGSI EKONOMI			84.035.163
		108.01.06 Program Pengawasan Persaingan Usaha		84.035.163
			3950 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha	46.757.839
			3951 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Penyusunan Pranata Hukum	7.101.714
			3952 Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha	4.131.843
			3953 Pengkajian Persaingan Usaha	2.274.696
			3954 Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara Komisi Pengawas Persaingan Usaha	886.897
			3955 Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU	3.726.832
			3956 Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	7.089.175
			3957 Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	6.842.199
			3958 Penilaian Merger dan Akuisisi	3.340.766
			3959 Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU	1.883.202
<b>JUMLAH</b>				<b>84.035.163</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 109  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
109.01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)			331.992.446
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			51.483.700
		109.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS		51.483.700
			3960 Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat	3.600.000
			3961 Dukungan Manajemen serta Prasarana dan Sarana BPWS	37.300.000
			3963 Dukungan Legal Formal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPWS	2.450.000
			3964 Pengembangan Sistem Informasi dan Penyediaan Data	3.883.700
			3965 Dukungan Fasilitasi Untuk Kegiatan BPWS di Jakarta	4.250.000
	04 FUNGSI EKONOMI			280.508.746
		109.01.06 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu		280.508.746
			3966 Perencanaan Umum dan Program Pengembangan Wilayah Suramadu	11.625.000
			3968 Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM	13.725.000
			3969 Promosi Investasi dan Sistem Perizinan Satu Atap	8.055.200
			3970 Penyiapan Kawasan Siap Bangun	102.150.000
			3971 Pengendalian Pembangunan di Wilayah Suramadu	76.476.690
			3972 Pengoperasian dan Pemeliharaan Infrastruktur	68.476.856
JUMLAH				331.992.446



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 110  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
110.01 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA				62.005.395
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			62.005.395
		110.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia		62.005.395
			4051 Perencanaan Pengawasan dan Kerja Sama	9.847.635
			5093 Pengelolaan Administrasi Laporan	8.172.242
			5094 Pengelolaan Keuangan Kepegawaian dan Perlengkapan	43.985.518
<b>JUMLAH</b>				<b>62.005.395</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 111  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
111.01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN			168.918.882
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			168.918.882
		111.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP		69.868.831
			4037 Pelaksanaan dukungan Perencanaan Kerja Sama dan Hukum	43.385.507
			4038 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran	26.483.324
		111.01.06 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan		99.050.051
			4039 Pengelolaan Batas Wilayah Darat	12.595.997
			4040 Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara	9.193.302
			4041 Pengelolaan Lintas Batas Negara	19.050.731
			4042 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	9.840.505
			4043 Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	10.422.500
			4044 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	9.962.356
			4045 Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	9.012.538
			4046 Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan	10.118.000
			4047 Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	8.854.122
<b>JUMLAH</b>				<b>168.918.882</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 112  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
112.01	BPKPB	BATAM		1.066.911.135
	04	FUNGSI EKONOMI		1.066.911.135
		112.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	504.766.500
			5113 Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan	7.241.081
			5114 Pelayanan Kerumahtanggaan Penataan Organisasi dan Bantuan Hukum	109.662.544
			5115 Penyusunan Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian	334.217.309
			5116 Pengelolaan Administrasi Keuangan	7.856.410
			5117 Pelayanan Keprotokolan Kesekretariatan dan Kepustakaan	9.265.689
			5118 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	15.355.985
			5119 Pengelolaan Data Centre dan Sistem Informasi	15.544.779
			5120 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Bidang Teknik dan Pembangunan	883.819
			5121 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Bidang Organisasi dan Kinerja	928.394
			5122 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Bidang Keuangan dan Umum	3.810.490
		112.01.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	562.144.635
			5123 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	22.332.232
			5124 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	196.768.417
			5125 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara	35.279.629
			5126 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Umum	64.860.534
			5127 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	1.483.768
			5128 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	426.931
			5129 Pelayanan Lalu Lintas Barang ke Kawasan PBPB-Batam	6.807.003
			5130 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Lingkungan	201.344.376
			5131 Pelayanan Investasi dan Pemasaran Kawasan PBPB-Batam	10.829.986
			5132 Pelayanan Perijinan Terpadu ke Kawasan PBPB-Batam	7.792.726
			5133 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemukiman dan Perumahan Pekerja	8.718.657
			5134 Pengelolaan Pengamanan Laban dan Asset Investasi	5.500.376
JUMLAH				1.066.911.135



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 113  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
113.01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME			263.563.629
	03 FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN			263.563.629
		113.01.06 Program Penanggulangan Terorisme		263.563.629
			5096 Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan	115.050.000
			5097 Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan	89.445.163
			5098 Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional	14.485.200
			5099 Dukungan Administrasi dan SDM	44.583.266
<b>JUMLAH</b>				<b>263.563.629</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 114  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
		<b>114.01 SEKRETARIAT KABINET</b>		<b>170.999.229</b>
	<b>01 FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>			<b>170.999.229</b>
		<b>114.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet</b>		<b>127.231.587</b>
			5009 Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Wewenang Penetapannya Berada di Tangan Presiden	744.654
			5010 Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengkajian dan Penyusunan Kelembagaan Organisasi dan Ketatalaksanaan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	90.760.440
			5011 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Keuangan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja	2.583.651
			5012 Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Kerumahtanggaan Pemeliharaan Ketatusahaan Keprotokolan dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	30.743.400
			5013 Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Peraturan Perundang-Undangan Persidangan Kepegawaian dan Perpustakaan melalui SIM Arsip dan/atau Dokumen	1.572.048
			5014 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	827.394
		<b>114.01.06 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan</b>		<b>43.767.642</b>
			5015 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Politik dan Hubungan Internasional	744.654
			5016 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Aparatur Negara Komunikasi dan Informatika	802.075
			5017 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pertahanan Keamanan dan Pertanahan	661.915
			5018 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Perundang-Undangan Bidang Politik Hukum dan Keamanan	744.654
			5019 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Ekonomi Makro Keuangan dan Ketahanan Pangan	744.654
			5020 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Industri UKM Perdagangan dan Ketenagakerjaan	620.545
			5021 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Prasarana Riset Teknologi dan Sumber Daya Alam	661.915
			5022 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian	496.436
			5023 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	744.654
			5024 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pendidikan Agama Kesehatan dan Kependudukan	661.915
			5025 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Lingkungan Hidup Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga	533.090
			5026 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat	744.654
			5027 Penyiapan Materi Sidang Kabinet dan Rapat Lainnya yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Rapat Kerja Sekretaris Kabinet	744.654
			5028 Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Sidang Kabinet Rapat dan Pertemuan yang Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	6.619.146
			5029 Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan Berkaitan Dengan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	2.482.180
			5211 Pelaksanaan Tugas Tertentu di Luar Tugas Organisasi Departemen Kementerian dan Instansi Pemerintah Lainnya	25.760.501
<b>JUMLAH</b>				<b>170.999.229</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 115  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
115.01	SEKRETARIAT JENDERAL	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM		3.759.496.500
	01 FUNGSI PELAYANAN UMUM			3.759.496.500
		115.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu		162.860.993
			5156 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Pemilihan Umum	162.860.993
		115.01.06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		3.596.635.507
			5157 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	208.136.328
			5243 Pengembangan Produk Hukum Litbang Pengelolaan Kehumasan dan Pengawasan Internal	52.238.160
			5244 Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	36.875.000
			5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	3.299.386.019
<b>JUMLAH</b>				<b>3.759.496.500</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 116  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
116.01	LEMBAGA	PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA		921.764.046
	01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		921.764.046
		116.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	744.106.997
			5136 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan LPP RRI	657.536.798
			5137 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi LPP RRI	65.906.619
			5138 Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP RRI	4.658.193
			5139 Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Radio Publik	16.005.387
		116.01.06	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	177.657.049
			5141 Perencanaan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru	35.010.650
			5142 Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik	13.872.873
			5143 Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	20.060.708
			5144 Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional	4.873.332
			5145 Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal Regional	97.150.441
			5146 Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI	6.689.045
JUMLAH				921.764.046



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 117  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
117.01	LEMBAGA	PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA		967.630.629
	01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		967.630.629
		117.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	527.522.262
			5147 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan LPP TVRI	386.031.842
			5148 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi LPP TVRI	129.786.292
			5149 Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Tugas di lingkungan LPP TVRI	2.289.101
			5150 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TV Publik	6.000.000
			5151 Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan TV Publik	3.415.027
		117.01.06	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	440.108.367
			5152 Perencanaan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik	118.056.632
			5153 Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik	214.950.080
			5154 Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik	4.666.737
			5155 Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional	102.434.918
<b>JUMLAH</b>				<b>967.630.629</b>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 118  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG

(Dalam Ribu Rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
118.01		BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG		341.349.526
	04	FUNGSI EKONOMI		341.349.526
		118.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan	34.408.840
			5158 Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	1.010.000
			5159 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengelolaan Sistem Informasi	171.440
			5160 Koordinasi Bidang Hukum dan Kehumasan	950.000
			5161 Pelayanan Kesekretariatan Administrasi Umum Administrasi Keuangan Kearsipan Kepustakaan dan Penatausahaan Aset	30.977.400
			5162 Penyusunan Pengelolaan dan Pelayanan SDM	800.000
			5163 Pengawasan Akuntabilitas Terhadap Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Kelembagaan	250.000
			5212 Pengawasan Akuntabilitas Terhadap Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan	250.000
		118.01.06	Program Perencanaan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	306.940.686
			5164 Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	2.214.820
			5165 Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	294.210.356
			5166 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Teknologi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1.362.410
			5167 Penyelenggaraan Promosi dan Kerja Sama Di Bidang Investasi dan Pengembangan Usaha	1.670.000
			5168 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Usaha dan Investasi	6.283.100
			5169 Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pengamanan Aset BPKS	1.200.000
JUMLAH				341.349.526



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 999  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BENDAHARA UMUM NEGARA

(dalam ribu rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>999.01 BA BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH</b>				<b>135.453.200.000</b>
	<b>01 PELAYANAN UMUM</b>			<b>135.453.200.000</b>
		<b>999.01.06 Program Pengelolaan Utang Negara</b>		<b>135.453.200.000</b>
			4061 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Utang	135.453.200.000
			Pembayaran Bunga Utang	135.453.200.000
			1. Dalam Negeri	120.566.200.000
			2. Luar Negeri	14.887.000.000
<b>999.02 BA BUN PENGELOLAAN HIBAH</b>				<b>2.853.254.017</b>
	<b>01 PELAYANAN UMUM</b>			<b>2.853.254.017</b>
		<b>999.02.07 Program Pengelolaan Hibah Negara</b>		<b>2.853.254.017</b>
			4062 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Hibah	2.853.254.017
			A. Hibah ke Daerah	2.818.309.614
			I. Pinjaman Yang Diterushibahkan	2.204.269.528
			1. <i>Mass Rapid Transit (MRT) Project</i>	2.025.540.110
			2. <i>Water Resources and Irrigation Sector Management Project- Phase II (WISMP-2)</i>	178.729.418
			II. Hibah Yang Diterushibahkan	614.040.086
			1. Hibah Air Minum	205.986.000
			2. Hibah Air Limbah	29.800.000
			3. <i>Infrastructure Enhancement Grant (IEG) - Sanitasi</i>	7.800.000
			4. <i>Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province</i>	54.570.963
			5. Hibah Australia- Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	93.360.000
			6. <i>Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)</i>	122.000.000
			7. Hibah Air Minum Tahap I	3.450.000
			8. Hibah <i>Microfinance Innovation Fund</i>	97.073.123
			B. Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing	34.944.403
			1. Hibah Pemerintah dalam Rangka Pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia di Kampus Universitas Al Azhar Mesir	34.944.403
<b>999.07 BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI</b>				<b>403.035.574.566</b>
	<b>01 PELAYANAN UMUM</b>			<b>403.035.574.566</b>
		<b>999.07.11 Program Pengelolaan Subsidi</b>		<b>403.035.574.566</b>
			4069 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Subsidi	403.035.574.566
			A. <i>ENERGI</i>	350.310.503.371
			1. Subsidi BBM dan LPG 3 Kg	246.494.184.540
			2. Subsidi Listrik	103.816.318.831
			B. <i>NON ENERGI</i>	52.725.071.195
			1. Subsidi Pangan	18.164.691.743
			2. Subsidi Pupuk	21.048.845.142
			3. Subsidi Benih	1.564.800.000
			4. PSO	2.197.096.000
			a. PT KAI	1.224.306.800
			b. PT Peln	872.789.200
			c. LKBN Antara	100.000.000
			5. Subsidi Bunga Kredit Program	3.235.806.000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 999  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BENDAHARA UMUM NEGARA

(dalam ribu rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>999.08 BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA</b>				<b>43.748.355.388</b>
<b>01 PELAYANAN UMUM</b>				<b>43.748.355.388</b>
<b>999.08.12 Program Pengelolaan Belanja Lainnya</b>				<b>43.748.355.388</b>
4070 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Anggaran Lainnya				43.748.355.388
1. Cadangan Belanja Pegawai				12.510.009.041
2. Dana Cadangan Bencana Alam				3.300.000.000
a. Dana <i>On Call</i>				1.800.000.000
b. Cadangan Bencana				1.500.000.000
3. Cadangan Risiko				6.258.000.000
a. Cadangan Risiko Fiskal				2.658.000.000
b. Cadangan Stabilisasi Harga Pangan dan Ketahanan Pangan				2.000.000.000
c. Cadangan Risiko Kenaikan Harga Tanah ( <i>Land Capping</i> )				1.600.000.000
4. Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog				30.000.000
5. Operasional Lembaga yang Belum Mempunyai BA				66.000.000
a. Kawasan Bintan dan Karimun				66.000.000
6. Ongkos Angkut Beras PNS di Distrik Pedalaman Papua				91.937.401
a. Provinsi Papua				82.268.441
b. Provinsi Papua Barat				9.668.960
7. Cadangan Beras Pemerintah				1.000.000.000
8. Cadangan Benih Nasional				39.180.379
9. Cadangan Keperluan Mendesak				3.379.433.088
10. Cadangan Selisih Kurs				300.000.000
11. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal				322.689.000
12. Tunggakan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) Kemhan/TNI Tahun 2006-2012				6.120.994.319
13. Cadangan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014				421.829.320
14. Cadangan BMP Kemhan/TNI Tahun 2014				2.500.000.000
15. Dana untuk Kegiatan Operasional OJK Tahun 2014				2.408.282.840
16. Cadangan Perlindungan Sosial				5.000.000.000
<b>999.99 BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS</b>				<b>92.986.234.031</b>
<b>01 PELAYANAN UMUM</b>				<b>92.986.234.031</b>
<b>999.99.13 Program Pengelolaan Transaksi Khusus</b>				<b>92.986.234.031</b>
4071 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Transaksi Khusus				92.986.234.031
A. Belanja Pegawai				92.681.187.929
1. Kontribusi Sosial				92.681.187.929
a. Anggaran Manfaat Pensiun (PT TASPEN)				75.317.801.612
b. Anggaran Manfaat Pensiun (PT ASABRI)				10.371.084.890
c. Jaminan Pelayanan Kesehatan				4.717.068.181
d. Cadangan Iuran Kesehatan PPN PNS				153.600.000
e. Cadangan UPSL THT				2.000.000.000
f. Jamkesmas				64.858.380
g. Jamkestama				56.774.866
B. Belanja Barang				305.046.102
1. Kontribusi ke Lembaga Internasional				78.553.831
a. USAID <i>Trust Fund</i>				10.114.563
b. <i>Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD)</i>				38.943.974





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (RABPP) TAHUN ANGGARAN 2014**

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 999  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BENDAHARA UMUM NEGARA

(dalam ribu rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
			d. <i>Endowment Fund ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)</i>	1.343.750
			e. Fasilitas Kerjasama Selatan-Selatan Bank Dunia	18.750.000
			f. ASEAN + 3 Macroeconomic and Research Office (AMRO)	5.887.913
			g. ASEAN Animal Health Trust Fund (AAHTF)	610.400
			2. Cadangan Dana Dukungan Kelayakan / Viability Gap Fund (VGF)	226.492.271

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Depdikbud dan Perekonomian,

